



UNIVERSITAS INDONESIA

**IDENTITAS NASIONAL DALAM BUKU SEJARAH UNTUK
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Komunikasi**

MUHAMAD HEYCHAEEL

1006797894

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI PASCASARJANA

KEKHUSUSAN ILMU KOMUNIKASI

JAKARTA

JUNI 2012

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhamad Heychael

NPM : 1006797894

Tanda tangan :

Tanggal : 22 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Muhamad Heychael

NPM : 1006797894

Program Studi : Pascasarjana Ilmu Komunikasi

Judul Tesis : IDENTITAS NASIONAL DALAM BUKU SEJARAH UNTUK
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Zulhasril Nasir, Ph.D (.....)

Sekretaris Sidang : Henry Fasisal. Noor, S.E., MBA (.....)

Penguji : Drs. Eduard Lukman, MA (.....)

Pembimbing : Dr. Sunarto, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Pasca Sarjana Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Sunarto, Msi selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini;
2. Seluruh Dosen Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, untuk segala ilmu yang sangat berharga dan tidak ternilai yang telah diberikan pada masa perkuliahan penulis.
3. Bu Ony, atas kepercayaannya pada kemampuan penulis dan kerja samanya dalam penelitian maupun diskusi-diskusi yang berharga bagi studi penulis di Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi.
4. Pak Edu, yang telah menjadi guru dan sahabat penulis. Terimakasih atas segala buku yang telah dipinjamkan bagi keperluan studi penulis dan diskusi serta masukan yang berharga bagi tesis ini.
5. Umi, untuk doa dan kesabarannya mendukung perjalanan pendidikan penulis sampai tingkat Pasca Sarjana. Terlebih atas kasih sayang dan perjuangannya yang membesarkan penulis seorang diri. Semoga Allah memberikan tempat yang paling terhormat untuk Umi, amin.
6. Almarhum Abi, atas perjumpaan yang singkat namun tak terlupakan dalam benak penulis. Kasih sayangnya dan keteladanan Abi layaknya sumber mata air yang tidak ada habisnya untuk diteladani. Semoga Allah memberikan tempat yang paling terhormat untuk Abi, Amin.
7. Kak Saleh, darimulah pertamakali penulis berkenalan dengan secercah ilmu yang hingga hari ini terus melekat. Kecerdasan dan keteladanan yang selalu penulis kagumi dan rindukan. Kegelisahan yang kau tularkan menjadi bahan bakar penulis dalam menulis Tesis ini. Semoga Allah selalu melindungimu.

8. Kak Farhah, kak Tutun, kak Iyoh, kak Enong, Ka Evi, kak Zaki, ka Ika, terimakasih atas kasih sayang dan kehangatan yang kalian berikan. Penulis bangga dan akan selalu bangga menjadi bagian dari keluarga kita.
9. Saugi, Alya, Halil, Adam, Rania dan Syafiq, keponakan penulis, terimakasih atas segala tawa dan keceriaan yang melegakan. Kerinduan pada kalian selalu menjadi alasan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Pasca Komunikasi UI.
10. Ami Husein, atas dukungan finansial dan semangatnya yang mendorong penulis untuk terus melanjutkan studi. Terimakasih atas kesempatan berharga yang diberikan semoga Allah membalasnya, amin.
11. Teman-teman Bunga Matahari, Shava, Syifa, Pijar, Nanda, Dita, dan Ari, terimakasih telah menjadi sahabat tempat berbagi keceriaan, kerinduan, dan kadang kala juga kesedihan. Tanpa kalian studi ini tentu akan jauh lebih sulit.
12. Genk Paseban, Rudi, Novin, Aan, Alif, Girin, Lay, Benny. Terimakasih telah berbagi Kegalauan dan secangkir kopi yang selalu jadi sumber inspirasi. Kehangatan dan keceriaan kita adalah kenangan berharga yang tidak pernah luput dari benak penulis.
13. Terimakasih pada seluruh teman-teman angkatan 2010, yang telah menjadi rumah yang nyaman bagi studi penulis selama kurang lebih dua tahun.
14. Kawan – kawan keluarga besar Ruang Studi Jatinagor (RSJ), Holy, Abel, Dedex, Upil, mang Ais, Mas Azis, Gani, Mas Wowo, Bu Eni, Galih, Ruyung, Tony ,terimakasih atas diskusi yang hangat dan mencerahkan. Dari dan bersama kalianlah semangat untuk menimba ilmu penulis dapatkan.
15. Genk Jumat Ceria, Kumbo, Igor dan Abel. Diskusi jumat yang biasa kita lakukan adalah ruang berharga tempat kita merawat kesadaran yang kian hari kian menenggelamkan kita dalam rutinitas Jakarta. Berkat itu pula, penulis tetap punya semangat untuk menyelami persoalan nasionalisme yang menjadi topik tesis ini.
16. Dimu dan Momor, sahabat di Bandung. Terimakasih untuk selalu ada bagi penulis. Baik sebagai teman diskusi, berbagi mimpi, dan juga tempat tinggal ketika penulis berkunjung ke Bandung.
17. Sahabat-sahabat Remotivi tempat penulis bekerja, Roy, Rose, Indah, Berto, Yoyon, Jefri atas pengertiannya yang memberikan penulis kelonggaran dalam deadline kerja, sehingga lebih leluasa mengerjakan tesis ini. Terlebih lagi atas persahabatan dan semangat kalian yang menginspirasi.
18. Rekan-rekan Ibu Sunda(Institut Budaya Sunda) tempat penulis bekerja. Fadly, Refki, Idim, kang Uday, Pak Tedy, Angga, Mira, Santi, Adit, teh Cucu, Pak Rahmat, Pak

Topik Mulyana, Pak Topik Ampera, Teh Nani, Bu Nani. Terimakasih atas diskusi dan kesempatan belajar yang sangat berharga.

19. Kang Hikmat dan teh Mona, atas segala dukungan yang tidak kenal pamrih. Bahan-bahan materi dan diskusi yang kalian berikan tidak hanya membantu penulis menyelesaikan tesis ini, lebih dari itu merupakan ajakan yang tidak pernah lelah untuk berdiskusi dengan hidup, demi menemukan diri dan dunia yang lebih baik untuk kita huni .

Kepada mereka semua diatas penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya. Sesungguhnya masih ada banyak nama yang karena kontribusinya layak unuk disebutkan diatas, namun karena keterbatasan ruang dan waktu tidak sempat penulis sebutkan. Kepada mereka ini permohonan maaf yang sebesar-besarnya penulis sampaikan.

Jakarta, 22 Juni 2012
Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Heychael
NPM : 1006797894
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Komunikasi
Departemen : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Identitas Nasional Dalam Buku Sejarah Untuk Kelas Dua Sekolah Menengah Pertama (SMP)


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Juni 2012

Yang menyatakan,


(Muhamad Heychael)

ABSTRAK

Nama : Muhamad Heychael
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Komunikasi
Judul : Identitas Nasional Dalam Buku Sejarah Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Tesis ini membahas mengenai kuasa/pengetahuan yang bekerja dalam membentuk identitas nasional dalam buku sejarah untuk kelas dua Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa identitas nasional yang diekspresikan dalam buku sejarah mengoperasikan bentuk kuasa/pengetahuan kolonial. Tesis ini menyarankan adanya suatu peninjauan kembali terhadap perumusan identitas nasional dalam buku sejarah, demi memungkinkannya nilai identitas yang lebih mawadahi semua elemen bangsa dan jauh dari gejala inferioritas.

Kata kunci:

Identitas Nasional, Kolonial, Kuasa/Pengetahuan

ABSTRACT

Name : Muhamad Heychael
Study Program : Postgraduate-Communication Science
Title : National Identity In History Books For Junior High School (SMP)

This thesis discusses the power / knowledge works in shaping national identity in the history books for two classes of secondary school (SMP). The study is a qualitative research approach to critical discourse analysis. The results of this study found that national identity is expressed in the form of power to operate the history books come from colonial knowledge. This thesis suggests the existence of a judicial review against the formulation of national identity in the history books, in order to allow the identity of a nation embodies all the elements and away from the symptoms of inferiority.

Key Word:

National Identity, Colonial, Power/Knowledge

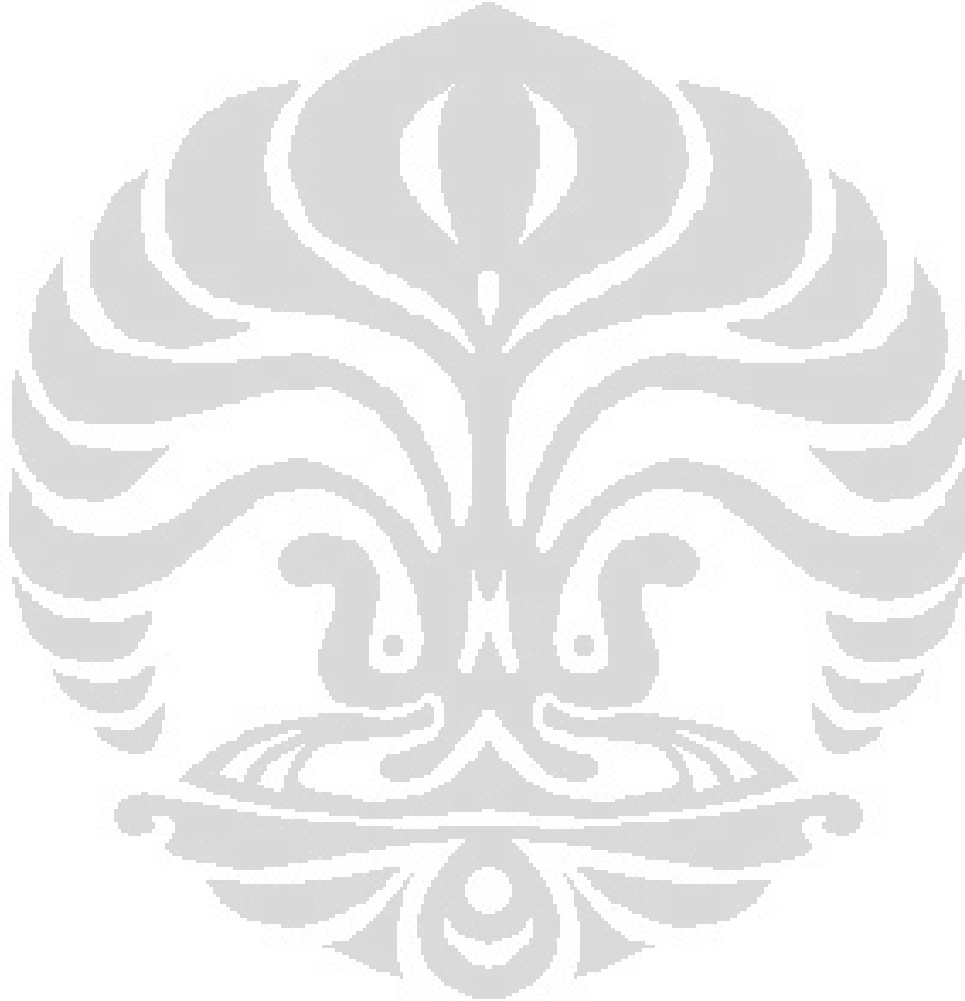
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	11
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	15
1.5 Signifikansi Penelitian	15
2. KERANGKA TEORITIS	19
2.1 Studi Terdahulu	19
2.1.1 Mistisisme Jawa: Ideologi kebatinan di Indonesia	19
2.1.2 Individu, Masyarakat, dan Sejarah: kajian kritis Buku-Buku Pelajaran Sekolah di Indonesia	20
2.1.3 Terorisme Negara dan Politik Identitas di Indonesia	21
2.2 Identitas Dalam Kajian Budaya	23
2.3 Nasionalisme dan Post Nasionalisme Dalam kajian Budaya	25
2.3.1 Nasionalisme.....	28
2.3.2 Pos-nasionalisme: Krtik Kolonial Dalam Pendekatan Pasca Strukturalis.....	32
2.4 Kuasa/Pengetahuan	36
3. PANDANGAN METODOLOGIS ANALISIS WACANA	42
3.1 Paradigma, Perspektif, dan Metodologi	42
3.2 Tipe Penelitian	49
3.3 Analisis Wacana Fairclough	51
3.3.1 Teks dan Analisis Framing	54
3.3.2 <i>Order Of Discourse</i>	57
3.3.3 Analisis Sosio Kultural.....	59
4. PEMBAHASAN	60
4.1 Analisis Teks.....	60
4.1.1 Teks Dan Analisis Framing	60
4.1.1.1 Peran Berbagai Golongan dan Pembentukan Identitas Nasional	46
4.1.1.2 Peninggalan Sejarah Bercorak Kolonial	66
4.1.1.3 Pembentukan Identitas Kebangsaan	71

4.1.2 Analisis Paradigmatik	76
4.1.2.1 Nasionalisme Indonesia: Berkah Kapitalisme Cetak dan Kolonialisme Belanda.....	76
4.1.2.2 Bahasa Dan Aksara Yang Terlupa: Teknologi, Modernitas, Dan Nasionalisme	83
4.1.2.3 Dibawah Bayang-Bayang Kolonialisme: Sejarah Yang Berupaya Memisahkan Diri	89
4.2 Analisis <i>Order Of Discourse</i>	94
4.3 Analisis Sosio Kultural.....	100
4.3.1 Semangat Renanian Dalam Kongres Sejarah	103
4.3.2 Orde Baru: Sejarah Romantis Dan Heroisme Militer	101
4.3.2.1 Histografi Alternatif: Oposisi Sejarah Orde Baru	106
4.3.2.2 Orde Baru, Kemapanan Sejarah, Dan Kritik Atasnya	107
4.3.2.3 Genealogi Bangsa Dalam Telaah Pramoedya	111
4.3.3 Sejarah Pasca Orde Baru	119
5. KESIMPULAN, DISKUSI DAN SARAN	112
5.1. Kesimpulan	125
5.2. Diskusi.....	128
5.3. Saran.....	131
5.3.1 Saran Akademis.....	131
5.3.2 Saran Praktis dan Sosial.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Basic Beliefs (Metaphisycs) of Alternative Inquiry Paradigms	43
Tabel 3.2 Perbedaan Dalam Kerangka <i>Interpretive</i>	46
Tabel 3.3 Perangkat Framing	55
Tabel 3.4 Framing Etman	56



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Tiga belas tahun sudah, rezim orde baru yang pernah begitu berkuasa di tanah air, berakhir. Bulan Mei 1998 adalah waktu AW/dilahirkannya harapan baru bagi masyarakat Indonesia, harapkan akan struktur kemasyarakatan yang lebih adil. Demokrasi adalah jawabanya bagi absennya keadilan dimasa Orde baru. Tiga belas tahun juga lamanya, dalam iklim demokratis bangsa Indonesia berupaya mereformasi apa yang dianggapnya sebagai masa lalu yang “keliru”.

Dalam bahasa mantan presiden BJ. Habibie, reformasi bekerja dengan trauma mendalam pada rezim orde baru. Sehingga hampir segala yang “berbau” orde baru hendak disingkirkan, tidak terkecuali, ideologi pancasila. Secara legal konstitusional tentu saja tidak, namun sebagai nafas pemerintahan, itu terjadi. Belakangan semakin jarang ditemui pejabat Negara mengutip atau bicara mengenai pancasila, apalagi mempraktekkannya sebagai ruh pemerintahan. Dalam pidatonya menyambut hari kesaktian pancasila, BJ. Habibie mengungkapkan:

Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik (Republika.co.id -06 November 2011 | 18:54).

Umum diketahui, semasa orde baru, pancasila pernah jadi ornament ideologis yang dipakai sebagai alat marjinalisasi. Mereka yang tidak dikehendaki oleh penguasa akan di cap sebagai tidak pancasilais. Partai Komunis Indonesia(PKI) adalah salah satu korban dari stigma semacam ini. Dalam bahasa Niels mulder,

pancasila dimasa orde baru dimistifikasi dan disakralisasi, sehingga tidak lagi menjadi praxis hidup masyarakat, kecuali tentu dalam pengertian orde baru.

Teks pidato BJ. Habibie dan perdebatan soal pancasila yang sekarang kian mengemuka, menunjukkan pasca Reformasi bangsa Indonesia menegosiasikan kembali Identitas nasionalnya. Seperti yang dikatakan Daniel Dhakidae dalam pengantar buku *Imagine Community* “ Sekarang, ketika begitu banyak daerah ingin atau sekurang-kurangnya menunggu saat yang baik untuk melepaskan diri dari Jakarta, tiba-tiba nasionalisme yang dikira sudah mati sekonyong-konyong menggeliat lagi” (Anderson, 2002: 13).

Berbagai peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Aceh dan sekarang Papua, mengajak bangsa Indonesia untuk menawar kembali gagasan ke Indonesiaanya. Terorisme yang merebak semenjak kurang lebih 10 tahun lalu (semenjak bom natal), telah melahirkan kerinduan pada ideologi nasional yang kuat.

Pancasila tiba-tiba saja menjadi tema kajian intelektual. Hal ini misalnya ditandai oleh, lahirnya banyak buku yang mengetengahkan pentingnya pendidikan Pancasila. Salah satu yang cukup menarik, adalah buku “Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila” Karya Yudi Latif. Dalam berbagai kesempatan diskusi, Yudi Latif selalu mengusulkan untuk kembali meneguhkan dan merekontekstualisasi pendidikan kewarganegaran sebagai filter atas radikalisme yang kian menyebar.

Menurut Chris Barker, dalam bukunya “Kultural Studi: Teori dan Praktek”, di tengah dunia yang semakin bergerak ke arah globalisasi, konsep negara dan bangsa menghadapi tantangan dari gerakan subnasionalisme yang berada dalam batas wilayahnya sendiri. Bagi Indonesia tantangan itu datang dari berbagai gerakan separtis dan terorisme.

Studi yang dilakukan Bennedict Anderson menunjukkan, meski selama hampir satu abad terus menerus menemui tantangan, nasionalisme masih juga menjadi ideologi yang kokoh diantara bangsa-bangsa di dunia “ Kenyataan yang ada cukup jelas: ‘era berakhirnya nasionalisme’ yang sudah begitu lama diramalkan,

tak jua nampak di cakrawala. Justru kenasionalan adalah nilai paling absah secara universal dalam kehidupan politik zaman kita” (Anderson, 2002: 4).

Justru di tengah dunia yang semakin global ini, wawasan kebangsaan menemukan relevansinya. Globalisasi mendorong apa yang dalam istilah Chris Barker disebut sebagai “diaspora global”, kini hampir setiap negara di dunia memiliki penduduk dengan etnis yang beragam. Oleh karenanya, indentitas nasional tidak bisa lagi diidentikkan dengan etnisitas ataupun ras tertentu, namun sering kali wawasan kebangsaan yang sempit menjadi tameng bagi manusia untuk membenarkan tindakan-tindakan yang mendiskriminasi sebagian manusia lainnya.

Memang harus diakui, bahwa komunalisme sebagai bentuk hubungan internal dan internasional sesuatu bangsa masih menjadi masalah utama yang dihadapi manusia dewasa ini. Kemarahan sebagian orang Jerman pada “buruh tamu” (Turki dan Maroko) berasal pada usul kebijakan naturalisasi bangsa Jerman pada kemurnian ras. Demikian juga, penolakan orang Jepang kepada “gaijin” (orang asing) sebagai sesama warga masyarakat, berakibat diskriminasi kepada penduduk negeri itu yang berasal dari Korea semasa Perang Dunia II. (Abdurahman Wahid, dalam Pospowardjo, 1994: 4).

Indonesia bukan negara yang tidak pernah mengalami luka sejarah berkaitan dengan diskriminasi ras. Peristiwa Mei 1998, merupakan trauma yang mungkin tidak akan pernah luput dari ingatan warganegara Indonesia keturunan Tionghua. Peristiwa ini sekaligus ikut mengusik identitas nasional Indonesia. Pada akhirnya, peristiwa tersebut mengetengahkan pada kita serangkaian tanya yang mendesak dijawab. Siapakah bangsa Indonesia? Apakah etnis tiongho merupakan bagian dari bangsa Indonesia? Atau siapa paling Indonesia? untuk menjawab sederetan tanya tersebut, pertama-tama kita mesti kembali menelaah gagasan mengenai apa itu bangsa?

Bangsa sebagai komunitas terbayang adalah definisi yang ditawarkan Benedict Anderson. “ Ia adalah komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan” (Anderson, 2002: 8). Bagi Anderson bangsa adalah sesuatu yang terbayang karena para anggota bangsa terkecil tidak akan kenal sebagian besar anggota lainnya, dan tidak pernah

bertatap muka satu sama lainnya. Namun, dalam benak setiap orang yang menjadi anggota bangsa hidup sebuah bayangan akan persaudaran dan kebersamaan mereka. Anderson menambahkan bangsa selalu dipahami sebagai rasa kesetikawanan yang begitu mendalam.

Pada akhirnya, selama dua abad terakhir, rasa persaudaran inilah yang membuat begitu banyak orang, jutaan jumlahnya, bersedia jangankan menyalakan nyawa orang lain, merenggut nyawa sendiripun rela demi pembayaran yang terbatas itu (Anderson, 2002: 11).

Dengan kata lain, kebangsaan sebagai sebuah produk budaya, menurut Benedict Anderson tidak turun sebagai wahyu. Melainkan, diciptakan dan dikelola agar tetap ada di kepala. Pada tataran inilah komunikasi memainkan peranan yang penting, usaha mengelola ide kebangsaan dan nasionalisme hanya dimungkinkan melalui suatu proses komunikasi yang terencana. Lewat komunikasi manusia membedakan diri dengan individu lainnya. kesadaran individu akan “dirinya” didapat melalui proses komunikasi.

Ini sesuai dengan pandangan Jhon Fiske yang mengatakan, komunikasi bukan sekedar proses transfer pesandariA keByang dalam proses tersebut melibatkan berbagai unsur seperti media, *channel*, *transmitter*, *receiver*, *noise*, dan *feedback*. Tetapi, lebih daripada itu komunikasi merupakan proses pembangkitan makna atau *generating of meaning*. Dalam pengertian ini, komunikasi juga ikut membentuk identitas kita.

Lebih jauh lagi, Hans-George Gadamer mengungkapkan bahwa melalui bahasa manusia menata dunia, sehingga “ada” sejauh dapat dipahami adalah bahasa. Pandangan Radford menekankan arti penting bahasa dalam membentuk realitas. “...i came to understand theres is no such a thing as a “world – in – itself” that lies beyond all language. “The world-in itself”, or “the real word, or “reality are all part of language that express a particular point of view” (Radford, 2005: 177). Dengannya, identitas ataupun subjek bukanlah fenomena, melainkan teks yang dinarasikan dalam bahasa.

Little Jhon dalam bukunya *Teori of Human Communication* mengatakan, pada tradisi kritis identitas dikenal dengan terminologi Subjek. Hal ini untuk

menunjukkan bahwa identitas dibentuk lewat berbagai prediksi. Salah satu perspektif yang ada dalam tradisi kritis adalah posmodern. Perspektif dimana penelitian ini mendasarkan asumsinya. Subjek postmodern adalah subjek yang menyejarah, sehingga ia bisa saja berubah di dalam gerakan sejarah. Sedangkan sejarah dan wacana mempunyai pertautan yang erat, sejarah terbentuk melalui episteme (pengetahuan/cara pandang) yang tersimpan dalam wacana (Mills,1997; Barker,2000; Kendall&Wickham,1999).

Dengan pendekatan kritis, kita memahami bahwa melalui berbagai diskursus ras, agama, atau etnisitas, narasi mengenai nasionalisme dibangun dan Individu-individu disatukan dalam sebuah kolektivitas yang kemudian disebut sebagai bangsa. Proses pembentukan identitas menurut Samovar tidak dapat dilepaskan dari peran institusi sosial seperti keluarga, komunitas, religi dan pendidikan. Pada kasus pembentukan konsepsi negara bangsa, sekolah menjadi tempat yang paling tepat, dan sejarah memainkan peranan yang penting. Melalui buku panduan bagi murid, narasi nasionalisme diajarkan dengan cara mengkomunikasikan sejarah sebagai kenyataan objektif.

Dengannya kita mengerti gagasan mengenai dunia dan identitas hanya dimungkinkan melalui proyek kultural dan historis. Pertanyaan, “siapa kita?” hanya mungkin dapat dijelaskan oleh narasi sejarah dan politik, seperti dalam pendidikan sejarah dan kewarganegaraan. Ada perbedaan mendasar antara teks pendidikan sipil dan sejarah. Pendidikan sipil yang dikenal sebagai pendidikan kewarganegaraan, merupakan tempat pengolahan ideologi nasional yang sifatnya politis. Kita dapat menemui berbagai corak pendidikan sipil dalam perjalanan sejarah bangsa.

Pada era orde lama pendidikan nasional diarahkan untuk menentang imperialisme, kolonialisme, dan neo kolonialisme. Hal ini dapat kita lihat dari tujuan dan moral pendidikan nasional yang bermaksud untuk “ melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila” (Tilaar, 1995: 101).

Sementara orde baru, punya maknanya sendiri mengenai pendidikan sipil. “ Di sekolah, pendidikan pancasila bertujuan untuk membentuk manusia indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, toleran terhadap orang lain, dan yang mampu menundukkan diri demi kesejahteraan orang banyak” (Mulder,2001; 121).

Niels Mulder dalam bukunya *Mistisisme Jawa*, mengatakan “dari tingkat pertama sampai terakhir, penataran dibagi kedalam bab-bab yang disajikan dibawah judul-judul seperti “ketaatan”, “kerukunan”, “kedaulatan”, “kepatuhan”, “kesatuan”, yang sering tidak ada hubungannya dengan materi yang dibicarakan”. Lebih jauh lagi, pancasila sendiri sebagai ideologi bangsa, sangat erat kaitannya dengan kepercayaan jawa. Sehingga besar kemungkinan, identitas kebangsaan yang ingin dibangun orde baru dilandasakan pada falsafah jawa.

Telah lama dipahami bahwa kurikulum pendidikan moral pancasila, merupakan tempat pengolah ideologi Nasional. Meski pendidikan Kewarganegaraan pertama kali muncul tahun 1962, pada masa kekuasaan orde lama, penggunaannya secara teratur dan strategis sebagai alat ideologisasi baru dilakukan pada masa pemerintahan orde baru.

Untuk mencari tahu adanya ketegangan antara mitos dan sejarah, fiksi dan fakta, ideologi dan realitas, maka tidak ada tempat yang lebih bagus dibanding dengan buku-buku teks siswa-siswi sekolah., dan usia anak paling strategis adalah siswa-siswi sekolah menengah. Dalam hal ini pun tempat terbaik adalah pendidikan Moral Pancasila, yang menjadi inti pengerjaan dan pengolahan Ideologi Orde Baru (Dhakidae, 2003: 24)

Berbeda dengan pendidikan kewargaan yang semenjak awal dipahami sebagai upaya politik, sejarah kerap kali dinilai sebagai kenyataan objektif. Itulah mengapa sejarah dapat bertahan lebih lama dari usia rezim yang berkuasa, tanpa disadari sejarah telah menjadi rezim tersendiri. Pandangan semacam inilah yang diintrodusir Michel Foucault dengan konsep kuasa/pengetahuan. Baginya, pengetahuan bukanlah sesuatu yang terpisah dengan kehendak atau prasangka, seperti yang selama ini dikumandangan oleh tradisi pemikiran positivisme. sebaliknya, ilmu-ilmu manusia adalah perwujudan kehendak untuk berkuasa, klaim ilmiah dan kebenaran tidak lain merupakan startegi kuasa. Obyektivitas dan

netralitas adalah cara lain untuk memaksakan kehendak akan kekuasaan. Kendall dan Wickham menjelaskan hubungan kuasa/pengetahuan dalam terminologi Foucault sebagai:

Power mobilises non-stratified matter and function, it local and unstable, and its flexible. Knowledge is stratified, archived and rigly segmented. Power is strategic, but it is anonymous. The startegies of power are mute and blind, precisely because they avoid the form of knowledge, they sayable and the visible (Kendall and Wickham, 1999 : 51).

Bagi Foucault, Kuasa dan pengetahuan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kuasa menemukan bentuknya dalam pengetahuan. Setiap pengetahuan pasti mengandung kuasa dan setiap kekuasaan produktif menghasilkan pengetahuan. Foucault mendefinisikan strategi kekuasaan sebagai kehendak untuk mengetahui. Melalui wacana, kehendak untuk mengetahui terinstitusi menjadi disiplin pengetahuan. Jika telah demikian, maka bahasa adalah alat mengungkapkan kekuasaan, karena kuasa mendapatkan “kebenaran” dalam pernyataan-pernyataan ilmiah.

Haryatmoko dalam bukunya “Etika Politik dan Kekuasaan”, memberikan contoh mengenai hubungan kuasa pengetahuan dengan menunjukkan analisis Foucault terhadap sejarah kegilaan.

Kalau seorang tenaga medis berhasil mengisolasi kegilaan, bukan berarti ia memahami kegilaan, tetapi dia memiliki kekuasaan atas “orang gila”. Foucault dengan cara itu ingin menunjukkan ilusi kenafian ilmu-ilmu tersebut. Dalam konteks ini, Suveiller et Punir (1975) melukiskan bagaimana bentuk baru kekuasaan semakin meyempurnakan diri dengan bantuan ilmu-ilmu manusia (Haryatmoko, 2003:228).

Studi yang dilakukan Mikihiro Moriyama terhadap masyarakat Sunda, memberi contoh yang baik bagaimana cara kerja kuasa/pengetahuan. Dalam bukunya “Semangat Baru: Kolonialisme, Budaya Cetak, dan Kesastraan Sunda Abad ke – 19”, menunjukkan bahwa para ilmuwan awal kolonial Belanda yang mempelajari masyarakat Sunda, menemukan bahwa budaya Sunda tidak memiliki sastra. Pernyataan ini datang dari bias pengetahuan Kolonial Eropa. Tradisi literasi yang

telah lama mengakar di Eropa, melahirkan gagasan bahwa setiap pengetahuan mestilah dituliskan.

Tentu saja masyarakat Sunda memiliki tradisi sastra dalam bentuk pantun dan danding, hanya saja, keduanya tidak dituliskan. Metode pengetahuan modern yang dibawa ilmuan kolonial telah menegaskan kenyataan tersebut. Pada akhirnya, upaya memahami masyarakat yang dilakukan ilmuan kolonial tidak hanya menjelaskan sastra Sunda, tapi juga “rekacipta” kesundaan atau identitas Sunda. Sebagaimana yang jelaskan Edward Said tentang “Orientalisme”.

Merupakan cara yang sudah mengurat akar dalam berurusan dengan timur – dengan cara membuat klaim-klaim tentang mereka, melegitimasi prangsangka tentang mereka, menggambarkan, mereka mengajari mereka, menguasai mereka, memerintah mereka; singkatnya orientalisme merupakan gaya Barat untuk mendominasi, merestrukturisasi dan menguasai timur” (Samuel, 2010: 10).

Eropa abad 19 adalah eropa yang didominasi oleh pengetahuan humanis, yang sepenuhnya diinspirasi oleh filsafat pencerahan dari Descartes. Menurut Leila Gandhi, dasar utama dari ilmu pengetahuan Cartesin adalah cirinya yang menonjol dalam mendefinisikan subjek yang berpikir dan objek yang dipikirkan serta hasrat yang besar untuk menemukan kedirian atau *self* yang utuh.

Kolonialisasi yang terjadi di Asia dan Afrika mengimpor gagasan-gagasan pengetahuan pencerahan ke Negara yang mengalami kolonialisasi. Relasi subjek objek dalam filsafat Cartesian, diaplikasikan dalam pengetahuan kolonial menjadi, bangsa Eropa yang berpikir (subjek) dan masyarakat kolonial yang dipikirkan (objek).

Kenyataannya masyarakat terjajah bukanlah objek yang pasif, karenanya kita menemui perlawanan dimana-mana dilakukan terhadap kolonialisasi yang menindas. Seperti yang ditulis Said, perlawanan itu bukan hanya bersifat fisik dengan senjata, akan tetapi juga melibatkan upaya kultural untuk merebut kemerdekaan.

Sejalan dengan hambatan bersenjata diberbagai tempat pada abad ke-19 seperti Algeria, Irlandia, dan Indonesia, ada juga usaha-usaha yang patut

dipertimbangkan yang ada dalam hambatan secara Kultural hampir disemua tempat, tuntutan-tuntutan identitas para nasionalis, dan dalam bidang politik, dunia asosiasi dan partai-partai yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu pengakuan diri dan kemerdekaan nasional (Said, dalam Gandhi, 2001: 137)

Upaya perlawanan kultural seperti yang diungkapkan Said, antara lain diteriakkan Soekarno dalam gagasannya mengenai nasionalisme Indonesia. “Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang lebar, nasionalisme yang timbul dari pengetahuan atas susunan dunia dan riwayat, ia bukan pula chauvinisme dan bukan pula tiruan dari Barat” (Soekarno, 1959: 112-113). Perlawanan terhadap kolonialisme, sekaligus melahirkan upaya kultural untuk menemukan identitas nasional yang berbeda dengan corak kolonial.

Mesipun demikian, faktanya, kemerdekaan yang diraih kelompok-kelompok nasionalis diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia dan upaya mereka untuk membangun identitasnya, tidak begitu saja menghapuskan struktur kemasyarakatan yang dibawa kapal-kapal kolonial beberapa abad sebelumnya.

Gejala poskolonial masih juga dapat dilihat melalui Teks buku sejarah untuk pendidikan formal yang terus menerus mengulang narasi Indonesia sebagai kelanjutan dari Majapahit dan Sriwijaya. Indonesia diyakini sebagai bagian yang tidak terpisahkan, kecuali mungkin oleh waktu, dari Sriwijaya dan Majapahit. Dalam berbagai pidatonya, termasuk di depan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, Soekarno menyebut Sriwijaya dan Majapahit sebagai *nations state*.

Dalam kaitannya dengan adanya sekian banyak kerajaan-kerajaan tradisional didalam wilayah nusantara itu, maka oleh masyarakat umum kita, dan ini juga diajarkan disekolah-sekolah, dari tingkat dasar sampai menengah, dikenal secara populer nama kerajaan Sriwijaya dan majapahit...justru dalam konteks sejarah Indonesia, yang merdeka dan berbentuk republik, menyebutkan kerajaan sriwijaya dan majapahit sebagai yang telah mempersatukan Indonesia, agaknya perlu diberi catatan dan dipikir ulang (Gonggong,2011: 4).

Kenyataannya sejarah menunjukkan, Sriwijaya ataupun Majapahit bukanlah *nation state*, setidaknya bukan sebagaimana yang digagas di eropa masa Pencerahan. Episteme atau dikursus yang melandasi kedua era tersebut tidaklah

sama. Meminjam istilah Pramoedya Ananta Toer, Indonesia adalah mahluk baru, hasil karya paling besar dari peradaban modern, yaitu kolonialisasi.

Upaya Soekarno untuk melekatkan Indonesia dengan Sriwijaya dan Majapahit tidak lain upaya mencari dan meneguhkan identitas nasional yang utuh. Paradigma sejarah yang disebut oleh Foucault, sebagai sejarah yang total, yang mengandaikan prinsip-prinsip seperti perkembangan, perubahan evolusi, akumulasi, genesis, kontinuitas, kausalitas, kronologisasi, kulminasi, pendeknya seluruh prinsip yang direpleksikan dari model pertumbuhan linier ekonomi dan biologi (Suyono, 2002: 146).

Cara menulis sejarah yang monumental dan hasrat akan identitas yang utuh, adalah satu saja dari sekian residu pos kolonial yang dapat kita temukan dalam sejarah nasional. Dalam narasi agung itulah, selama lebih dari setengah abad manusia Indonesia mencari “selimut” kenyamanan. Dengan modal ini pula, wacana pribumi dan non pribumi, yang merupakan struktur kemasyarakatan yang dilembagakan pemerintah kolonial, di “awetkan”.

Bukan tidak mungkin, narasi yang sama ikut bertanggungjawab terhadap berbagai kebijakan diskriminasi terhadap warga Negara Indonesia keturunan Tiongho dan bahkan kekerasan yang pernah terjadi pada mereka. Dengan latar belakang itu, menjadi penting untuk membongkar kuasa/pengetahuan yang melegitimasi identitas nasional yang bercorak pos kolonial. Konsekuensi dari pengertian kuasa yang dibangun Foucault, dimana kuasa tidak bisa dimiliki, cair dan tersebar, melahirkan konsepsi resistensi.

Resistensi sebagaimana Ramazanoglu (1993) mencatat, bagian dari definisi Foucault tentang kuasa semenjak ia menentukan bahwa semua kuasa memproduksi resistennya. Resistensi atau perlawanan pada kuasa, menurut Ramazanoglu, dapat mengambil bentuk wacana baru yang menghasilkan ‘kebenaran baru’. Ramazanoglu berlanjut dengan mencatat bahwa hal ini mungkin ‘wacanan balasan’ yang melawan kebenaran dominan atau ‘wacana yang dibalikkan’. Karenanya dalam upaya membongkar narasi identitas nasional,

menjadi tidak terhindarkan untuk menjelaskan kerja resistensi gagasan identitas nasional, yang berkembang dalam sejarah alternatif (non pemerintah).

1.2 Fokus Penelitian

Kurikulum pendidikan nasional, tidak terkecuali sejarah, sampai saat ini memang masih dikontrol oleh pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Nasional (Diknas). Semua penerbit yang hendak menerbitkan buku teks untuk sekolah mesti lulus standarisasi yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Standarisasi Pendidikan). Dengan cara seperti ini, Negara masih berperan dalam upaya menentukan apa yang layak dan tidak masuk dalam sejarah nasional. Hampir dapat dipastikan setiap buku teks yang terbit akan memiliki corak sejarah yang sama, perbedaan kemungkinan besar tampak dari cara bagaimana mengartikulasikan kurikulum yang terstandar dalam narasi.

Meski demikian, untuk melakukan analisis terhadap tema di atas dan mengingat banyaknya buku serta penerbit yang menerbitkan buku teks sejarah untuk sekolah, maka penelitian ini memerlukan beberapa pembatasan demi memfokuskan penelitian. Pertama, berdasar pada topik wacana, dan peran dalam reproduksi wacana, maka dipilih teks buku sekolah untuk kurikulum kelas 2 sekolah menengah pertama (SMP).

Pilihan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa pada kurikulum SMP untuk kelas 2, teks menyoal identitas nasional mulai menjadi bahan ajar. Dalam standar isi 2006, bab mengenai “Pembentukan Identitas Kebangsaan” dan “Peran Berbagai Golongan dan “Pembentukan Identitas Nasional” serta “Peninggalan Sejarah Bercorak kolonial” secara tersirat menjadi judul bab buku sekolah. Namun luasnya pembahasan dalam buku sekolah sejarah kelas 2 SMP, mengahruskan penelitian ini membuat cakupan yang lebih fokus lagi. Untuk itu, dipiliha 3 bab dari 18 bab yang ada dalam buku.

Fokus penelitian ini akan di arahkan pada tiga bab, yaitu “Peran berbagai Golongan dan Pembentukan Identitas Nasional”, “Pembentukan Identitas Kebangsaan, dan Terakhir “Peninggalan Sejarah Bercorak kolonial”. Dua bab

pertama dipilih sebab terkait langsung dengan tema penelitian menyangkut Identitas Nasional, sedangkan yang ketiga mengekspresikan suatu pandangan mengenai identitas nasional di era pascakolonial. Bangsa yang pernah dijajah adalah salah satu bentuk identitas nasional yang dominan dalam perumusan identitas nasional bangsa Indonesia. karenanya menjadi penting menaruh perhatian pada bagaimana sejarah menggambarkan cara bagaimana kita memandang hubungan dengan kolonialisme dan bagaimana bersikap terhadap peninggalanya.

Kendati demikian, pembatasan ini bukan berarti peneliti akan mengabaikan teks-teks lain dalam buku sekolah yang terkait dengan isu identitas nasional seperti bab-bab soal sriwijaya, majapahit, dan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, yang juga bagian dari materi buku sekolah SMP. Bab-bab terkait tersebut tetap akan jadi bahan analisis, meski bukan yang utama.

1.2 Rumusan Masalah

Umum diketahui objek formal ilmu komunikasi adalah pernyataan-pernyataan manusia. Pernyataan dalam pengertian ini bisa berbentuk banyak hal. Berupa teks tertulis, lisan, bentuk nonverbal (arsitektur, praktik institusi, chart juga gambar). (Littlejohn. 2005; 330). Sementara objek formal ilmu komunikasi adalah cara yang dengannya manusia menyampaikan pesan. Kendati demikian, gagasan komunikasi sebagai transmisi pesan dari komunikator pada komunikan, belakangan banyak mendapat tantangan. Terutama, semenjak cultural studies muncul sebagai sebuah bentuk analisis dan pada akhirnya disiplin yang diterima dunia akademis.

Isu mengenai bahasa dan kekuasaan menjadi penting dalam studi ilmu sosial. Studi media dalam ilmu komunikasi pun mulai menemukan makna barunya, terutama semenjak tradisi kritis yang pertama kali dikenalkan oleh mazhab Frankfurt memberi perspektif lain terhadap studi budaya populer. Tradisi kritis mengkritik pendekatan positivistik yang selama ini mengosongkan ilmu dari nilai. Positivisme pun dinilai ahistoris. Karena itu, pada perkembangannya, Analisis

kesejarahan merupakan ciri dari kritik kajian komunikasi yang mendasarkan dirinya pada tradisi kritis.

Dengan sendirinya, pendefinisian subjek sebagaimana yang diandaikan oleh pendekatan kritis adalah retak dan menyejarah. Subjek tidak pernah tetap, ia terus berubah dalam ruang dan waktu. Pendefinisian selalu bergantung pada wacana dan kuasa yang berkelindan. Menurut Foucault tiap periode mempunyai episteme, pandangan dunia (*worldview*) atau struktur konseptual yang berbeda. Episteme (*the way of thinking*) tidaklah dipengaruhi oleh individual, akan tetapi bergantung pada struktur wacana yang dominan. Aturan diskursif ini kemudian menentukan cara atau praktik perlakuan individu terhadap wacana tersebut.

Buku Sejarah merupakan bentuk praktek pewacanaan identitas nasional, teks-teks yang terkandung didalamnya tentu saja mengakomodir pengetahuan-pengetahuan tertentu dan menyingkirkan sebagian lainnya. Orde lama dengan semangat sosialisme dan anti kolonialismenya tidak memberi ruang pada pengetahuan demokrasi liberal misalnya, begitu pula dengan orde baru yang melarang ajaran komunis dan Marxisme.

Proses tersebut menurut Bambang Purwanto, tidak pernah lepas dari komunikasi. Seperti ditulis dalam buku “Kegagalan historiografi Indonesia Sentris”:

Sementara itu untuk membangun nasionalisme sebagai sebuah kebudayaan atau wacana yang dipahami masyarakat, diperlukan strategi dan komunikasi tertentu sehingga fungsi ideologisnya dapat terbentuk dan terjaga secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, pendidikan secara langsung menjadi instrumen penting dalam proses sosialisasi nilai nasionalisme kepada masyarakat, khususnya generasi muda dalam proses sosialisasi ini, buku pelajaran merupakan salah satu media utama untuk membangun konfigurasi nasionalisme yang akan ditanam pada masyarakat (Purwanto, 2006: 163)

Proses organisasi pesan dalam penulisan sejarah, menentukan bagi bangsa Indonesia mengenai apa yang harus diingat dan dilupakan. Apa yang benar dan apa yang salah. Penyaringan “pengetahuan” semacam inilah yang berimplikasi pada penyeragaman prinsip, keyakinan, dan kepercayaan. Pengetahuan yang

dimasud Foucault bukanlah ideologi dalam terminologi Marxisme, yang sering kali diartikan sebagai kesadaran palsu.

Bagi Foucault tidak ada yang tidak bersifat ideologis, sebab setiap pengetahuan selalu mengandung kuasa. Pengertian pengetahuan sendiri dalam terminologi Foucault sangat erat kaitannya dengan kuasa. Sering kali ketika bicara mengenai pengetahuan, ia menggunakan kata *Power/knowledge*. *Power/Knowledge*, menunjukkan hubungan kuasa dan pengetahuan yang selalu tegang. Dimana tak ada kuasa yang dilegitimasi pengetahuan dan sebaliknya tidak ada pengetahuan tanpa kuasa.

Berbeda dengan pendidikan Kewargaan yang cenderung berubah seiring dengan rezim yang berkuasa, dan sering kali dilihat sebagai karya politik, narasi pendidikan sejarah dilihat sebagai bentuk ilmu pengetahuan. Pandangan inilah yang ditolak oleh Michel Foucault, baginya pengetahuan dan kekuasaan memiliki hubungan yang bersitegang. Klaim ilmiah yang selama ini menjadi pembenaran akan sifat pengetahuan yang netral, bagi Foucault adalah strategi kuasa. “Pengetahuan adalah cara bagaimana kekuasaan memaksakan diri kepada subyek tanpa memberi kesan ia datang dari subyek tertentu” (Haryatmoko, 2003: 225).

Melalui buku teks sejarah untuk siswa siswi Sekolah Menengah Pertama, penelitian ini bermaksud membongkar narasi identitas nasional yang selama ini ditulis dengan kuasa/pengetahuan modern, yang bernafsu akan otentisitas dan kontinuitas. Dengan pendekatan poskolonial, penelitian ini bermaksud menunjukkan jejaln kuasa/pengetahuan yang selama ini membangun memori kolektif mengenai identitas nasional. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam uraian diatas, maka dalam penelitian ini terdapat masalah yang dapat diidentifikasi untuk diteliti.

1.3.1 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Relasi kuasa dan pengetahuan yang membentuk narasi identitas nasional dalam buku sejarah untuk siswa siswi sekolah menengah pertama (SMP)?

1.4 Tujuan penelitian

1. Menguraikan jejalin kuasa dan pengetahuan yang membentuk narasi identitas nasional dalam buku sejarah untuk siswa siswi sekolah menengah pertama (SMP).
2. Menggambarkan Identitas Nasional Dalam Buku sejarah Sekolah Menengah Pertama (SMP).

1.5 Signifikansi

1.5.1 Teoritis

Upaya mengkaji ideologi dalam praktek pendidikan di Indonesia memang terbilang cukup langka, apalagi penelitian yang menjadikan buku sekolah sebagai fokusnya. Salah satu dari yang sedikit itu, adalah kajian antropolog Belanda, Niles Mulder. Penelitian Niles Mulder, mengenai buku-buku sekolah di Indonesia, dibukukan dalam buku berjudul “Wacana Publik Indonesia: Apa kata Mereka Tentang Diri Mereka”, merupakan karya yang sangat berharga untuk memulai memasuki studi pendidikan dan kekuasaan ditanah air.

Dalam studinya Mulder mencoba menguraikan bagaimana peran ideologi rezim orde baru, yang disebutnya sebagai manifestasi dari keyakinan jawa, meresap dalam praktek pendidikan. Dengan pendekatan antropologi Marxian, ia melihat ideologi jawa menghegemoni praktek pendidikan nasional, manifestasinya tampak dalam buku ilmu pengetahuan sosial dan terutama pendidikan moral pancasila.

Mulder mengatakan “dari tingkat pertama sampai terakhir, penataran dibagi kedalam bab-bab yang disajikan dibawah judul-judul guntingan seperti

“ketaatan”, “kerukunan”, “kedaulatan”, “kepatuhan”, “kesatuan”, yang sering tidak ada hubungannya dengan materi yang dibicarakan”. Lebih jauh lagi, pancasila sendiri sebagai ideologi bangsa, sangat erat kaitannya dengan kepercayaan jawa. Sehingga besar kemungkinan, identitas nasional yang ingin dibangun orde baru dilandaskan pada falsafah jawa.

Pemerintah orde baru menyakini pendidikan pancasila dan kewarganegaraan haruslah bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya, demi mendukung cita-cita pembangunan. “ Di sekolah, pendidikan pancasila bertujuan untuk membentuk manusia indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, toleran terhadap orang lain, dan yang mampu menundukkan diri demi kesejahteraan orang banyak” (Mulder,2001; 121).

Implikasi dari studi Mulder yang melihat proses pendidikan sebagai bentuk “ideological state apparatus”, menjadikan Negara sebagai entitas tunggal. Ideologi jawa yang dikelola orde baru dalam pendidikan nasional tidak lain adalah cara Negara memaksakan identitas nasional yang dikehendakinya, secagai cara mereproduksi kepatuhan.

Kerangka teoritis yang demikian kemudian menempatkan identitas nasional sebagai karya rezim politik. Berakhir sebuah rezim, berakhir juga pandangan-pandangan yang dipelopornya. Pada konteks Negara orde baru yang otoriter, studi Mulder mungkin masih menemukan relevansinya. Peran Negara yang dominan di era Orde Baru, membuat pilihan Mulder untuk menganalisis sekolah sebagai ruang pengolahan ideologi Rezim menjadi signifikan.

Meski demikian, tetap saja kerangka teoritis kekuasaan dari tradisi Marxian, kerap kali gagal melihat kompleksitas masalah. Menempatkan negara sebagai kuasa dominan, tanpa mempertanyakan kelahirannya sebagai bagian yang tidak dapat dilepaskan dari proyek nasionalisme dan kolonialisme, akan membuat kita abai pada kompleksitas masalah. Terlebih di era orde reformasi dimana yang berlaku adalah demokrasi, sangat sulit melihat corak ideologi rezim yang berkuasa.

Justru tepat disanalah signifikansi penelitian ini dengan studi Niles Mulder, jika Mulder berangkat dengan asumsi kuasa sebagai sesuatu yang hegemonik dan

represif, konsekuensinya terlokalisir dalam organisasi Negara dan dijalankan oleh elit berkuasa. Maka penelitian ini justru berangkat dari pandangan Foucault mengenai kuasa/ pengetahuan, yang sama sekali lain dari tradisi Marxian.

Kuasa dalam pandangan Foucault bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki atau terinstitusikan melainkan strategi, kuasa tidak dapat dialokasikan tetapi terdapat dimana-mana, kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalui normalisasi dan regulasi. Konsekuensi logis dari cara pandang demikian, membuat penelitian ini tidak melihat Negara sebagai aparat ideologi, dan melihat identitas nasional sebagai proyek rezim.

Identitas nasional merupakan proyek yang dimulai sebelum dan sesudah berdirinya Indonesia, dan hingga sekarang terus masih menjadi pergulatan. Tidak pernah ada Identitas nasional yang selesai, walaupun perubahan terjadi dalam setiap rezim pemerintahan, itu bukan karena identitas nasional adalah karya rezim, karena bahkan Negara sendiri adalah entitas yang lahir dari pertemuan bangsa Indonesia dengan kekuatan kolonial. Itulah mengapa pendekatan poskolonial dalam penelitian ini menjadi tidak terhindarkan.

Pada akhirnya selain memperkaya khasanah penelitian komunikasi dengan subjek-subjek pendidikan formal, penelitian ini juga mengetengahkan pendekatan teoritis yang berbeda dengan studi-studi terdahulu yang telah dilakukan. Sehingga diharapkan dapat menemui suatu kesimpulan yang berbeda dan mampu membuka celah pada kajian lebih lanjut menyangkut tema ini.

1.5.2 Praktis

Jatuhnya rezim orde baru pada bulan Mei 1998, membawa serta semangat reformasi dan pembaruan diberbagai bidang. Pendidikan merupakan bidang kehidupan yang telah lama menantikan angin perubahan yang hingga kini belum tampak. Upaya untuk mereformasi pendidikan nasional, terutama pendidikan sejarah, kerap kali menemui jalan buntu.

Setiap usaha untuk menata ulang masa lalu yang selama ini dianggap memarjinalkan sebagian kelompok masyarakat, masih terbentur oleh memori kolektif yang ‘mapan’. Itulah mengapa ketika sebagian sejarawan berupaya

merevisi sejarah kelam tahun 1965, mereka harus berhadapan dengan keputusan Mahkamah Agung tahun 2007, soal kewajiban untuk mencantumkan Partai Komunis Indonesia (PKI), sebagai dalang gerakan 30 September 1965.

Ada semacam ketakutan atau bahkan keyakinan yang telah mengakar untuk menawar kembali masa lalu. Kecenderungan rezim otoriter untuk menghindari sesuatu yang sifatnya plural, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Perubahan masyarakat ke arah yang lebih demokratis dan plural, rupanya belum dibarengi oleh upaya reformasi pendidikan yang memiliki semangat sama.

Pendidikan nasional dalam hal ini pendidikan sejarah, memang telah melakukan perubahan merespon era demokrasi. Hal ini misalnya terlihat, dengan mulai diajarkannya beberapa versi sejarah menyangkut peristiwa Gerakan 30 September 1965. Namun, apa yang jadi pusat ataupun episentrum pendidikan sejarah, yaitu gagasan mengenai apakah Indonesia (politik-historis)? masih juga diselubungi semangat poskolonial yang merindukan masa lalu yang megah dan utuh. Dalam kerangka memberikan sumbangsih pemikiran bagi reformasi pendidikan, terutama pendidikan sejarah, penelitian ini berupaya memproblematisir identitas nasional yang bercorak poskolonial.

Bab 2

Kerangka Teoritis

2.1 Studi Terdahulu

Sebuah penelitian yang baik tentu saja harusnya berawal dari dialog dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggali subjek ataupun pendekatan yang sama. Tentu saja penelitian ini bukan yang pertama mengkaji buku sekolah di Indonesia. Semenjak awal 90an, Niles Mulder, seorang antropolog Belanda, telah memulai serangkaian studi yang serius terkait tema ini. Berawal dari ketertarikannya terhadap kebatinan Jawa, ia mulai memperhatikan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang dinilai sangat kental bercorak kebatinan Jawa.

Kajian tersebut kemudian berlanjut pada perhatian yang lebih mendalam mengenai buku-buku sekolah di Indonesia. Selain, dua penelitian Mulder, penelitian ini juga berdialog dengan studi yang dilakukan Ariel Heryanto yang telah diterbitkan oleh Routledge dengan judul asli "*State Terrorism and Political Identity in Indonesia*". Kesemua penelitian yang dijadikan rujukan studi terdahulu dalam penelitian ini, memilih latar negara orde baru, kendati demikian masih merupakan penelitian-penelitian yang relevan untuk menjelaskan Indonesia saat ini. sebagaimana sebuah dialog, penelitian ini berangkat dari kritik atas ketiga penelitian tersebut, mengisi ruang-ruang yang ditinggalkannya, sekaligus digerakkan oleh ketajamannya.

2.1.1 Mistisisme Jawa: Ideologi kebatinan di Indonesia

Dengan pendekatan antropologi kritis Niles Mulders mencoba merekonstruksi pandangan dunia orang Jawa. Melalui berbagai teks mengenai ajaran kejawaan dan praktek mistik masyarakat Jawa, serta buku teks kewarganegaraan yang diajarkan di sekolah, Mulder membangun argumentasinya. Intisari kebudayaan Jawa dalam studi Mulder, dikatakannya merupakan ajaran mengenai harmoni dan keluarga.

Ide mistis Jawa inilah yang menurutnya menjadi bahan dasar bagi penyusunan moral Pancasila dan tentunya kurikulum kewarganegaraan.

Gagasan politik harmoni dan kekeluargaan diaplikasikan dalam falsafah Pancasila menjadi pandangan mengenai negara bangsa sebagai keluarga. Model ini menurut Mulder adalah kelanjutan dari gugus diskursif pra kolonial. Negara adalah ayah (yang paham dan mengerti) dan rakyat adalah anak (butuh bimbingan), atas dasar pandangan ini negara orde baru dibangun..

Pandangan kritis Mulder yang diinspirasi oleh Marxis-humanis, menilai bahwa konsep politik harmoni Jawa merupakan bentuk penindasan terhadap individu dan kegagalan demokrasi Indonesia. Seperti tulisnya “Indonesia sama sekali bukan sebuah keluarga besar. Dalam sebuah keluarga, anda saling mengenal secara pribadi. Apakah secara pribadi anda kenal dua ratus juta orang di negeri ini?” (Mulders, 2001:146). Persis disinilah perbedaan penelitian ini dengan apa yang dilakukan Mulders,

Pendekatan poskolonial yang diinspirasi Foucault dalam penelitian ini menolak cara pandangan sejarah yang linier seperti yang di praktikan Mulders. Jika Mulders mengasumsikan otonomi individu dan demokrasi sebagai syarat sempurnanya negara bangsa, maka penelitian tidak berpretensi mengukur sejarah dengan suatu standar tertentu, tidak pula humanisme. Sebaliknya, justru memberi peluang melihat berbagai diskursus tersebut sebagai strategi kreatif yang memungkinkan lahirnya konsep negara bangsa yang Non Eropa.

2.1.2 Individu, Masyarakat, dan Sejarah: kajian kritis Buku-Buku Pelajaran Sekolah di Indonesia.

Kajian Mulder lain yang memiliki intensitas lebih tinggi dengan penelitian ini adalah studinya mengenai kebudayaan dan sejarah dalam buku-buku sekolah. Mulder menyoroti tiga pelajaran utama dalam sekolah dasar di masa orde baru, yaitu pelajaran sejarah, kewarganegaraan dan ilmu pengetahuan sosial.

Penelitiannya menekankan peran penting upaya negara dalam menanamkan ideologi dalam pendidikan demi melanggengkan kekuasaan.

Mulder melihat bahwa individualitas merupakan suatu hal yang tabu dalam berbagai buku teks sekolah, hal ini demi menguatkan gagasan bangsa sebagai keluarga, sehingga individu mesti melebur dalam kesatuan yang lebih luhur. sejarah dibaut terpecah-terpecah tanpa narasi yang utuh dan komprehensif, demi menghindari pemahaman yang mendalam. Sementara siswa diajak untuk melihat dunia sosial melalui ilmu pengetahuan sosial dengan memulainya melalui keluarga. Kesendirian atau otonomi individu pada akhirnya dilihat sebagai siksaan, manusia tanpa keluarga seperti tak punya arti. Seolah eksistensi manusia tidak pernah ada diluar keluarga.

Mulder menenpatkan studinya sebagai sebuah kritik atas rezim berkuasa, sehingga lebih bercorak *Ideological State Apparatus* (ISA) ala Althusserian. Dimana negara dalam hal ini rezim berkuasa menjadi aktor utama, analisis berpusat pada berbagai gagasan yang ditularkan negara dalam pendidikan demi mereproduksi kepatuhan. Implikasi cara pandang demikian, tidak memberi peluang pada suatu analisis yang kompleks mengenai operasi kekuasaan, dan tentu saja tidak mampu menggambarkan upaya resistensi yang terjadi diseputar episentrum kekuasaan.

Berbeda dengan Mulder, penelitian ini menggunakan cara pandang atas kekuasaan yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Kuasa dalam pandangan Foucault adalah sesuatu yang cair dan tidak terkonsentrasi dalam lembaga-lembaga sosial. Karenanya, analisis tidak berpusat pada negara, melaikan justru berpendar dalam berbagai diskursus, bahkan dimulai dari terbentuknya gagasan mengenai negara. Beban epistemologi Foucauldian dalam penelitian ini, mengharuskannya menunjukkan relasi kuasa/pengetahuan yang berkembang dalam membangun gagasan mengenai buku sejarah untuk sekolah dan sekaligus resistenis atasnya.

2.1.3 Terorisme Negara dan Politik Identitas di Indonesia

Kajian lain yang patut mendapat perhatian dalam kaitan dengan penelitian ini adalah karangan Ariel Heryanto, mengenai politik identitas yang praktekkan negara Orde Baru dan residunya hingga sekarang. Fokus studi Ariel adalah peristiwa

1965, yang dikatakannya jadi basis pengolahan ideologi Orde Baru. “Otoritarianisme Orde Baru di Indonesia tidak akan muncul atau bertahan dengan baik tanpa daya magis hantu bernama “ancaman komunis”(Heryanto, 2007;158)

Dengan memelihara ancaman ketakutan akan komunisme, Orde Baru melakukan melanggengkan kekuasaannya. Tentu saja dengan sebelumnya melakukan demonisasi terhadap komunisme dengan berbagai cara. Melalui pendidikan sejarah, Film (G30S PKI), juga dengan membuat museum dan monumen. Berbagai artefak budaya ini dikelola sebagai tanda dari kekejaman komunis. Pada kelanjutannya, makna komunisme menurut Ariel, pasca tragedi 1965, semakin meluas. Mereka yang bertentangan dengan rezim akan dituduh sebagai komunis, dan karenanya layak untuk mendapat hukuman, meskipun pada prakteknya mereka adalah rakyat yang menuntut hak.

Tiga puluh dua tahun dibawah rezim Orde Baru, telah membuat masyarakat Indonesia tidak lagi bisa memisahkan kenyataan dan fiksi yang dibangun rezim. Setelah runtuhnya orde baru, komunisme tetap menjadi hantu yang menakutkan, itulah mengapa sensor terhadap ideologi ini tidak pernah berhenti. Ariel menunjukkan berbagai data yang memperlihatkan trauma yang masih membekas dalam masyarakat Indonesia. Mulai dari seorang anak SMP yang ditangkap polisi karena memakai emblem palu arit di celana, sampai dengan seorang petani yang juga mesti merasakan penjara karna logo palu arit yang terpampang di salah satu tembok bagian luar rumahnya. Pelbagai hal ini menurut Ariel adalah akibat trauma sejarah berkat rekayasa politik Orde Baru.

Persilangan penelitian ini dan studi Ariel Heryanto adalah pada persoalan identitas, bagaimana peran produk budaya menjadi prasasti yang menentukan siapa kita. kendati demikian, pendekatan yang digunakan berbeda. Bila Ariel asyik dengan permainan tanda dalam analisis semiotik, penelitian ini mendekati persoalan identitas melalui analisis wacana dengan titik tekan pada konsep kuasa/pengetahuan.

Implikasi pada analisis empiris yang dilakukan pun pada akhirnya berbeda, Ariel mengambil berbagai teks budayan keseharaian, seperti artikel koran dan gambar-

gambar di tepi jalan. Sementara penelitian ini, konsekuensi dari pilihan analisis kuasa/pengetahuan, menggunakan narasi pelajaran sejarah sebagai medium tempat kuasa beroperasi. Lebih dari itu, penelitian ini tidak bermaksud melakukan analisis identitas dengan strategi pemaknaan ala Semiotik, penelitian ini berangkat dari pemahaman yang sama sekali lain soal identitas, yang dibangun dengan konsepsi pasca strukturalis, dimana identitas dipandangan sebagai sesuatu yang menyejarah sifatnya, sehingga hanya bisa dikenali melalui gugus diskursif dan operasi kuasa dalam gerak sejarah.

2.2 Identitas Dalam Kajian Budaya

Identitas merupakan isu penting dalam kajian-kajian komunikasi dan kebudayaan, terutama semenjak munculnya berbagai paradigma dan mazhab juga studi-studi baru yang berkembang seperti feminisme dan studi etnis yang terdapat di lingkup *cultural study*. Identitas (*identity*) sendiri dalam kamus Oxford dikatakan berasal dari bahasa Latin yaitu “*idem*” atau sama dan dua makna dasar yaitu, pertama konsep tentang kesamaan absolut dan yang kedua adalah konsep pembeda atau perbedaan yang menganggap adanya konsistensi dan kontinuitas (Jenkins, 1996; 3).

Berbicara identitas tidak dapat dilepaskan dari Subjektivitas, karena identitas adalah sekumpulan cerita mengenai Subjek. Seperti halnya setiap manusia yang dilahirkan ke dunia, ia akan mendapatkan cerita mengenai kulitnya yang putih atau hitam, mengenai etnisitas, sex dan gender serta banyak hal lainnya yang menyangkut budaya tempat ia dilahirkan. Pada pengertian ini, subjek adalah keberadaan manusia dan segala apa yang dialaminya sebagai manusia. Sedangkan identitas adalah apa-apa saja yang diharapkan orang lain terhadap manusia tersebut.

Sebagai sebuah produk budaya, identitas dan subjektivitas tidak pernah bersifat tetap atau pasti. Oleh karenanya, ia tidak mungkin ada diluar representasi budaya itu sendiri. Seperti pada umumnya dalam setiap budaya, identitas dapat kita kenali melalui selera, keyakinan, status sosial, dan gaya hidup. Dengan kata lain, identitas adalah “soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan

beberapa orang dan apa yang membedakanmu dengan orang-orang lainnya” (Weeks dalam Barker, 2005: 221).

Masalah yang dihadapi manusia dewasa ini adalah budaya telah membawa manusia pada gerak yang semakin cepat, dalam bahasa Giddens “tunggang langang”. Industrialisasi membawa manusia pada pembagian kerja yang kian subtil, akulturasi budaya mendatangkan persoalan ras dan etnisitas, dunia dibagi kedalam garis-garis batas nasionalisme yang kian mengancam kemanusiaan (perang dan konflik berdarah). Dalam kondisi demikian bagaimanakah kita dapat mengenali diri kita? Atau bagaimana kita mendefinisikan identitas kita?

Persoalan ini telah lama menjadi perdebatan dalam Filsafat. Wujudnya adalah konflik dua pemikiran tentang identitas, yaitu esensialisme dan anti esensialisme. Esensialisme meyakini manusia dapat memiliki identitas yang utuh, universal dan kekal. Dalam pandangan ini tidaklah mustahil bagi manusia untuk menemukan jati dirinya atau “esensi” diri yang kita sebut dengan identitas. Dalam persilangan identitas manusia sebagai guru, etnis jawa, dan perempuan, kita dapat menemukan identitas yang mendasar, yang paling esensial dari semua kategori identitas tersebut.

Tentu saja pandangan ini mendapatkan tantangan dari seterunya (anti esensialisme), yang menganggap identitas sepenuhnya bersifat kultural. Dalam pandangan ini, ruang dan waktu memainkan peranan yang penting dalam membentuk identitas manusia. Artinya tidak ada yang sifatnya esensial dan universal, identitas merupakan bentukan bahasa, yang itu berarti ia terus bergerak dalam wacana sejarah. Identitas bersifat lentur dan flexibel, sangat bergantung pada waktu, tempat, dan bahkan penggunaannya.

Foucault adalah salah satu pemikir yang tergolong kedalam tradisi ini. Subjek, menurut Foucault adalah produk dari wacana. Sebagaimana wacan hanya dapat dilihat geraknya dalam sejarah, maka subjektivitas atau identitas sebuah bangsa terus bergeser dalam gerak waktu. Bagi Foucault, identitas yang utuh tidak lain adalah ilusi, seperti yang selalu dikatakan tugas genealoginya yaitu selalu setia membongkar identitas.

Pada konteks identitas nasional, yang dalam hal ini identitas kolektif, pandangan Benedict Anderson mengenai bangsa sebagai komunitas yang dibayangkan senada dengan apa yang di katakan Foucault. Anderson melihat nasionalisme sebagai sebuah ideologi, pertama-tama dilahirkan oleh adanya mesin cetak. Lahirnya mesin cetak, memungkinkan terjadinya kodifikasi bahasa dan yang terpenting adalah penyebaran gagasan untuk mencapai banyak orang. “keseragaman melalui percetakan menegaskan kecenderungan untuk memperkuat kesatuan komunitas bahasa” (Moriyama, 2005: 106). Berangkat dari asumsi tersebut, penelitian ini akan mendasarkan pengertiannya mengenai identitas nasional dari apa yang diyakini Benedict Anderson.

2.3 Nasionalisme dan Post-Nasionalisme Dalam Kajian Pos Kolonial

Perbincangan seputar isunasionalisme dalam kajian poskolonial merupakan tema yang tidak habis dibahas. Semenjak studi poskolonialisme diperkenalkan sebagai upaya menjawab kegelisahan intelektual dunia ketiga untuk memeriksa budaya nasional dan memisahkannya dengan apa yang menjadi warisan kolonialisme, menurut Ania Loomba, nasionalisme terus hidup dalam teks yang mempersoalkan budaya poskolonial, seperti terlihat dalam karya Edward Said, Homi Bhaba, dan banyak pemikir Asia dan Afrika lainnya.

Kegelisahan itu adalah seperti yang diatakan oleh Hasan Hanafi sebagai upaya mengembalikan Barat kebatas-batas alamiahnya. Karena apa yang dimaksud dengan “Barat” sebagai kebudayaan, kini tidak hanya ada dalam batas geografi yang selama ini kita pahami sebagai Eropa. Kolonialisasi selama berabad-abad telah membawanya memenuhi ruang geografis dan terutama psikis dan kultural, di Negara-negara dunia ketiga yang mengalami kolonialisasi. Seperti ditulis Nandy :

Kolonilisme menjajah pikiran sebagai pelengkap penjajahan tubuh dan ia melepas kuasa-kekuasaan dalam masyarakat terjajah untuk mengubah pelbagai prioritas kultural mereka untuk sekali dan selamanya. Dalam proses tersebut, ia membantu menggeneralisasi konsep tentang barat modern dari sebuah entitas geografis dan temporal ke sebuah kategori psikologis. Barat saat ini ada dimana-mana, di Barat dan di luar Barat, dalam pelbagai struktur dan dalam seluruh pikiran (Nandy,1998: xi)

Franz Fanon dan Mahatma Gandhi, dalam pandangan Gyan Prakash, adalah dua orang yang paling berjasa dalam membuka jalan pada berkembangnya suatu pola pikir yang memproblematisasi residu kolonialisme dan membuat upaya pemulihan poskolonial. Meski berbicara dengan bahasa yang berbeda, keduanya menyiratkan tujuan sama. Dalam bahasa Leila Gandhi, tujuan itu adalah “pemulihan budak” dari gemerlap superfisial peradaban Barat Modern. meski sporadis keduanya telah membuka celah pada perlawanan kultural atas hegemoni Barat. Gandhi dengan politik swadeshinya mengajak rakyat India untuk mulai menawar kembali relasinya dengan bangsa kulit putih (Inggris), dan mengajarkan bahwa rantai penjajahan tidak hanya bersifat politis tapi juga kultural.

Ide yang sama namun dengan modus gerakan yang berbeda dilakukan Fanon di Algeria. Bila Gandhi dengan swadeshinya menolak kekerasan, maka Fanon Percaya upaya kekerasan perlu dilakukan demi kebebasan, dan disaat yang bersamaan menyerukan “Marilah kita berusaha menciptakan manusia seutuhnya, manusia yang sudah tidak mampu diciptakan oleh Eropa” (Fanon, dalam Gandhi, 2001: 28). Prakash Percaya, poskolonialisme sebelum teori adalah gerakan dan peristiwa yang diupayakan oleh Fanon dan Gandhi, karenanya kedua tokoh ini dinilai penting dalam kelahiran gagasan Poskolonial dikemudian hari.

Benih Poskolonialisme yang telah ditebar Gandhi dan Fanon, sejauh dapat ditelusuri, pertama-tama dituai oleh pemikir Arab asal Palestina. Adalah Edward Said, yang melontarkan keberatan secara sistematis atas hegemoni kultural Barat yang mengsubordinasi bangsa Arab Islam. Bukunya yang berjudul “Orientalisme” diakui kalangan intelektual poskolonial kemudian, sebagai tonggak berdirinya ranah kajian dan perspektif poskolonial. “Orientalisme” Said berhasil menunjukkan bahwa proyek pengetahuan dan kebudayaan Barat yang berlangsung didunia terjajah, bukan sesuatu yang bebas nilai. Meminjam konsep Michel Foucault mengenai Kuasa/Pengetahuan, Said menggambarkan bahwa gagasan mengenai “ketimuran” dan “Islam” yang dihasilkan oleh ilmuan Barat, tidak lain adalah bentuk-bentuk prasangka yang didasarkan “nafsu” penguasaan.

“Bukan tanpa sebab bahwa Islam telah melambungkan teror, pemusnahan, dan gerombolan orang-orang barbar yang kesetanan dan patut dibenci. Bagi orang Eropa Islam adalah Trauma abadi. Sampai

Akhir abad ke tujuh belas “ancaman Turki (otoman)” terus mengintai Eropa dan merupakan bahaya lestari bagi seluruh peradaban Kristen, dan dalam perjalanan waktu, peradaban Eropa menyerap bahaya tersebut dan tradisinya, peristiwa-peristiwa besarnya, tokoh-tokohnya, kebaikan dan keburuannya sebagai sesuatu yang dijalankan ke dalam jaringan kehidupan”(Said, 2001: 77)

Fokus studi Said memang suatu lingkup disiplin di Barat yang mempelajari Timur (orientalisme) dan dituduhnya sebagai legitimasi bagi kolonialisasi di dunia Timur. Dalam upayanya menolak “Timur” yang dihasilkan sarjana Barat, Said juga sekaligus, sedang membayangkan Timur yang berbeda dengan Barat, Timur yang asali pada dirinya sendiri, dengan kata lain Arab Islam yang murni. Pandangan inilah yang kemudian hari menjadi titik tolak kritik intelektual poskolonial setelahnya, meski berhutang budi terhadap upaya Said yang membuka jalan pada suatu ranah studi yang menggairahkan dan penting bagi perkembangan studi dunia ketiga, tidak menghentikan mereka untuk meneriakan keterjebakan Said pada upaya meneguhkan identitas Timur yang esensial.

Gayatri Spivak, menganggap Said telah jatuh pada apa yang justru ingin ditolaknya dari tradisi Barat, yaitu esensialisme budaya. Alih-alih melihat Timur sebagai yang dinamis, Said justru “mengawetkannya” dalam gagasan yang esensial. Keterjebakan tersebut dimata Spivak, diawali oleh kegagalan Said dalam mengoperasikan berbagai metode analisis budaya yang digunakannya. Terutama dalam mensintesakan konsep hegemoni Gramscian dengan kuasa/pengerahuan yang dikembangkan Foucault.

...Said fails convincingly to synthesize or harmonize these various method of cultural analysis, each with its own distinct epistemology, social values and political assumption, leading to what Clifford describe in the predicament of culture (1998) as a persistent hermeneutical short-circuit of the very centre of his thesis (Spivak, dalam Gilbert, 1997: 41).

Di luar itu menurut Spivak, Said juga dinilai gagal menunjukkan efe-efek kolonialisasi dari negara-negara kolonial yang berbeda. Barat dalam bayangan Said adalah barat yang utuh dan total, ia tidak melihat atau setidaknya tidak berhasil menunjukkan perbedaan dampak dari kolonialisasi yang dilakukan Inggris, Perancis, dan Italy, yang dalam “orientalisme” menjadi fokus studinya.

Said terjebak dalam logika oposisi biner, sehingga gagal menunjukkan keunikan dan kekhasan dari proses kolonialisasi ataupun dampak yang dihasilkannya.

2.3.1 Nasionalisme

Persis dalam tensi seperti di ataslah, kajian poskolonial memasuki perdebatan mengenai dampak kolonialisasi terhadap terbentuknya Negara Bangsa di negara-negara bekas jajahan. Dua kutub yang bersebrangan antara pandangan mengenai identitas yang esensial dan kultural bertemu dalam perdebatan mengenai lahirnya nasionalisme. Ernest Renan, tentu saja adalah tokoh yang mewakili pandangan pertama. Renan, termasuk salah satu tokoh pemula yang memulai kajian mengenai Nasionalisme, meski kajiannya terbatas pada masyarakat Eropa, pandangan Renan cukup berpengaruh dalam pemahaman nasionalisme di negeri-negeri pasca kolonial. Hal ini misalnya terekam dalam teks Soekarno dalam tulisannya yang berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme” pada tahun 1926 :

“Ernest Renan (1882) telah mengemukakan pendapatnya tentang bangsa. bangsa itu adalah suatu nyawa, suatu asas, dan akal yang terjadi dari dua hal, yaitu:

1. Rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjalani suatu riwayat, dan
2. Rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan dan keinginan untuk hidup menjadi satu.” (Kansil, 2005: 5).

Biasa pemikiran Renan yang “menyelundupkan” semangat pencerahan yang diinspirasi oleh filsafat Descartes, menurut Gandhi justru merupakan legitimasi bagi tindak kolonialisme Eropa. Gagasan subjek-objek dalam pandangan Cartesian, melahirkan ide tentang manusia sebagai makhluk yang berpikir (*res cogito*) dan alam sebagai yang dipikirkan (*res ekstensa*), beradaptasi ketika masyarakat Eropa bertemu dengan kebudayaan diluar batas-batas kulturalnya. Dari pengertian *res cogito* sebagai manusia berpikir, menjadi manusia Eropa yang berpikir dan *res ekstensa* dari objek yang dipikirkan menjadi, dunia timur dan keseluruhan peradabannya yang dipikirkan. Eropa berpikir dan Timur dipikirkan. Itulah mengapa selama berabad-abad manusia Eropa percaya kolonialisasi adalah misi pengadaban bangsa-bangsa Timur yang “biadab”.

Fakta ini rupanya tidak disadari oleh seorang nasionalis seperti Soekarno sekalipun. Bahkan semangat bangsa sebagai “jiwa” atau “ruh” adalah apa yang terus menerus didengungkan sampai sekarang oleh buku sejarah dan pendidikan Kewarganegaraan. Itulah mengapa dalam kajian poskolonial, nasionalisme tidak selalu merepresentasikan perlawanan anti kolonial, pada tahap tertentu nasionalisme juga mengoperasikan gagasan yang disadari atau tidak, suka rela atau terpaksa yang melegalkan kuasa/pengatahuan modern yang justru ingin dilawannya.

Romantisme dalam gagasan Renan menurut Benedict Anderson adalah produk pencerahan yang didalamnya membawa semangat subjek pencerahan. Dalam pandangan Renan bangsa adalah sekumpulan orang yang senasib, sama-sama dijajah misalnya, dan mempunyai perasaan untuk bersatu, karena memiliki asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta mempunyai pemerintahan sendiri.. Pada persoalan ini Hall berkomentar:

Alih-alih melihat kebudayaan nasional sebagai hal yang tunggal, kita harus membayangkannya sebagai perangkat wacana yang merepresentasikan perbedaan sebagai satu kesatuan atau identitas. budaya nasional itu terpecah belah oleh perpecahan internal yang mendalam, dan hanya “dipersatukan” melalui penerapan berbagai bentuk kuasa kultural (Hall, dalam Barker, 2005: 261)

Anderson dan Hall bersepakat dalam satu hal mengenai identitas kebangsaan yaitu bahasa. Bukan persoalan apakah bangsa lahir dari kesamaan adat istiadat, agama, sejarah dll. Yang terpenting adalah bagaimana narasi kesamaan ini terus dikelola agar tetap ada dikepala subjek kebangsaan. Kesatuan itu tercipta melalui narasi tentang bangsa; dengannya cerita, simbol, citra, simbol, dan ritual merepresentasikan makna “bersama” kebangsaan (Bhabha, 1990).

Salah satu usaha untuk menciptakan narasi kebangsaan adalah dengan pendidikan, terutama pendidikan sejarah. Lewat buku pendidikan sejarah manusia Indonesia dari sabang sampai Merauke di ingatkan bahwasannya mereka merupakan saudara sebangsa, yang diikat oleh hukum yang sama dan tentunya bahasa dan latar belakang sejarah yang sama. Disini kita melihat peran besar media dan bahasa dalam membangun semangat kebangsaan. pandangan ini membawa kita suatu

studi yang sampai saat ini mungkin paling berpengaruh dalam diskursus nasionalisme yang terjadi di Negara-Negara bekas jajahan.

Ia terbayang karena para anggota dari bangsa terkecil sekalipun tidak akan pernah mengenal sebagian besar anggotanya, bertemu, atau mendengar tentang mereka, tetapi dalam benak setiap orang hiduplah bayang-bayang tentang kebersamaan mereka...bangsa dibayang kan sebagai sesuatu yang terbatas sebab bangsa yang terbesar sekalipun, mencakup kira-kira semilyar manusia, memiliki batas-batas tertentu, sekalipun lentur, dan diluarnya ada bangsa yang lain...ia dibayangkan sebagai sesuatu yang berdaulat karena konsep ini lahir di masa ketika pencerahan dan revolusi menghancurkan keabsahan dunia kerajaan yang diatur secara ilahiah dan hierarkies...terakhir, ia dibayangkan sebagai sesuatu komunitas sebab, tak peduli ketimpangan dan pemerasan yang terjadi diantara mereka, bangsa selalu dipikirkan sebagai persaudaraan yang mendalam dan horizontal. Pada akhirnya, persaudaraan inilah yang memungkinkan, selama lebih dari dua abad, berjuta-juta orang, tidak hanya membunuh tetapi rela terbunuh demi bayangan yang terbatas ini (Anderson, 1983: 15).

Definisi Anderson diatas memberi pemahaman akan perbedaan Negara-Bangsa sebagai batas administratif, yang memiliki kedaultan atas ruang atau wilayah tertentu dan pengertian bangsa sendiri sebagai sesuatu yang imajinatif. Jadi, bangsa bukanlah sekedar formasi politik, melainkan juga sistem representasi kultural tempat identitas nasional terus-menerus di reproduksi sebagai tindak diskursif.

Imagined community, buku yang didalamnya Anderson menjelaskan teori mengenali lahirnya gagasan nasionalisme, memberi contoh kelahiran nasionalisme dengan kasus Jerman. Dalam uraiannya nasionalisme Jerman, menurut Anderson diawali oleh Marthin Luther, ketika dalam usahanya menentang gereja vatican yang menjual surat pengampunan dosa, ia menerjemahkan injil kedalam bahasa Jerman. Itulah kali pertamanya kesadaran nasional Jerman muncul lewat bahasa, akan tetapi itupun dimungkinkan oleh penemuan mesin cetak pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga injil terjemamahan Marthin Luther dapat disebarkan secara luas.

Kapitalisme cetak menurut Anderson, bertanggungjawab atas tumbuh suburnya bahasa lokal di Eropa, yang tadinya ditindas rezim bahasa latin. Melalui penerbitan-penerbitan massal yang berbasikan bahasa lokal (seperti kasus

Jerman), maka gagasan mengenai kesamaan kultural mulai diproduksi, dan dikelola. Kelemahan dari pandangan Anderson adalah ia tidak menjelaskan ataupun memberikan contoh yang kongkrit mengenai bagaimana proses nasionalisme dalam kaitannya dengan pertumbuhan kapitalisme cetak di negara-negara koloni Eropa. Menyangkut hal ini, studi yang dilakukan Mikihiro Moriyama mengenai kapitalisme cetak dan kesustraan Sunda Abad Ke 19, yang dilakukan juga dengan Kerangka pandang Andersonian, dapat memberikan jawaban yang dibutuhkan dari pertanyaan yang ditinggalkan Benedict Anderson.

Di pulau Jawa, di mana logika kekuasaan berbasis penghambaan menjadi kebenaran. Status perkataan lisan ditempatkan di atas tulisan. Inilah mengapa para mpu yang menulis kitab, melakukan pertapaan sebelum menulis, dengan ritual tertentu status tulisan yang rendah itu baru dapat disejajarkan dengan perkataan lisan. Akibatnya dokumentasi tertulis sangat minim kita temui di Jawa. Kalaupun ada biasanya tidak semua orang bisa memilikinya, hanya orang sakti, seperti raja atau bangsawanlah yang bisa.

Datangnya buku merubah praktek ini, berbeda dengan kitab atau manuskrip yang ditulis tangan, buku dicetak, hingga buku dapat diproduksi dalam jumlah masal. Setiap orang dapat memiliki buku, dan ini berarti pengetahuan bukan hanya milik orang-orang tertentu saja. Lewat buku, penduduk bumiputra belajar mengenai individualitas. Metode pengajaran dengan sorogan, di mana guru melafalkan dan murid mengulangi, di ganti dengan membaca dalam hati melalui buku.

Kata-kata lisan yang tadinya dipandang memilki status lebih tinggi dari tulisan, dengannya berubah sejak adanya buku. Kebenaran kini tidak lagi secara eksklusif dimiliki mereka yang ditakdirkan sebagai gusti (dalam hubungan kawula-gusti). Kebenaran kini didasarkan pada teks, sumber tertulis.

Mikihiro Moriyama, bahkan mengatakan pandangan masyarakat bumiputra akan homogenitasnya dipelajari melalui buku. Sebab, buku bagaimanapun menuntut pembakuan bahasa dan aksara. Bahasa Melayu yang telah dibakukan, digunakan Belanda menuliskan buku-buku yang diperuntukkan bagi pendidikan masyarakat Bumiputra. Sedang untuk aksara digunakan aksara latin yang lebih ramping dan

efisien ketimbang arab pegon, yang sebelumnya banyak digunakan di tanah air. Dari sinilah pandangan akan kesamaan nasib dari berbagai kelompok masyarakat yang tersebar di seluruh Nusantara direfleksikan melalui bahasa, hingga lahirnya semangat kebangsaan menjadi mungkin.

Dengannya nasionalisme dalam pandangan Anderson, merupakan buah karya kolonial yang dihasilkan dari menyebarnya gagasan modernitas, yang dimungkinkan oleh mesin cetak, bahasa, dan pendidikan modern. Kendati berhasil menghindari esensialisme dalam gagasannya, Anderson tetap saja tidak mampu melihat nasionalisme dunia ketiga, lebih dari sebuah bentuk peniruan dari Barat. Tepat distulah, keberatan atas gagasan Anderson merebak dikalangan mereka yang mengambil energi kritiknya dari pandangan pascastrukturalis seperti Foucault, dan mengembangkan apa yang kemudian disebut sebagai Pos-Nasionalisme.

2.3.2 Post Nasionalisme : Kritik kolonial Dalam Pendekatan Pasca Strukturalis

Keberatan utama terhadap nasionalisme yang dikatakan Anderson sebagai “nilai legal yang paling universal dalam kehidupan zaman kita” (Anderson, 1991: 3), adalah pada gagasannya soal universalitas nasionalisme. Dalam penjelasannya, nasionalisme dimana-mana terjadi dengan model seperti yang dijelaskannya *Imagined Community*. Ia percaya pengalaman Amerika dan Eropa dijadikan cetak biru bagi negara baru didunia pasca kolonial.

Dinegara koloni, intelengensi pribumi memainkan peran penting dalam melahirkan negara bangsa modern, karena dalam pandangan Anderson mereka memiliki akses ke”budaya modern Barat dalam pengertian yang luas, dan terutama akses ke modal-modal nasionalisme, kebangsaan, dan negara-negara yang dihasilkan ditempat-tempat lain dalam abad ke sembilan belas” (Anderson, 1991: 116).

Dengan perkataan lain, nasionalisme anti kolonial itu sendiri dimungkinkan dan dibentuk oleh sejarah politis dan intelektual Eropa. Ia merupakan ‘wacana turunan’, suatu model pemberontakan canibalistik

yang tergantung pada hadiah bahasa/gagasan dari penjajah (Loomba,2003: 244).

Sementara Anderson bersikukuh bahwa nasionalisme merupakan konsekuensi logis dari perjumpaan kolonialisasi dan kapitalisasi Eropa dengan masyarakat pribumi, Phatra Catterjee mencoba meninggalkan logika yang melumpuhkan semacam itu. Ia mulai memikirkan kemungkinan lain diluar dari apa yang dikonsepsikan Anderson, dan mencoba melihat hubungan bangsa kolonial dengan koloninya sebagai perjumpaan yang kreatif, dan melahirkan pertukaran ideologis dan politis. Karena baginya jika tesis Anderson benar maka apa yang tersisa bagi subjek poscolonial?

Jika nasionalisme di dunia selebihnya harus memilih komunitas bayangan mereka dari bentuk-bentuk “modular” tertentu yang sudah disediakan untuk mereka oleh Eropa dan Amerika, apalagi yang harus mereka bayangkan? Sejarah tampaknya telah menetapkan bahwa kami di dunia pasca kolonial hanya akan menjadi konsumen abadi modernitas. Eropa dan Amerika, satu-satunya subjek sejati sejarah, telah menyelesaikan bagi kami bukan saja skenario pencerahan dan eksploitasi kolonial, tetapi juga strategi perlawanan anti kolonial kami dan kesengsaraan anti kolonial kami, bahkan imajinasi-imajinasi kami harus tetap dijajah selamanya (Chaterjee, dalam Loomba, 2003: 245)..

Kritik Chatterjee yang fundamental ke jantung gagasan Anderson, tidak serta merta membuatnya meninggalkan keseluruhan gagasan Anderson. Ia mengakui bahwa peran kapitalisme cetak memang tidak bisa dipungkiri dalam pembentukan nasionalisme, hanya saja Chatterjee, menarik perbedaan antara nasionalisme sebagai gerakan politis dan nasionalisme sebagai proses alamiah dari dialektika yang berasal dari wilayah otonomi rakyat jajahan. Dalam studinya terhadap kolonialisme di Bengali, ia menemukan bahwa secara material (pengetahuan modern), masyarakat India memang terjajah oleh gagasan Eropa, namun dalam wilayah spiritual, nasionalisme Hindu menjadi daya dorong terhadap model nasionalisme dan negara bangsa yang kemudian berkembang di India.

Chatterjee melihat bahwa jauh sebelum upaya perjuangan merebut kemerdekaan secara politis, nasionalisme-nasionalisme anti kolonial mencoba menciptakan apa yang disebutnya sebagai “domain kedaulatannya sendiri di dalam masyarakat kolonial”. Ini dilakukan dengan cara memahami dunia sebagai dua lingkungan

berbeda, pertama lingkungan material yang mencakup ekonomi, tatanegara, sains dan teknologi, dan kedua domain dalam dunia yang spiritual (agama, adat, dan keluarga). Keunggulan Barat diakui sejauh itu dalam ranah Material, namun dalam ranah spiritual, kebudayaan nasional dipertahankan.

Argumentasi tersebut merupakan upaya membangun pendasaran atas penolakan Chatterjee terhadap klaim Anderson yang menganggap nasionalisme dunia ketiga semata-mata merupakan turunan dari Eropa. Gagasan Chatterjee mengenai domain spiritual sebagai wilayah kreatif pembayangan nasionalisme terjajah, mengingatkan pada studi Niles Mulders mengenai peran ideologi “kebatinan Jawa” dalam nasionalisme Indonesia semasa Orde Baru. Meski sejarah ‘resmi’ tidak melihat proses ini, namun faktanya studi Mulder menunjukkan hal tersebut.

Jika dalam model nasionalisme Andersonian, ideologi kebatinan Jawa sebagai bukti dari ‘prematurnya’ nasionalisme Indonesia, yang gagal menerapkan birokrasi modern gaya Eropa, maka Chatterjee justru melihatnya sebagai daya kreatif dari pembayangan nasionalisme yang bukan Barat. Meski demikian, bukan berarti pandangan Chatterjee jatuh pada oposisi biner seperti yang dialami Said, dengan berupaya menemukan Timur yang otentik. Ia berangkat lebih jauh dari itu, dengan meminjam energinya dari pemikir pasca strukturalisme, terutama Foucault, baginya Subjek manusia jajahan adalah fragmen yang retak, dan menyebarkan.

Jelas sudah pernyataan Anderson yang menilai nasionalisme adalah sebagai model politik paling absah untuk abad 20, tidak terhindar dari bias Hegelian, yang memandang Sejarah sebagai gerak lurus. Dunia berkembang dengan cara menyempurnakan diri dalam gerak sejarah. Justru inilah yang ditolak oleh Chatterjee, baginya seperti halnya bagi Foucault, sejarah bersifat diskontinu. Menurut Foucault tiap periode mempunyai episteme, pandangan dunia (*worldview*) atau struktur konseptual yang berbeda. Episteme (*the way of thinking*) tidaklah dipengaruhi oleh individual, akan tetapi bergantung pada struktur wacana yang dominan. Aturan diskursif ini kemudian menentukan cara atau praktik perlakuan individu terhadap wacana tersebut (Littlejohn. 2005; 330).

Pada akhirnya, ajakan Chatterjee adalah juga ajakan Gandhi dan Fanon yaitu ‘untuk memperoleh otonomi kreatif dari Eropa’. Dalam bahasa Fanon “Marilah kita ciptakan manusia seutuhnya, manusia yang sudah tidak mampu diciptakan Eropa” (Fanon, dalam Gandhi, 2001:28). Penekanan pada kreatifitas dan bukannya otentisitas inilah yang menghindari mereka untuk jatuh pada nostalgia masa lalu ‘pra kolonial’. Dan memberi kemungkinan pada penemuan yang khas dari perjumpaan Eropa kolonial dengan koloninya, satu hal yang tidak disediakan oleh kerangka nasionalisme Andersonian. Etikanya adalah untuk selalu curiga pada apa yang dikatakan “Barat” atau “Timur”, dan pada yang “nasional” ataupun “kolonial” dan setia pada upaya dekonstruksi.

Atas kesadaran itu pula lah, nasionalisme yang dikatakan anti kolonial tersebut juga mesti diperiksa kembali. Gejala “kehendak untuk berkuasa” dari kelompok nasionalisme, yang kerap kali berupa pemikiran totalitas akan kesatuan, telah juga ikut menindas rakyat pasca kolonial. Hal ini telah ditandai oleh Gandhi dalam prosanya; “bahwa kita menginginkan kekuasaan Inggris tanpa orang Inggris. Kamu menginginkan sifat harimau tapi bukan harimau itu sendiri” (Gandhi, dalam Gandhi, 2001: 29).

Nasionalisme yang dikatakan gerakan anti kolonial itu, bukan hanya dibangun diatas kesamaan dan persaudaraan seperti imaji Bennerdict Anderson. Sejarah telah lama mengajarkan bahwa kesatuan Indonesia juga dibangun diatas eklusi dan penyingkiran kelompok-kelompok etnisitas, agama, dan politik. Sejarah yang sama juga mengajarkan bahwa nasionalisme Indonesia, dibangun diatas darah dari mereka yang dibilang pemberontak di Aceh, Papua, Madiun 1948, dan Bali 1965. Dalam kerangka nasionalisme Andersonian, peristiwa semacam itu akan dihitung diluar konteks nasionalisme, lebih tepat masuk dalam kategori separatisme. Nasionalisme menjadi ideologi yang absah justru karena adanya ketakutan akan perpecahan.

Esay “Nasionalisme Melawan Negara”, dari David Lyoad memberi perspektif berbeda menyangkut hal tersebut. Ia melihat separatisme sebagai nasionalisme yang tidak dapat tempat dalam konsensus nasional. Baginya, nasionalisme bukan klaim sepihak negara. Upaya denasionalisasi terhadap mereka yang dikategorikan

pemberontak, merupakan upaya menyingkirkan nasionalisme yang tidak “sah” versi rezim berkuasa. Pada akhirnya, Pandangan Lyod dan pos nasionalisme seperti yang digagasa Chatterjee membuka jalan pada suatu nasionalisme anti konsensus, dan memberi ruang kepada sejarah alternatif untuk ikut tampil dalam diskursus identitas nasional.

“Demikianlah maka bangsa-bangsa adalah komunitas-komunitas yang diciptakan bukan hanya dengan menempa ikatan-ikatan tertentu melainkan dengan memisah atau mengucilkan orang-orang lain: bukan hanya dengan mendungungkan atau mengingatan kembali versi-versi masa lalu tertentu, melainkan dengan memastikan bahwa orang-orang lain itu dilupakan atau ditindas” (Loomba, 2003: 261).

2.4 Kuasa/Pengetahuan

Konsepsi Foucault mengenai kuasa pengetahuan membuka satu tabir yang penting bagi studi poskolonial atau studi budaya pada umumnya. Tabir itu adalah pembedaan yang suci antara politik dan pengetahuan. Politik selama ini dilihat sebagai medan dimana kuasa dan ideologi bekerja, sementara pengetahuan adalah dunia objektif. Dunia dimana manusia menemukan kebenarannya. Dengan membeberkan sejarah panjang peradaban Eropa, Foucault menunjukkan bahwa pengetahuan tidak pernah terlepas dari kehendak untuk mengetahui (kuasa).

Pandangan yang mempertahankan demarkasi yang suci antara pengetahuan dan kekuasaan, menurut Leila Ghandi, berawal dari berkembangnya tradisi humanisme di Barat. Teriak *cogito ergo sum* Descartes, menurut Sartre merupakan awal dari lahirnya ilmu kemanusiaan baru, yang mulai menempatkan manusia dalam pusat epistemologi. Manusia adalah entitas yang berpikir dan alam merupakan objek yang dipikirkan.

Dalam semangat memisahkan dirinya dengan jenis pengetahuan yang dianggap sebagai mitos (termasuk agama) yang membelenggu masyarakat Eropa, wacana pengetahuan (positivisme) membuat demarkasi antara nalar dengan prasangka dan dongeng. Pada titik inilah logika deduksi matematis diangkat setingkat diatas wahyu yang pada era sebelumnya dinilai sebagai kebenaran tertinggi. Kenyataan menjadi kata kunci, semua yang benar adalah yang mampu menemukan

korespondensinya dengan realitas. Hukum kausalitas pun menjadi tidak terhindarkan.

Pergeseran epistemologi tersebut digambarkan oleh Foucault dalam bukunya yang berjudul *The Orders of Things*. Foucault melihat ada retakan sejarah atau yang dalam konsepnya disebut sebagai perubahan *episteme*. Episteme dalam pengertian Foucault adalah suatu wacana yang menjadi kebaruan dalam suatu zaman. Sebelum pencerahan, Eropa dikuasai oleh model kuasa/pengetahuan yang berporos pada agama dan kerajaan. Dalam prakteknya, kebenaran suatu pernyataan diukur dari pernyataan lainnya (sabda raja atau kitab suci). Otoritas kekuasaan semacam inilah yang ditantang oleh ilmu kemanusiaan baru yang dilahirkan di era pencerahan.

Pencerahan adalah Era dimana lahirnya gagasan atau dapat dikatakan ideologi humanisme. Pembalikan paling besar di era ini adalah ketika manusia yang tadinya dianggap tidak berdaya di hadapan Gereja yang merupakan perwakilan Tuhan di dunia, kini menempatkan dirinya sebagai alat ukur pengetahuan atau berada di pusat epistemologi. Manusia dapat menentukan benar dan salah. Lebih jauh lagi, Foucault mengatakan manusia adalah penemuan abad ke 19. Tentu saja dalam pengertian diskursus yang selama ini kita kenal (Hak azasi manusia, nurani, psikologi, dan banyak lainnya). Bahasa, matematika, dan biologi jadi tiga ilmu dasar yang menurut Foucault melahirkan gagasan tentang manusia yang bebas(ketiganya lahir di era pencerahan).

Penelusuran Gandhi terhadap sejarah memperlihatkan relasi yang kuat antara pengetahuan humanis pencerahan dengan negara bangsa. Pencerahan sebagai sebuah upaya kritik terhadap feodalisme rezim monarki yang berkuasa di abad pertengahan, ternyata berlawanan kuat dengan pengetahuan humanis, yang menempatkan manusia dalam pusat epistemologi. Kritik atas feodalisme terutama berkembang dalam ilmu sosial yang menempatkan manusia sebagai subjek yang utuh. Sebagai ganti dari praktek depotisme, humanisme melahirkan negara/bangsa dan demokrasi sebagai order(pengaturan) yang baru dan dinilai lebih tepat bagi hakikat manusia yang bebas .

Di Antara Doktrin-doktrin moral dimana kehidupan manusia dibentuk, doktrin-doktrin yang mengacu pada negara dan pemerintahannya menduduki posisi yang tertinggi. Karena tujuan doktrin-doktrin itu adalah untuk membuat kehidupan bahagia bagi semua orang menjadi mungkin... semakin universal sebuah kesejahteraan seharusnya semakin hebat. (Garin, dalam Gandhi, 2011: 67).

Proyek humanisme ini, menguatkan kecurigaan Foucault mengenai kolusi pengetahuan dan kekuasaan. Dengan kata lain, pengetahuan yang bercorak humanislah yang menarasikan mengenai hakikat manusia yang bebas, telah melahirkan konsep negara dan bangsa. Sebaliknya, negara bangsa pun memproduksi pengetahuan yang menjang keberlangsungannya. “*Dengan kata lain, humanisme selau difungsikan sebagai sebuah ‘ideologi moral estetik’ yang berhubungan dengan , dan diarahkan pada, pembentukan subjek warganya yang ideal (Gandhi, 2001: 66)*”. Senada dengan itu, Hunt & Wickham menulis mengenai relasi kuasa pengetahuan dalam kaitannya dengan negara/bangsa.

Foucault works details the rise of those formal knowledge complex known as the human science and trace many of the ways they have come to inform widely use technique of...(power) in modern world...Foucault indicates anindication taken up strongly by some of his followers (Hacking,1975,1990;rose 1991; Miller and Rose 1990), the importance of statistical knowledge for many modern technique of ...(power). This poin is especially relevant to the government of modern nation state. (Hunt&Wickham, 1994:91).

Sesungguhnya berbagi jenis pengetahuan yang berkembang di era pencerahan ataupun di inspirasi olehnya, menularkan gagasan ini. Dari sini kita melihat relasi kuasa dan pengetahuan yang dikonsepsikan Foucault. Pengetahuan tidak lain adalah bentuk dari kuasa, atau tempat dimana kuasa menemukan bentuknya. Bagi Foucault, hubungan pengetahuan dengan kekuasaan selalu bersitegang, bersilangan, terkadang malah identik. Mengenai hubungan kuasa dan pengetahuan Kendall & Wickham berkomentar :

Power and knowledge are mutually dependent and exist in a relation of interiority of each others, althought Foucault accord power a kind of primacy: power would exist althought only in a virtual formn without knowledge, whrereas knowledge would have nothing to integrate without differential power relations (Kendall and Wickham, 1999: 51)

Relasi kuasa dan pengetahuan yang erat dalam konsepsi Foucault, tidak serta merta menjadikannya identik sehingga menjadi kuasa sama dengan pengetahuan. Kuasa dan pengetahuan adalah dua hal yang berbeda, meski satu dan lainnya saling bergantung. Seperti bakteri yang hanya bisa hidup dalam organisme hidup lainnya (tubuh manusia misalnya). Bakteri dalam hal ini adalah kuasa dan tubuh manusia adalah bentuk pengetahuan. Contoh lain diberikan oleh Hunt & Wickham, kuasa itu seperti halnya angin ataupun listrik, yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan efeknya. Angin meninggalkan dingin dan listrik menghidupkan lampu atau televisi. Dengan kata lain, kita hanya dapat mengenali kuasa lewat bentuk-bentuk pengetahuan yang dimungkinkannya.

Power mobilises non-startified matter and function, it local and unstable, and is flexible. Knowledge is stratified, archived and rigidly segmented. Power is strategic, but is anonymous. The strategies of power are mute and blind, precseely because the avoid the form of knowledge, the sayable and visible. (Kendall & Wickham, 1999 : 51).

Pertanyaan berikutnya, lalu apa pengertian kuasa dalam konsepsi Foucault? Untuk menjawab itu, perlu ada penelusuran terhadap hutang budi Foucault pada Nietzsche. Pada akhirnya, untuk memahami kuasa, tidak ada penjelasan yang lebih baik selain yang disampaikan Nietzsche dalam *Will to Power*. Kuasa dalam pandangan Nietzsche dan pada akhirnya juga Foucault, merupakan sebarang kehendak atau dorongan. Kehendak untuk berkuasa inheren dalam diri manusia semenjak ia lahir. Manifestasi ini terekam dalam jejak bahasa yang ditinggalkannya. Karenanya, selamanya kuasa itu berbentuk virtual persis listrik atau pun angin. Tidak dapat dilihat namun berdampak. Dorongan dan kehendak inilah yang aktif melahirkan pengetahuan ataupun menggunakannya secara selektif demi pemenuhan akan kuasa.

Knowlegde is involved in...attempts to impose more control or management: the economy should be slowed, the economy should be stimulated; the war should be stepped up, the war should be ended...here knowledge is being used to select some technicue of (power) over others and to implement the chosen techniques in attempts to impose control or management on the object concerned...(Hunt and Wickham, 1994: 90).

Kuasa dalam pengertian Foucault memang menentukan namun bukan berarti merepresi dan bersifat negatif sebagaimana yang selama ini dipahami dalam

tradisi marxis. Konsepsi Foucault mengenai kekuasaan selama ini dimaknai sebagai kritik paling tajam terhadap marxisme yang melihat kuasa sebagai kekuatan yang memaksa. Bagi Foucault, kuasa tidaklah bernilai negatif melainkan produktif. Kuasa melahirkan ritus-ritus kebenaran yang baru, dengan kata lain ia menghasilkan. Dalam interviewnya dengan Aleandro Fontana dan Pasquale Pasquiano, Foucault menjelaskan hal ini:

Jika kekuasaan bukan apa-apa selain represi, jika ia tidak melakukan apa-apa selain berkata tidak, apakah anda benar-benar berpikir bahwa ia dapat menuntun orang untuk mematuhi? apa yang membuat kekuasaan terlihat baik, apa yang membuatnya diterima adalah fakta bahwa ia tidak hanya hadir didepan kita sebagai kekuatan yang berkata tidak, namun ia juga melintasi dan memproduksi benda-benda, menginduksi kesenangan, membentuk pengetahuan dan memproduksi wacana. Ia perlu disadari sebagai sebuah jaringan produktif yang bekerja diseluruh lembaga sosial lebih daripada sebuah instansi negatif yang berfungsi represif (Power/knowledge,2002:148)

Konsekuensi dari pandangan mengenai kuasa yang cair dan menyebar, yang tidak terlokalisir dalam institusi-institusi seperti negara dan organisasi sosial, mau tidak mau membawa Foucault mengusung konsep baru mengenai resistensi. Bila kuasa ada dimana-mana dalam level paling mikro sekalipun, maka resistensi bukanlah bentuk dari perlawanan mikro, sebagaimana diandaikan dalam dialektika hegelian. Kuasa itu lebih merupakan jejaring dimana semua orang terlibat dalam upaya menjalankannya. Itulah mengapa dalam diskursus Foucaultian, resistensi dalam kajian kuasa/pengetahuan adalah kuasa itu sendiri. \

In Foucault's word, resistance is 'counter stroke' to power, a metaphor with strong technical, machine-like connotations. Power and resistance are together the governance machine of society, but only in the sense that together they contribute to the truism 'things never quiet work', not in the conspirational sense that resistance serve to make power work perfectly (Hunt and Wickham, 1994: 83).

Dengan sendirinya, studi kuasa/pengetahuan dalam tradisi Foucauldian berupaya mengurai relasi kuasa dan pengetahuan yang bertujuan mengontrol dan memenej subjek. Tentu saja kuasa bukanlah sesuatu yang ajeg dimana ia tidak tergoyahkan, sebaliknya kekuasaan dalam pandangan Foucault adalah formasi yang selalu bergeser bergantung pada wacana di setiap jaman (era atau kurun kebenaran

tertentu). Karena itu analisis sejarah merupakan beban yang harus ditanggung oleh mereka yang hendak melakukan analisis kuasa/pengetahuan.

Pada akhirnya, deklarasi Foucault mengenai hubungan kuasa dan pengetahuan sekaligus mengikrarkan bahwasanya pengetahuan adalah politik. Ilmu-ilmu manusia adalah perwujudan kehendak untuk berkuasa, klaim ilmiah yang selama ini menjadi pembenaran akan sifat pengetahuan yang netral, bagi Foucault adalah strategi kuasa. “Pengetahuan adalah cara bagaimana kekuasaan memaksakan diri kepada subyek tanpa memberi kesan ia datang dari subyek tertentu” (Haryatmoko, 2003: 225). Semenjak deklarasi tersebut, maka tugas mereka yang melakukan penelitian dalam kerangka studi budaya, memiliki beban axiaologi untuk melakukan apa yang dikatakan Hall sebagai tujuan dari studi budaya, yaitu:

...ketika cultural studies mengawali tugasnya...maka kajian tersebut harus menjalankan tugas membuka apa yang dianggap prasangka yang tidak dinyatakan tentang tradisi kaum humanis itu sendiri. studi itu juga harus menerangkan asumsi-asumsi ideologis yang mendukung praktiknya, memaparkan program pendidikan...dan mencoba mengadakan kritik ideologis terhadap cara ilmu kemanusiaan dan seni mempertunjukkan dirinya sendiri sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang tidak ada pamrihnya (Hall, 1990 : 15).

Bab 3

Pandangan Metodologis Analisis Wacana

3.1 Paradigma, Perspektif, dan Metodologi

Paradigma didefinisikan oleh Guba sebagai "...a set of basic belief (or metaphysics) that's deal with ultimates of first principle..a world view that define, for its holder, the nature of the "world"..." (Guba, dalam Denzin dan Lincoln 1994 :107). Dalam pemahaman itu dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang terhadap dunia yang akan mengarahkan penelitian bukan hanya pada pemilihan metode melainkan juga pada pilihan dasar ontologis dan epistemologis sebuah penelitian. (Denzin dan Lincoln, 1994: 107).

Dalam penelitian, sebuah paradigma penelitian menentukan bagi seorang peneliti tentang terkait yang akan dicari. Apa yang dianggap benar untuk sebuah paradigma, maka akan benar pula bagi analisis seorang peneliti dengan paradigma yang spesifik. Seorang peneliti tidak bisa mengharapkan bahwa semua orang yang membaca hasil analisisnya dapat menerima –dalam konteks paradigma hasil analisis dan argumen yang diajukan. Seorang peneliti hanya memiliki harapan dalam bentuk persuasif dan menunjukkan kegunaan posisi yang dijalani oleh seorang peneliti dalam arena kebijakan publik (Guba & Lincoln, 1994).

Paradigma dalam sebuah penelitian merupakan hasil dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang mendasar berkenaan dengan ontologi, epistemologi, dan metodologi sebagai hasil refleksi dari logika kepercayaan yang dimaksud. Beberapa paradigma yang ada pada saat ini dapat dibedakan menurut tiga elemen dasar tersebut. Paradigma dalam ilmu komunikasi dapat di kelompokkan kedalam tiga yakni (1) classical paradigma (yang mencakup positivism dan postpositivism) (2) critical paradigma dan (3) constructivism paradigma (Nurhidayat, 1998: 34). Ketiga pendekatan tersebut dapat dikatakan berbeda secara epistemologis, metodologis, dan aksiologis. Perbandingan diantara beberapa paradigma menurut asumsi filosofinya di jelaskan Denzin dan Lincoln sebagai berikut (Denzin dan Lincoln, 1994 : 109) :

Tabel 3.1 Basic Beliefs (Metaphysics) of Alternative Inquiry Paradigms

Item	Positivism	Post-Positivism	Critical Theory et al.	Constructivism
Ontology	naïve realism –“real” reality but apprehendable	critical realism – “real” reality but only imperfectly and probabilistically apprehendable	historical realism –virtual reality shaped by social, political, cultural, economics, ethnic, and gender values; crystallized over time	relativism– local and specific constructed realities
Epistemology	dualist/ objectivist; findings true	modified dualist/ objectivist; critical tradition/ community; findings probably true	transactional/ subjectivist; value-mediated findings	transactional/ subjectivist; created findings
Methodology	experimental/ manipulative; verification of hypotheses; chiefly quantitative methods	modified experimental/ manipulative; critical multiplism; falsification of hypotheses, may include qualitative methods	dialogic/ dialectical	hermeneutical / dialectical

Sumber : Guba & Lincoln,1994; 109)

Perbandingan antar paradigma di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

- secara ontologis
 1. Posisi positivisme secara ontologis yaitu *naïve* realism mengasumsikan bahwa terdapat realitas obyektif yang eksternal dimana penelitian dapat menemukan kebenaran padanya.
 2. *Critical* realisme milik post positivisme masih mengasumsikan adanya realitas obyektif, akan tetapi adanya kesadaran bahwa realitas tersebut dapat dipahami dalam bentuk yang tidak sempurna dan probabilistik.
 3. *Historical* realism pada teori kritis mempunyai asumsi bahwa pemahaman atas sebuah realitas didasarkan pada struktur yang dipengaruhi oleh sejarah yang jika terlewatkan oleh pengamatan akan menjadi sebuah realitas yang meyakinkan kita bahwa realitas tersebut benar-benar real.
 4. Relativisme pada konstruktivisme mengasumsikan bahwa realitas bersifat multi pemahaman, bahkan sesekali menentang bahwa realitas sosial adalah bentukan dari intelektual manusia. Konstruktivisme tidak dapat dinilai dengan benar atau salah pada posisi absolut akan tetapi ukurannya adalah lebih '*informed or sophisticated*' .
- secara epistemologis
 1. Asumsi dualis dan obyektifis dari positivisme mengizinkan peneliti untuk menentukan “bagaimana sesuatu itu sesungguhnya” dan “bagaimana sesuatu tersebut bekerja”
 2. Dualis/obyektif yang dimodifikasi dari postpositivisme berasumsi bahwa memungkinkan untuk memperkirakan realitas akan tetapi kita tidak pernah benar-benar mengetahuinya.
 3. Teori kritis memiliki transaksional/subyektifis yang mengasumsikan bahwa pengetahuan merupakan hasil penjabatan nilai-nilai semenjak nilai merupakan sesuatu yang terikat.

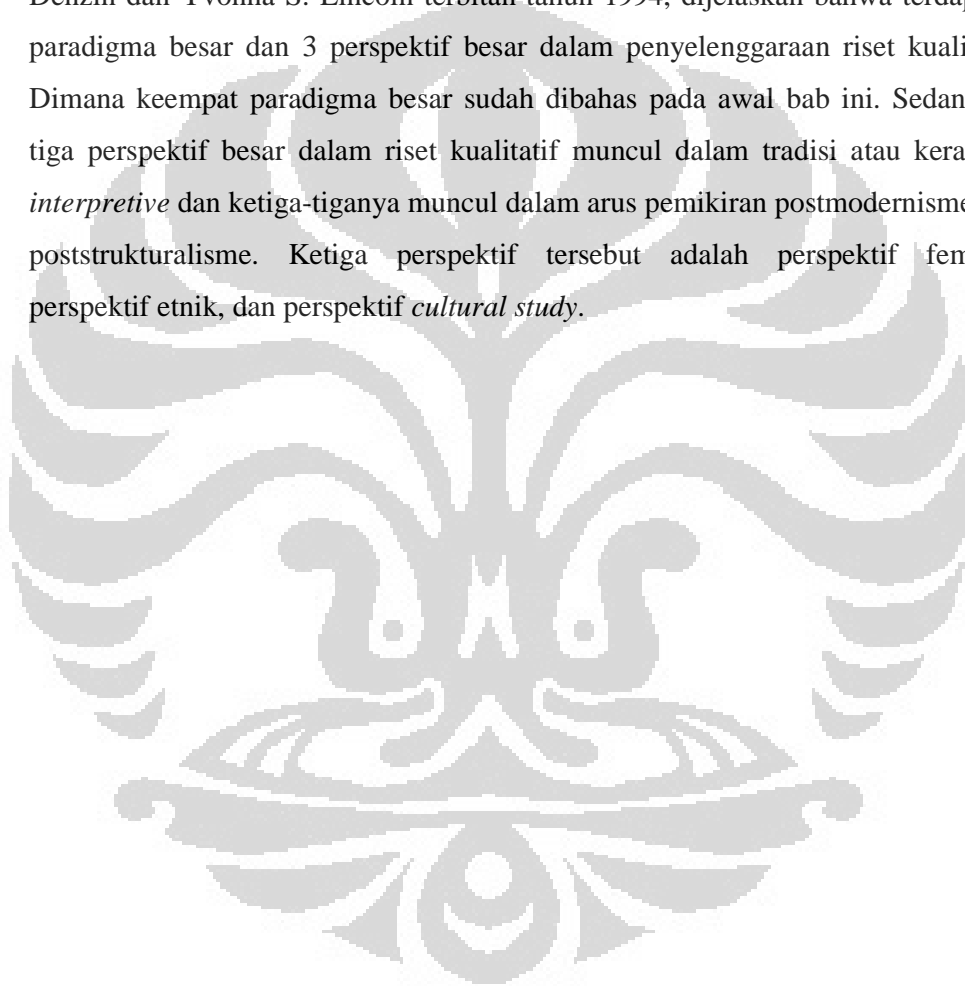
4. Konstruktivisme memiliki transaksional/subyektifis yang lebih lebar dimana asumsinya bahwa pengetahuan diciptakan melalui interaksi antara peneliti dan yang diteliti.
- secara metodologis
 1. Positivisme menitik beratkan pada verifikasi dari hipotesis.
 2. Postpositivisme memfokuskan pada falsifikasi dari hipotesis.
 3. Teori kritis berusaha merekonstruksi kembali konstruksi yang telah ada.
 4. Konstruktivisme pun memiliki tujuan yang sama dengan teori kritis secara metodologis.

Paradigma kritis dijelaskan Denzin dan Lincoln melalui diagram diatas, sebagai paradigma yang meliputi beberapa konsep paradigma alternatif seperti neo marxisme, cultural studies, feminish, materialis, dan penelitian parsipatoris yang terbagi menjadi tiga *substrands* yakni postrukturalis, posmodern, dan perpaduan diantara keduanya. Namun apapun perbedaannya, ketiga pandangan ini memiliki kesamaan epistemologis, bahwa penelitian yang dilakukan dalam cara pandang kritis tidak bebas nilai. Seperti yang dijelaskan Denzin, “what ever their differences the common breakway assumption of all these variants is that the value-determined nature of inquiry-an epistemologis differences”. (Denzin dan Lincoln, 1994; 109). \

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis (critical paradigm), namun dengan cara pandang yang lebih dekat dengan asumsi-asumsi postrukturalis. Aliran kritis memandang kebenaran bukanlah sesuatu yang absolut. Asumsi ini memiliki implikasi pada teknis analisis yang digunakan penelitian ini dan cara pandang terhadap masalah identitas nasional. Di dalam paradigma postmodern analisis wacana bukanlah suatu metode yang akan memberikan jawaban mutlak atas suatu masalah, melainkan memberikan kesadaran mengenai kondisi dibalik permasalahan dan memberikan upaya untuk memahami esensi permasalahan sebelum mendapat penyelesaiannya. Atas dasar itu, penelitian tidak sedang akan menawarkan suatu grand narasi penyelamatan, seperti dalam konsepsi Marxisme misalnya.

Selain paradigma terdapat perspektif, jika paradigma merupakan sebuah system kepercayaan yang mendasar yang tidak dapat bergerak dari satu ke lainnya, sedangkan perspektif merupakan sistem yang dikembangkan lebih sederhana sehingga memungkinkan perpindahan antara satu perspektif ke perspektif yang lain (Denzin & Lincoln, 1994).

Dalam buku “Handbook of Qualitative Research” dengan editor Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln terbitan tahun 1994, dijelaskan bahwa terdapat 4 paradigma besar dan 3 perspektif besar dalam penyelenggaraan riset kualitatif. Dimana keempat paradigma besar sudah dibahas pada awal bab ini. Sedangkan tiga perspektif besar dalam riset kualitatif muncul dalam tradisi atau kerangka *interpretive* dan ketiga-tiganya muncul dalam arus pemikiran postmodernisme dan poststrukturalisme. Ketiga perspektif tersebut adalah perspektif feminis, perspektif etnik, dan perspektif *cultural study*.



Tabel 3.2 Perbedaan Dalam Kerangka *Interpretive*

Paradigm/Theory	Criteria	Forms of Theory	Type of Narrative
Positivism/ postpositivism	Internal, external validity	logical-deductive, scientific, grounded	scientific report
Constructivism	Trustworthiness, credibility, transferability, confirmability	substantive-formal	interpretive case studies, ethnographic fiction
Feminist	Afrocentric, lived experience, dialogue, caring, accountability, race, class, gender, reflexivity, praxis, emotion, concrete grounding	critical, standpoint	essays, stories, experimental writing
Ethnic	Afrocentric, lived experience, dialogue, caring, accountability, race, class, gender	standpoint, critical, historical	essays, fable, dramas
Marxist	Emancipatory theory, falsifiable, dialogical, race, class, gender	critical, historical, economic	historical, economic, sociocultural analysis
Cultural studies	Cultural practices, praxis, social text, subjectivities	social criticism	cultural theory as criticism

Sumber : (Denzin & Lincoln, 1994; 13).

Perbedaan yang sangat mencolok dari paradigma dan perspektif dari bagan di atas adalah kriteria peilaian suatu penelitian. Berdasar paradigmanya, suatu penelitian yang memakai perspektif *cultural study* tentu tidak bisa diukur dengan validitas internal maupun eksternalnya. Oleh karena itu pengukuran hasil penelitian haruslah memperhatikan perspektif atau paradigma yang dipakai dan termanifestasikan dalam bentuk metodologi penelitian tersebut.

Perspektif *cultural study* sebagaimana yang digunakan dalam penelitian, pertamanya lahir dan diperkenalkan di Universitas Birmingham Inggris oleh tokoh seperti Stuart Hall dan banyak lain. Apa yang melatarbelakanginya adalah ketidakpuasan atas disiplin akademis yang kaku. Permasalahan sosial merupakan fenomena yang kompleks, yang tidak cukup hanya didekati oleh suatu disiplin ilmu tertentu saja. Pendekatan multi perspektif mutlak dilakukan bagi mereka yang hendak memahami realitas sosial. Berangkat dari asumsi inilah *cultural study* menjadi perspektif yang memungkinkan berbagai pendekatan ilmu sosial dikombinasikan atau dikenal dengan istilah *Bricolage*.

Hal yang senada diungkapkan Denzin dan Lincoln ketika membicarakan riset kualitatif. Riset kualitatif dalam kerangka interpretive tidak menempatkan satupun metodologi yang lebih istimewa dari metodologi yang lain (Denzin & Lincoln, 1994). Sehingga dengan sendirinya, sebagaimana karakter dari cultural studi, belakangan riset kualitatif mulai menghindari determinisme teori ataupun metodologi.

Nor does qualitative research have a distinct set of methods that are entirely its own. Qualitative researchers use semiotics, narrative, content, discourse, archival, and phonemic analysis, even statistics. They also draw upon and utilize the approaches, methods, and techniques of ethnomethodology, phenomenology, hermeneutics, feminism, rhizomatics, deconstructionism, ethnographies, interviews, psychoanalysis, cultural studies, survey research, and participant observation, among others. All of these research practice "can provide important insights and knowledge". No specific method or practice can be privileged over any other, and none can be eliminated out of hand (Nelson dalam Denzin et al., 1994; 3).

Permasalahan multi metodologi pada penelitian kualitatif dapat dipandang sebagai *bricolage* (pada awalnya metode *cultural study* yang dianggap sebagai *bricolage*,

dan pada perkembangannya dapat diaplikasikan pada riset kualitatif lainnya) yaitu bentuk dari penggabungan pecahan-pecahan yang menyediakan solusi dari permasalahan pada situasi yang konkret (Denzin & Lincoln, 1994).

*“The solution (bricolage) which is the result of the **bricoleur’s** method is an [emergent] construction” (Weinstein & Weinstein dalam Denzin & Lincoln, 1994; 2).*

Dari kutipan di atas munculah sebutan baru bagi peneliti kualitatif yaitu *bricoleur*. *Bricoleur* sendiri diambil dari bahasa Perancis yang dalam arti populernya adalah

‘someone who works with his (or her) hands and uses devious means compared to those craftsman’... the bricoleur is practical and gets the job done (Weinstein & Weinstein dalam Denzin & Lincoln, 1994; 2).

“Jack of all trades or kind of professional do-it-yourself person” (Levi-Strauss dalam Denzin & Lincoln, 1994; 2).

Peneliti kualitatif sebagai *bricoleur* secara kreatif harus dapat menggabungkan alat-alat analisis atau strategi penelitian berdasar pada permasalahan yang akan dijawab, konteks permasalahan yang ada, apa yang tersedia dalam konteks tersebut, dan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam setting penelitiannya.

Seorang *bricoleur* harus menyadari bahwa penelitian merupakan sebuah proses interaktif yang dipengaruhi oleh pengalaman personal baik historis, gender, kelas sosial, ras, dan etnis, baik bagi dirinya sendiri maupun orang-orang yang berada dalam setting penelitian tersebut. Dia juga harus menyadari bahwa pengetahuan adalah kekuasaan (*knowledge is power*) dimana semua hasil penelitian memiliki implikasi politis dan tidak bebas nilai (Denzin & Lincoln, 1994).

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Agak sulit untuk memberikan pembatasan yang tetap mengenai apa itu penelitian kualitatif. Akan tetapi definisi yang termudah mungkin dengan menyatakan bahwa penelitian kualitatif

melibatkan metode koleksi data dan analisa yang tidak-kuantitatif (Lofland & Loflan 1984).

Cara lain untuk mendefinisikan penelitian kualitatif adalah dengan memfokuskan perhatian pada term “quality” (kualitas), konsep yang mengacu pada esensi dan lingkungan dari sesuatu (Berg, 1989). Pendapat yang lain mengatakan penelitian jenis ini melibatkan sebuah metodologi subjektif dengan peneliti sebagai instrumen penelitian (Adler&Adler, 1987). Diantara beberapa pendapat mengenai apakah itu penelitian kualitatif beberapa peneliti memiliki masing-masing definisi yang paling disukainya.

Walaupun demikian penelitian kualitatif selalu memiliki karakteristik yang dapat dikenali dengan jelas yang membedakannya dengan penelitian kuantitatif. Diantaranya yang dijelaskan Creswell secara umum, yaitu:

1. Lingkungan alami objek penelitian adalah sumber utama data
2. Peneliti sebagai instrumen peneliti
3. Data adalah data primer berupa kata-kata atau gambar
4. Lebih berorientasi pada proses ketimbang hasil
5. Analisis data bersifat induktif
6. Fokus penelitian diarahkan pada perspektif partisipan penelitian (perspektif subjektif majemuk)
7. Laporan penelitian menggunakan bahasa yang ekspresif dan naratif
8. Persuasi dilakukan dengan argumen yang kuat. (Creswell, 1998:16)

Dari karakteristik umum tersebut dapat diamati bahwa penelitian kualitatif sesungguhnya merupakan penelitian yang menjadikan manusia sebagai fokus utamanya. Lalu bagaimanakah pendekatan kualitatif ini dapat digunakan dalam penelitian yang menjadikan teks media sebagai fokus penelitian?

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam analisis teks media sesungguhnya bukanlah penelitian yang murni bersifat kualitatif, karena fokus penelitiannya bukan manusia. Analisis teks media seperti yang dikenal saat ini (analisis wacana, semiotika, atau analisis *framing*) berangkat dari ketidakpuasan terhadap

pendekatan analisis isi dalam studi media massa, seperti yang dijelaskan Woollacott, “analisis isi dioperasikan oleh seperangkat kategori-kategori konseptual yang berkaitan dengan isi media dan secara kuantitatif menghitung ada atau tidak kategori-kategori tersebut dengan tingkat-tingkat kesulitan yang berbeda, [...] namun tidak cukup menekankan isi pesan sebagai area penting untuk analisis ilmu sosial. (Sobur mengutip Woollacott, dalam Listiorini, 1999: 261)

Dalam usaha untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap permasalahan sosial dalam teks media, digunakan pendekatan kualitatif yang kemudian melahirkan analisis wacana, analisis semiotik, dan analisis *framing*. Pendekatan kualitatif yang lebih eksploratif dalam mengamati fenomena, memberikan kemampuan melakukan analisis teks media bahkan pada tataran ideologis, suatu hal yang tidak dapat dicapai dengan analisis kuantitatif yang berkuat pada data-data sekunder yang bersifat statistikal.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berkisar pada usaha memberikan penjelasan mendalam mengenai strategi kuasa di buku sejarah yang melibatkan subjek warganegara (identitas nasional) dan pengetahuan yang ada didalamnya. Penjelasan yang diberikan bersifat naratif, yang didapatkan dari data-data primer berupa informasi lebih dari data-data kuantitatif statistikal meskipun data-data tersebut juga dapat digunakan untuk melengkapi penjelasan yang komprehensif.

3.3 Analisis Wacana Kritis Fairclough

Analisis wacana kritis lahir dari sebuah tradisi yang menolak ilmu pengetahuan yang bebas nilai seperti halnya metodologi yang lahir dari mazhab Frankfurt dan Birmingham *Cultural Studies*, sehingga semua wacana dianggap sebagai bagian atau dipengaruhi oleh struktur sosial, diproduksi dari hasil interaksi sosial, semua formasi, deskripsi, dan eksplanasi yang dilakukan dalam analisis wacana kritis berkonteks sosial politik (*Socio-politically situated*) (Van Dijk, 1998).

Van Dijk juga menambahkan bahwa riset kritis dalam wacana harus ‘memuaskan’ beberapa prasyarat untuk mengefektifkan realisasi tujuan-tujuannya. Prasyarat-prasyarat tersebut antara lain; *pertama*, sebagaimana kasus dalam tradisi riset yang lebih marjinal, CDA sebagai sebuah metodologi harus lebih baik dari pada riset yang lain agar bisa diterima. *Kedua*, CDA lebih berfokus pada permasalahan sosial dan politik daripada yang ada pada paradigma dan model yang ada sekarang. *Ketiga*, kelaikan empiris analisis kritis dari permasalahan sosial harus memenuhi syarat multidisipliner. *Keempat*, daripada menjelaskan struktur wacana yang ada, CDA berusaha untuk menjelaskannya dalam kerangka sifat-sifat interaksi sosial dan terlebih struktur sosialnya. Dan yang *kelima*, lebih khususnya CDA memfokuskan diri pada bagaimana struktur wacana diangkat, dilegitimasi, dan direproduksi atau melawan relasi kekuasaan dan dominasi di dalam masyarakat (Van Dijk, 1998).

Sedangkan prinsip-prinsip CDA dikemukakan oleh Fairclough dan Wodak sebagai berikut :

- CDA dialamatkan pada permasalahan sosial
- Relasi kekuasaan bersifat menyimpang lebar (*discursive*)
- Wacana membentuk, mengarahkan, dan mempengaruhi kehidupan sosial budaya dalam masyarakat
- Wacana merupakan kerja ideologis
- Wacana bersifat historis
- Keterhubungan antara teks dan masyarakat (konteks) bersifat mediasi
- Analisis wacana harus bersifat interpretatif dan eksplanatori
- Wacana adalah bentuk dari tindakan sosial (Fairclough dan Wodak dalam Van Dijk, 1998).

Pada kelanjutannya, prinsip-prinsip tersebut membawa analisis wacana pada berbagai definis yang berbeda, diantaranya:

Discourse analysis is analysis of text structure above the sentence (Sinclair dan Coulthard dalam Fairclough, 1995).

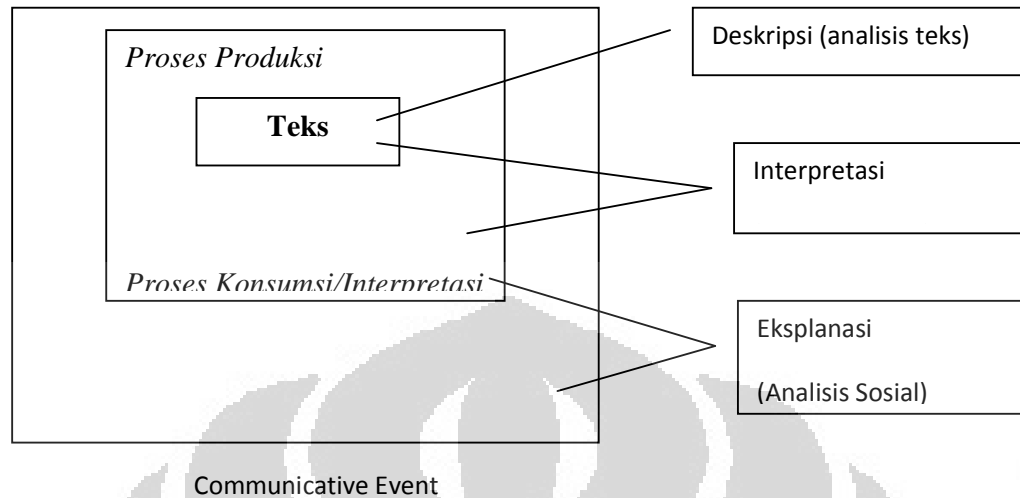
Discourse is use of language seen as a form of social practice and discourse analysis is analysis of how texts work within sociocultural practice (Fairclough, 1995).

Discourse are tactical elements or blocks operating in the field of force relations; there can exist different and even contradictory discourses within the same strategy; they can, on contrary, circulate without changing their form from one strategy to another, opposing strategy (Foucault dalam Fairclough, 1995).

Definisi di atas terutama dari Fairclough menimbulkan beberapa konsekuensi metodologis dalam kerangka teoritis dan metode analisis yang ditempuh. Fairclough mengembangkan sebuah kerangka yang berangkat dari tradisi kajian kultural di Inggris terutama dalam bidang kajian medianya serta dalam aspek linguistiknya diketengahkan sebuah kerangka teoritis *systemic-functional grammar* dari Halliday. Van Dijk dalam melihat koleganya berpendapat bahwa Fairclough mengikuti sekaligus mengkritisi Foucault yang tidak membatasi analisis wacana hanya dalam ranah teks, seperti kondisi komunikasi yang khusus atau praktik-praktik diskursif, tetapi analisis wacana tidak terlepas dari fokus pada konsep *order of discourse* yaitu kumpulan berbagai wacana yang ditentukan oleh institusi atau wilayah seperti pendidikan, politik, atau media.

Kerangka analisis yang dikembangkan oleh Fairclough bersifat tiga-dimensional yang terdiri dari analisis teks, analisis praktik-praktik wacana dalam bentuk produksi dan konsumsi teks, analisis praktik-praktik sosio-kultural. Sedangkan metode yang dikembangkan termasuk *deskripsi* linguistik teks dari segi kebahasaannya, *interpretasi* hubungan antara proses yang melebar luas dalam produksi dan konsumsi teks dan teksnya, dan *eksplanasi* hubungan antara proses diskursif di atas dan proses sosial.

Bagan 1 : Kerangka tiga-dimensional dalam CDA



Sumber: Fairclough, 1995

Dalam melihat hubungan antar tingkatan analisis yang ada pada kerangka kerjanya Fairclough berkomentar:

The connection between text and social practice is seen as being mediated by discourse practice: on the one hand, processes of text production and interpretation are shaped by (and help shape) the nature of social practice, and on the other hand the production process shapes (and leaves traces in) the text, and the interpretative process operates upon cues in the text (Fairclough, 1995)

Ciri khas dari metodologi analisis wacana kritis adalah bahwa hubungan antara praktik sosial dan teks diperantarai oleh praktik wacana; bagaimana sebuah teks diproduksi dan diinterpretasi, dalam pengertian apa praktik wacana dan kaidah dibuat, dari apa *order of discourse* dan bagaimana mereka diartikulasikan secara bersamaan. Proses ini pada akhirnya di pengaruhi oleh praktik sosial termasuk hubungan dengan hegemoni yang terjadi (Fairclough, 1995)

3.3.1 Teks dan Analisis Framing

Sebuah teks secara tradisional dipahami sebagai bagian dari bahasa yang tertulis – keseluruhan kerja seperti puisi, novel, atau bab pada sebuah buku. Pada pemahaman analisis wacana yang umum, teks merupakan bahasa tertulis maupun wicara, sehingga kata-kata yang ada pada sebuah perbincangan merupakan sebuah teks. Dalam analisis kultural pada kajian kultural, teks bahkan tidak harus

mempunyai sifat linguistik sama sekali. Akan tetapi pada pemahaman analisis wacana pembatasan teks sebagai bahasa tertulis maupun wicara merupakan pemahaman yang sesuai dengan CDA sebagai analisis wacana.

Teks merupakan ruang sosial dimana dua proses fundamental berlangsung secara simultan, kognisi dan representasi tentang dunia dan interaksi sosial. Sejarah sebagai tempat dimana realitas masa lalu dikemukakan, karenanya tidak terlepas dari proses pengkonstruksian makna, yang prosesnya melibatkan seleksi isu dan *moral judgment*. Dalam konteks inilah analisis framing menjadi penting, sebab sebagaimana diungkapkan Eriyanto (2002) analisis framing adalah metode yang bermaksud untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja dibingkai oleh media). Pembingkaiannya itu tentu saja melalui proses konstruksi dimana didalamnya melibatkan kekuasaan.

Menurut Panuju, analisis framing adalah analisis untuk membongkar ideologi dibalik penulisan informasi. Penekanan pada kata informasi dan bukan berita, memberi peluang bagi analisis framing untuk membedah objek lain selain berita. Buku sejarah sebagai sebuah media informasi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tidak terlepas dari konstruksi ideologis. Robert. N. Entman, seorang yang meletakkan dasar bagi analisis framing dalam studi media, mendefinisikan framing sebagai seleksi atas berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat hal tersebut lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi.

Tabel 3.3 Perangkat Framing

Seleksi isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu. Aspek Mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses itu selalu terkandung di dalamnya ada bagian informasi yang dimasukkan (included) tetapi ada juga informasi yang dikeluarkan (excluded).
Penonjolan aspek tertentu dari isu	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa atau isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Dalam praktiknya framing dijalankan oleh media dengan penyeleksian isu tertentu dan mengabaikan isu lainnya, dan menonjolkan aspek tertentu dari isu tersebut dengan berbagai bentuk strategi wacana, penempatan yang mencolok, pengulangan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang di informasikan. Asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi dan simplifikasi. Semua itu aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi realitas menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak. Dalam konsep Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan dan evaluasi dan rekomendasi mengenai suatu wacana untuk menekankan suatu kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.

Secara lebih detail, keempat hal tersebut di atas dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Framing Etman

<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab suatu masalah? Siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make moral judgment</i> (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah itu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

(Eriyanto, 2002)

Keterangan:

Define problems: merupakan bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh produsen teks. Peristiwa yang sama bisa dipahami berbeda, dan bingkai ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda. Contoh ketika ada demonstrasi mahasiswa dan diakhiri dengan bentrokan, maka peristiwa ini bisa dipahami sebagai anarkisme tapi bisa juga dipahami sebagai pengorbanan mahasiswa.

Diagnose causes: merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa, seperti apa penyebab masalah (*what*), atau siapa penyebabnya (*who*). Penyebab masalah secara tidak langsung akan dipahami berbeda oleh produsen teks.

Nilai moral: elemen yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah. Masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan argumentasi untuk mendukung argumentasi. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar yang dikenal oleh khalayak.

Treatment recommendation: elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki produsen teks. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah? Penyelesaian ini tergantung dari bagaimana peristiwa dilihat, siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

3.3.2 Analisis Order of Discourse

Analisis intepretif pada level kedua kerangka kerja Fairclough, didapatnya dari Stuart Hall 'Decoding and Encoding' dimana produksi teks sebagai sebuah proses pemaknaan sebuah institusi atau subyek akan dikodekan dan diterjemahkan kembali oleh audiens dengan proses yang hampir sama. Permasalahan analisis interpretasi inilah yang membedakan analisis wacana dengan kerangka dari Fairclough dan analisis wacana kritis lainnya; misal Van Dijk, Kress, dan Fowler.

Analisis praktik-praktik wacana dalam kerangka tiga-dimensional merupakan jembatan antara teks dan konteks sosial, kultural dan politik serta kesejarahan

yang melingkupi teks. Sifatnya yang sebagai jembatan memungkinkan sebuah interpretasi yang tepat terhadap sebuah wacana dilakukan di dalam tingkatan analisis ini. Kerangka analisis pada tingkatan ini sudah tidak terlalu dipengaruhi oleh nuansa linguistik, Fairclough mengatakan bahwa dalam analisis praktik wacana di dalam media digunakan untuk menghindari ketimpangan dari kelengkapan teks berupa *repetitive* dan kelengkapan kreatif.

Selanjutnya Fairclough menggunakan analisis Bakhtin yang menyebutkan bahwa teks adalah wilayah tekanan antara gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Secara singkat gaya sentrifugal mengikuti kebutuhan dari produksi teks untuk membentuk teks diatas persetujuan yang diberikan. Gaya sentripetal yang berarti memusat di dalam analisis ini dimaknai sebagai gaya yang unitarian dan stabil dalam tingkat heterogenitas bentuk wacananya (Fairclough, 1995).

Sedangkan gaya sentrifugal yang sifatnya menyebar dalam artian bervariasi dan berubah-ubah merupakan gaya yang dihasilkan dari kekhususan suatu situasi produksi teks yang pada faktanya situasi tersebut tidak berupa situasi yang merupakan perulangan antara satu sama lain, akan tetapi lebih merupakan ‘novel tanpa akhir’ dan problematik dalam caranya yang baru (Fairclough, 1995). Sehingga pada analisis ini nantinya akan diperhatikan bagaimana proses wacana tersebut diproduksi dan dikonsumsi dalam gaya yang konvensional atau perpaduan yang lebih kreatif.

Pada titik inilah terjadi perpaduan antara analisis tiga-dimensional dengan analisis *order of discourse*. *Order of discourse* atau rezim wacana menurut Fairclough merupakan sebuah konsep yang diambil dari Foucault untuk menunjuk pada upaya pembentukan wacana dari suatu institusi atau wilayah seperti media massa dan pendidikan. Menurut Foucault yang dimaksud dengan *order* adalah:

Order is, at one and same time, that which is given in things as their inner law, the hidden network that determines the way they confront one another, and also that which has no existence except in the grid created by a glance, an examination, a language; and it is only in the blank spaces of this grid that order manifest itself in depth as though already there, waiting in silence for the moment of its expression (Foucault, 1970).

Dengan kata lain, analisis order adalah analisis rezim-rezim aturan yang menentukan kebenaran dalam penulisan sejarah. Rezim diskursus semacam ini, bukan hanya bersifat aturanyang baku, akan tetapi keseluruhan jenis disiplin pengetahuan tertentu yang menentukan bagaimana individu bersikap terhadapnya. Dalam pengertian ini, analisis order berarti juga analisis kuasa/pengetahuan. Kategori yang muncul dari disiplin pengetahuan seperti “bad history” dan “band history” yang berlaku di masa orde baru, merupakan bentuk analisis order yang dimaksud oleh Fairclough.

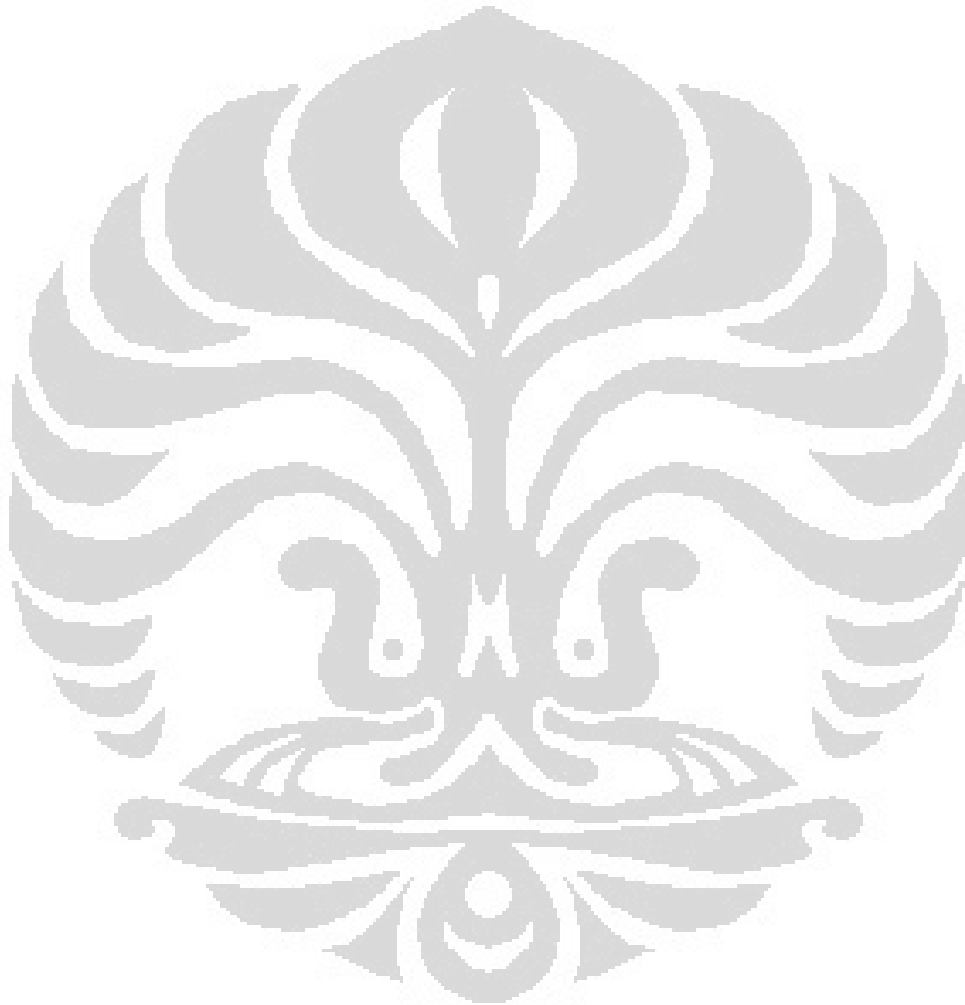
3.3.3 Analisis Praktik Sosio-Kultural

Analisis pada level ini merupakan analisis terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sejarah yang menjadi konteks dari sebuah teks dan praktik wacananya. Konsep ini sesuai dengan struktur makro dari sebuah teks yang diungkapkan oleh Van Dijk (1998). Dalam tingkat ini bisa saja melibatkan abstraksi yang berbeda dari situasi tertentu yang pada akhirnya menunjukkan bahwa peristiwa komunikasi secara kumulatif membentuk dan dibentuk kembali oleh praktik sosial dan kultural disemua tingkatan.

Terdapat hubungan yang kompleks antara teks, wacana, dan konteks sosialnya. Masing-masing akan saling mempengaruhi dan akan saling mereproduksi. Akan tetapi perubahan dalam segi kontekstual dapat diperhatikan pada tiga tingkatan yaitu tingkatan sosial (societal), institusional, dan situasional (Fairclough, 1989).

Pengamatan pada tingkatan sosial adalah pengamatan yang paling makro dalam analisis wacana kritis, karena melibatkan semua sistem sosial dan nilai-nilai bahkan ideologi di dalam masyarakat. Aspek-aspek sosial seperti nilai-nilai dominan yang ada di masyarakat tentu sangat mempengaruhi bagaimana wacana itu dibentuk dan bagaimana wacana tentang nilai dominan itu mereproduksi diri sendiri. Setelah pengamatan pada tingkatan sosial maka tingkatan kedua adalah tingkatan institusional. Pada tingkatan institusional akan dibicarakan bagaimana institusi yang memproduksi wacana atau institusi lain yang berhubungan dengan produksi dan konsumsi wacana tersebut berpengaruh dalam seluruh proses

wacana dan reproduksinya. Ketiga dan yang paling mikro adalah tingkatan situasional yang memperhatikan situasi ketika teks itu diproduksi dan dikonsumsi. Situasi seperti waktu, tempat, dan situasi yang sifatnya unik, sehingga suatu teks bersifat unik pula.



BAB 4

PEMBAHASAN

4.1. Teks dan Analisis Framing

4.1.1 Peran Berbagai Golongan dan Pembentukan Identitas Nasional : Peran Elit Modern Hasil Pendidikan Kolonial

Sebagaimana tertera dalam judulnya dalam bab ini, uraian dimaksudkan untuk menjelaskan peran berbagai golongan dan pembentukan identitas nasional. dalam kerangka framing Entman, yang paling pertama penting untuk dilihat adalah upaya untuk mendefinisikan masalah. Dalam bab ini jelas ada dua hal yang terkait, yaitu identitas nasional dan peran berbagai golongan. Lalu pertanyaannya apa yang dimaksud dengan Identitas Nasional dan Peran berbagai golongan?

- **Definisi masalah**

Golongan terpelajar yang tumbuh dan berkembang setelah proses pelaksanaan pendidikan Barat merupakan golongan di masyarakat Indonesia yang telah memiliki wawasan baru, yaitu nasionalisme Indonesia. Golongan cendekiawan atau terpelajar sadar bahwa dirinya dalam keadaan yang serba terbelakang. Mereka bangkit membentuk kekuatan sosial baru yang berujung tidak hanya untuk perbaikan nasib dan kesejahteraan, tetapi juga untuk kemerdekaan nasional (Matroji, 2007: 86).

Melalui teks ini kita melihat bahwa masalah diasumsikan terjadi karena adanya penjajahan dan keterbelakangan bangsa Indonesia. Dalam uraian berikutnya dikatakan bahwa keterbelakangan itu meliputi berbagai hal terutama menyangkut budaya, ekonomi, dan pendidikan. Lahirnya kelas menengah yang dihasilkan oleh pendidikan kolonial, kemudian berupaya mengoreksi keadaan ini. Meskipun tidak semua bangsa Indonesia memiliki akses pada pendidikan Barat dan memiliki kesadaran yang sama dengan mereka. Namun, mereka yang lebih terdidik tidak hanya mementingkan diri sendiri, mereka berupaya menyebar luaskan pengetahuan yang mereka miliki dengan membentuk sekolah-sekolah pribumi.

Golongan-golongan inilah yang dimasud buku sejarah sebagai pihak yang berperan. Dalam uraian selanjutnya ditunjukkan bahwa yang dimasud kelas menengah adalah kelompok profesional, seperti guru dan pedagang. Para guru pribumi dinilai berperan penting dalam upaya melahirkan kesadaran nasional. Seperti yang telah disebutkan diatas, meski kebijakan kolonial membatasi akses pada pendidikan, para guru pribumi dan indo Eropa seperti Ki Hajar Dewantara dan Douwes Dekker, mendirikan sekolah-sekolah rakyat. Tidak ketinggalan Mohamad Syafei di Minangkabau juga mendirikan INS kayu taman, juga sekolah bagi rakyat.

Peran pedagang dalam bab ini dijelaskan dengan cerita mengenai sarekat Islam dan tokoh-tokohnya, yang ditempatkan sebagai para saudagar yang peduli pada nasionalisme Indonesia. Hal ini misalnya terlihat dalam narasi berikut ini.

Seorang saudagar batik dari Solo, Kyai Haji Samanhudi, mendirikan perkumpulan pedagang muslim dengan nama Sarekat Dagang Islam pada tahun 1909. Motivasi awal pembentukan organisasi ini adalah untuk memperjuangkan kepentingan pribumi di Hindia Belanda. Namun, pada perkembangannya, SDI berubah menjadi Sarekat Islam yang lebih mnegarah pada perjuangan untuk lepas dari kolonialisme (Matroji,2007: 88).

Tidak hanya golongan profesional yang didefinisikan sebagai guru dan pedagang. Kelompok pers pun diperhatikan andilnya dalam proses tumbuhnya kesadaran nasional. Peran dari kelompok pers dinilai penting dalam kaitan dengan penyebaran ide nasionalisme. Tumbuhnya surat kabar pun dikaitkan dengan tumbuhnya organisasi kebangsaan seperti Budi Oetomo, Sarekat Islam dan Perhimpunan Indoensia, yang masing-masing memiliki persnya sendiri, sebagai corong organisasinya.

Surat kabar atau majalah itu membawa suara dan kepentingan organisasi masing-masing. Dengan surat kabar atau majalah itu, tiap organisasi kebangsaan memasyarakatkan, mengkampanyekan, dan mempropagandakan program-program organisasi, pandangan tentang nasionalisme Indonesia, serta kritik terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Sehingga, berdirinya berbagai organisasi kebangsaan menandai kebangkitan pers di Indonesia (Matroji,2007: 88).

Terkahir, kelompok yang juga dinilai berperan dalam tumbuhnya kesadaran nasional dan akhirnya kemerdekaan adalah kelompok wanita. Organisasi perempuan diawal kemerdekaan dinilai memberikan sumbangan berharga bagi Republik. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya organisasi perempuan yang memiliki tujuan sama dengan organisasi pergerakan nasional, yakni mengusung kemerdekaan Indoensia.

Organisasi perempuan yang pada awalnya menajdi bagian dari organisasi keagamaan dan pergerakan nasional, seperti Sarekat putri Islam(bagian Sarekat Islam), Aisyiah(bagian Muhammadiyah), Kartini Fonds, Amai Setia yang diinisiasi oleh Rohana Kudus di Sumatra barat, dan Kautamaan Istri di Garut. Masing-masing organisasi perempuan memiliki peranannya tersendiri, meski kebanyakan terlibat dalam upaya memberikan pendidikan bagi kaum perempuan Bumi Putra.

Puncak kegarakan perempuan dalam narasi sejarah dibab ini ketika kongres perempuan pertama digelar. Dimana hampir semua organisasi perempuan di tanah air ikut didalamnya dan memutuskan untuk bergabung dalam bernama PPII (Perserikatan Perkumpulan Istri Indonesia). PPII merupakan forum perjuangan bagi kelompok perempuan dalam mewujudkan cita nasionalismenya, yang antara lain dibicarakan dalam kongres keduanya.

Pada bulan Juli 1935, atas inisiatif PPII diadakan kongres perempuan kedua di Jakarta. Dalam kongres ini dibahas antara lain:

- *Masalah buruh wanita,*
- *Usaha memberantas buta huruf*
- *Sikap netral terhadap agama,*
- *Usaha menanamkan semangat kebangsaan,*
- *Menjadikan kongres perempuan Indoensia sebagai badan tetap.*

Dalam kongres yang sama juga diputuskan untuk membubarkan PPII dan membentuk kongres perempuan Indoensia, yang berfokus pada upaya untuk mendapatkan hak pilih bagi wanita dalam dewan-dewa perwakilan. Semangat gerakan perempuan dalam bab ini dengan kata lain adalah kesetaraan dan pendidikan bagi perempuan.

Setelah panjang lebar menguraikan mengenai peran berbagai golongan. Bab ini melanjutkan dengan memasuki sub bab mengenai “Bahasa dan Identitas Bangsa” . melalui judul saja sudah segera kentara apa yang dimasukkannya dengan identitas nasional, yaitu bahasa. Penjelasan mengenai bahasa Indonesia yang berawal dari bahasa Melayu, yang jauh sebelum kolonisasi telah menjadi bahasa perdagangan di Nusantara, mewarnai penjelasan dalam sub bab ini.

Sejak berabad-abad yang lalu, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar antar daerah di kepulauan Indonesia sudah dipergunakan. Karena penggunaannya lebih banyak dibidang ekonomi daripada dibidang politik, maka bahasa Melayu lebih dikenal sebagai bahasa perdagangan di bandar-bandar Nusantara (Matroji,2007: 93).

Pada perjalanannya, politik bahasa yang digunakan oleh pemerintah kolonial. Membedakan manusia dari bahasa yang digunakannya. Hal ini juga ditunjang oleh pendidikan kolonial yang menggunakan bahasa Belanda. Sehingga dalam pergaulan sehari-hari, mereka yang menggunakan bahasa Melayu dianggap lebih rendah. Perlakuan demikian terhadap bahasa Melayu, menjadikannya bahasa kelas dua.

Namun, tumbuh suburnya pendidikan kolonial bagi pegawai administrasi rendah yang menggunakan bahasa Melayu, sedikit demi sedikit mengangkat kembali status bahasa ini. Puncaknya adalah ketika berbagai golongan nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan mulai menggunakan bahasa Melayu dalam penerbitannya. Bahasa Melayu dipilih sebagai cara membangun identitas bangsa yang berbeda dengan kolonial Belanda.

Sumpah pemuda 28 Oktober 1928 merupakan penegasan yang nyata akan perkembangan bahasa dan identitas bangsa. Rumusan Sumpah Pemuda jelas menunjukkan bahasa Melayu yang tadinya hanya digunakan oleh suku Melayu, dinyatakan sebagai bahasa persatuan nasional, dan diberi nama bahasa Indonesia(Matroji,2007: 94).

Sumpah Pemuda dinyatakan sebagai tonggak dari pernyataan politik bangsa Indonesia yang menentukan Identitas nasionalnya yang didasarkan atas kesamaan bahasa. Tidak kalah penting, bahasa itu diberi nama bahasa Indonesia. Nama dan penyebutan “Indonesia” pun oleh buku sejarah diberi landasan historis, dengan

mencari akar katanya dan tokoh pertama yang menemukannya. GR. Logan telah menggunakannya sebagai istilah georafis pada pertengahan abad ke – 19. Istilah itu kemudian digunakan oleh para sarjana Belanda dan Inggris untuk menunjuk masyarakat yang ditinggal didaerah kepulauan.

Penggunaanya secara masif sebagai simbol nasionalisme baru marak ketika organisasi pergerakan menggunakannya sebagai sebutan bagi cita-cita perjuangannya. Dengan kata lain, identitas nasional dalam pengertian bab ini adalah kesamaan bahasa dan sejarah. Sebab semua yang ditunjuk sebagai identitas nasional adalah pemersatu, yaitu bahasa dan penyebutan asal istilah “Indonesia”.

- **Penyebab Masalah**

Penjajahan bangsa Indonesia selama berabad-abad dalam bab ini dinilai sebagai akibat dari keserakahan kolonialisme dan keterbelakangan bangsa Indonesia. Namun, pada prakteknya alasan kedua mendapat lebih banyak uraian dalam halaman-halaman buku sejarah. Adat istiadat yang menjadi tradisi masyarakat dinilai sebagai faktor utama yang menghambat lahirnya kesadaran nasional.

Lahirnya kelas menengah terdidik hasil pendidikan kolonial, menimbulkan satu kelompok tersendiri yang terdidik dan modern. Mereka inilah yang mencoba membongkar cara pikir lama yang dinilai tidak lagi sesuai dengan semangat jaman.

Golongan terpelajar berusaha keras untuk mengubah pandangan lama yang bersifat kedaerahan dengan pandangan baru yang bersifat nasional. Golongan terpelajar meyakini bahwa cita-cita kemerdekaan baru dapat diwujudkan bila nasionalisme telah tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. Nasionalisme Indonesia merupakan ikatan kekuatan yang kuat bagi semua suku untuk terciptanya persatuan nasional (Matroji, 2007: 86).

Tradisi yang dinilai bercorak kedaerahan, tidak lagi cocok bagi sebuah gagasan persatuan. Antara lain dengan mempopulerkan penggunaan bahasa Melayu dalam proses belajar mengajar dan mengajar serta menyebarkan gagasan nasional dengan pers berbahasa Melayu. Hanya dengan mengadopsi pemikiran kemajuan yang datangnya dari Eropa bangsa Indonesia dapat keluar dari keterbelakangan

budaya dan menyadari nasionalismenya. Itulah mengapa dalam uraian di atas ini ada kesan membenturkan nilai lama yang didefinisikan sebagai kedaerahan dan gagasan nasionalisme sebagai kebaruan dan pencerahan yang membawa bangsa Indonesia keluar dari penjajahan serta keterbelakangan budaya.

- **Penilaian Moral**

Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme yang merupakan syarat bagi kemerdekaan, maka satu-satunya cara adalah meninggalkan adat istiadat dan tradisi yang bersifat kedaerahan. Hanya dengan persatuan dan kesatuan nasional, bangsa yang merdeka mungkin didirikan. Pandangan semacam ini misalnya terlihat seperti pada teks:

Golongan terpelajar berusaha keras untuk mengubah pandangan lama yang bersifat kedaerahan dengan pandangan baru yang bersifat nasional. Golongan terpelajar meyakini bahwa cita-cita kemerdekaan baru dapat diwujudkan bila nasionalisme telah tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. Nasionalisme Indonesia merupakan ikatan kekuatan yang kuat bagi semua suku untuk terciptanya persatuan nasional (Matroji, 2007: 86).

Teks lainnya dapat kita lihat dari uraian mengenai Sumpah Pemuda yang dinyatakan sebagai puncak lahirnya identitas nasional. Disebutkan bahwa pemuda dari berbagai suku dan golongan bersepakat untuk memilih salah satu bahasa, yang berasal dari suku Melayu, untuk menjadi bahasa nasional. Dengan kata lain, nasionalisme hanya dapat dicapai melalui suatu pengorbanan untuk menerima kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan golongan.

- **Rekomendasi**

Masalah keterbelakang budaya, penjajahan, dan tidak adanya kesadaran nasionalisme dalam buku sejarah berhasil di atas oleh para tokoh perjuangan dengan dua cara. Pertama, adalah upaya menyebarkan pendidikan pada sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Pendidikan adalah media penyebaran gagasan nasionalisme yang ampuh. Sebagaimana ditunjukkan sejarah melalui INS Kayu Taman, Taman Siswa, dan banyak lainnya. berbekal pengetahuan modern, bangsa pribumi mampu menyadari ketertindasannya di alam kolonial.

Tokoh-tokoh pimpinan pergerakan nasional menyadari pula bahwa nasionalisme Indoensia dapat ditumbuhkembangkan secara lebih cepat melalui pendidikan. Dalam rangka mewujudkan gagasan tersebut, organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh nasional mendirikan sekolah-sekolah. Didirikannya sekolah dengan tujuan untuk mendidik kader pimpinan organisasi yang tangguh serta menanamkan nasionalisme kepada anak didik(Matroji,2007: 86)

Kedua, adalah organisasi pergerakan itu sendiri. ” Didirikannya sekolah dengan tujuan untuk mendidik kader pimpinan organisasi yang tangguh serta menanamkan nasionalisme kepada anak didik”(Matroji,2007: 86). Sekolah dengan kata lain adalah proses inisiasi penduduk bumi putra yang muara akhirnya adalah perjuangan di level organisasi kemerdekaan. Hanya dengan dua kendaraan tersebut (pendidikan dan organisasi), kesadaran nasional berupa kesamaan sejarah dan bahasa bisa dicapai, dan pada akhirnya kemerdekaan dari kolonialisme.

4.1.2 Peninggalan Sejarah bercorak Kolonial : Mereduksi Kolonialisme Menjadi Semata Fisik

Penjajahan selama 350 tahun yang dilakukan oleh kolonialis Belanda, diakui oleh buku sejarah menyisakan jejak dalam hidup masyarakat Indonesia yang kini telah merdeka. Dalam bab berjudul peninggalan bercorak sejarah kolonial, buku sejarah berupaya mengurai sejarah kolonial dan jejaknya sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari diri bangsa Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam tujuan pembelajaran, “menghargai peninggalan sejarah, betapapun kelamnya, sama dengan menghargai diri (bangsa) sendiri”(Matroji, 2007: 23).

Peninggalan sejarah bercorak kolonial dikategorikan menjadi dua oleh buku sejarah. pertama, peninggalan fisik, yang meliputi jaringan transportasi, telekomunikasi, dan tata kota. Kedua, peninggalan psikologis dan budaya. Penting untuk melihat bagaimana keduanya didefinisikan dan dibingkai, untuk mendapatkan gambaran mengenai diri bangsa yang tidak terpisah dengan kolonialisme dalam narasi buku sejarah.

- **Definisi Masalah**

Apa yang menarik dari bagaimana buku sejarah tulisan Matroji mengurai peninggalan sejarah kolonial adalah tidak konsistennya Matroji pada dua kategori yang telah dibuatnya. Bukannya memulai uraian dengan penjelasan mengenai peninggalan fisik dan budaya, buku sejarah justru membuat kategori lain dalam uraiannya, yaitu, politik, ekonomi, dan budaya.

Peninggalan fisik sebagaimana yang dicontohkan diawal dengan transportasi dan telekomunikasi, penjelasannya menjadi tersebar dalam sub bab- sub bab baru tersebut. Peninggalan fisik sebagaimana yang dimaksud diawal penjelasan bab ini, praktis hanya ditemukan satu, yaitu jaringan transportasi. Penjelasan mengenai ini didapat dalam sub bab peninggalan dibidang ekonomi. Dikatakan bahwa semenjak diberlakukannya Undang-Undang agraria pada tahun 1870, pemerintah kolonial merasa perlu mengembangkan kehidupan ekonomi Netherland Indie agar seimbang dengan Eropa, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran ekonomi yang sehat.

Terutama di Jawa dan Sumatra, dibangun jaringan rel kereta api yang menghubungkan pusat perkebunan dan kota-kota. Jaringan kereta api paling kompleks terdapat di Jawa, karena didukung dengan topografi dan perkembangan ekonomi yang pesat di pulau ini. pembangunan dan penanganan transportasi kereta api ditangani oleh semacam jawatan bernama Staatspoorwegen (Matroji, 2007: 28)

Selain jaringan transportasi yang masuk dalam kategori peninggalan ekonomi adalah kegiatan produksi modern. Sementara jembatan yang juga dapat masuk dalam kategori peninggalan fisik terkait transportasi, justru masuk dalam kategori peninggalan budaya. Dalam narasi buku sejarah terlihat ada tumpang tindih definisi akibat adanya keinginan untuk memuseumkan beberapa peninggalan sisa kolonial. Jembatan, gedung, benteng yang termasuk peninggalan fisik, kemudian masuk kategori budaya dalam kerangka definisi budaya yang sempit. Budaya dalam hal ini ditempatkan semata artefak-artefak peninggalan sejarah. itulah mengapa kerancuan definisi terjadi dalam teks ini.

Sementara budaya dalam buku sejarah menemukan maknanya yang sempit. Hal terlihat dari sub bab peninggalan budaya, yang uraiannya berisi mengenai bangunan-bangunan peninggalan kolonial diberbagai daerah di Indoensia.

Hampir disemua ibu kota propinsi RI sekarang (juga kota besar lainnya yang berumur lebih dari 300 tahun) dapat dijumpai peninggalan kolonial dibidang budaya. Peninggalan paling kentara berupa gedung, monumen, benteng, dan bangunan lainnya(Matroji,2007:29)

Enam halaman dalam sub bab ini habis digunakan untuk menjelaskan perihal Jembatan Cikuda di Sumedang Jawa Barat, komplek Kebun Raya Bogor, atau benteng Fort Rotterdam di Sulawesi Selatan. Penjelasan berisi seputar kapan berdiri dan dengan tujuan pa bangunan-bangunan tersebut didirikan, pada beberapa bagian juga dijelaskan tokoh-tokoh yang mendirikan.

Bila budaya seolah hanya sisa bangunan, maka lain halnya dengan politik. Bab ini juga menjelaskan peninggalan dibidang politik. Dikatakan bahwa secara politik, Republik Indonesia hari ini mewarisi model negara Nderland Indie. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan wilayah administratif dan lembaga negara yang berlaku sekarang, dimana bentuknya tidak jauh dengan massa kolonial.

Pemerintah kolonial Belanda, pada awalnya tidak bernit membentuk wilayah administratif dan politik. Sebab, tujuan awal mereka datang ke Nusantara tidak lain mencari keuntungan ekonomi, mereka lebih suka menggunakan para bupati untuk mendapat apa yang mereka mau. Namun semua berubah, semenjak perang Diponegoro, pemerintah kolonial mulai memikirkan pembentukan Nederlands Indie. Negara bentukan pemerintah kolonial inilah yang hingga hari ini masih menjadi prototipe bagi Republik Indonesia.

Sampai tahun 1930-an, Nederlands Indie terbagi menjadi 22 wilayah administratif. Pembagian paling kompleks terdapat di Sumatra dan Jawa. Kalaulah kita menyimak pembagian propinsi beserta batas-batasnya, tampak sekali pengaruhnya pada pembagian propinsi untuk Indonesia sekarang ini (Matroji,2007: 26).

Begitu juga dengan struktur kelembagaan negara. Semisal, Departemen Dalam Negeri, Sekretaris Negara, Departemen Pendidikan, dan banyak lainn merupakan

kategori kementerian yang telah ada semenjak era kolonial. Tidak hanya itu, apa yang paling menarik dari sub ini justru mengenai apa yang disebut sebagai reorganisasi desa. Dikatakan bahwa pembagian desa, kabupaten, kota dan lainnya juga pada awalnya mengikuti Nederlands Indie. Pada saat kebijakan *cuultur stetsel* diberlakukan, pemerintah kolonial melakukan apa yang disebut dengan reorganisasi desa. Menggabungkan beberapa desa kecil menjadi satu desa besar, dengan tujuan membentuk unit-unit produksi.

Pada prakteknya, reorganisasi desa dijalankan dengan amat ketat. Penduduk desa tidak dapat sembarangan keluar masuk desa. Pengawasan dan kontrol dijalankan dengan seksama. Hasilnya adalah budaya mudik, yang hingga kini jadi tradisi kita.

Dampak dari reorganisasi desa paling terasa di Pulau Jawa. Penduduk yang tadinya bebas berpindah dari satu tempat ke tempat lain harus terikat ke desanya. Penduduk dilarang keluar dari desanya tanpa izin resmi. Dampak ini masih terasa sampai sekarang seperti pada gejala mudik (pulang ke kampung halaman) (Matroji,2007: 27).

Sayangnya, tidak dijelaskan lebih lanjut kaitan antara mudik dan reorganisasi desa. Padahal, secara substansial bagian ini merupakan satu-satunya peluang untuk melihat keterkaitan budaya poskolonial dengan era kolonial. Kurangnya elaborasi terhadap bagian ini, seolah hanya melanjutkan kekaburan definisi mengenai peninggalan fisik dan budaya.

- **Penyebab Masalah**

Malang melintangnya kolonialisme Belanda selama tiga setengah abad di Indonesia, mewariskan banyak peninggalan sejarah. Namun, seperti ditulis dibagian awal bab ini, mengenai tujuan mengapa perlu mempelajari bab ini, dikatakan “sayang sekali banyak peninggalan itu berada dalam keadaan terbengkalai” (Matroji,2007:23).

Atas dasar itu menjadi penting untuk memahami warisan kolonial yang hidup dengan kita hingga hari. Proses warisan itu, tidak semuanya merupakan hal yang tampak dan dapat dilihat kasat mata, seperti halnya gedung-gedung, benteng, tempat pertunjukan teater, jaringan transportasi dan banyak lainnya. Diantara apa

yang diwariskan kolonialisme pada kita, sering kali tidak kita sadari, seperti halnya praktek politik (pembagian wilayah administratif dan struktur kelembagaan negara).

Warisan yang tidak tampak itu, bisa juga berupa budaya. Seperti halnya mudik, yang menurut buku sejaah merupakan akibat dari praktek pengaturan populasi yang terjadi di era kolonial, dan disebut sebagai reorganisasi desa. Dengan sendirinya, sejarah menjadi penting, hanya dengan belajar kita dapat mengenal diri dan bangsa.

- **Penilaian Moral**

Bingkai buku sejarah pada bab ini, pada akhirnya menempatkan kolonialisme sebagai berkah sekaligus musibah. Nilai moral yang coba diketengahkan dalam bab ini adalah mengambil hikmah dari praktek kolonialisme. Disatu sisi kolonialisme adalah musibah, sebab ia merupakan pranata sosial yang menindas. Akan tetapi disisi lainnya ia juga berkah, sebab melalui kolonialisme pula bangsa Indonesia menemukan kesadaran nasionalnya sebagai bangsa dan kolonialisme pula yang mengenalkan bangsa Indonesia pada modernitas (teknologi, budaya, politik).

Berawal dari keinginan untuk mengambil keuntungan ekonomi yang maksimal, kolonialisme telah menyengsarakan rakyat yang diperkerjakannya. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Eropa. Pemerintah kolonial merasa perlu “mengembangkan kehidupan ekonomi di Nederlands Indie, dengan seimbang dengan perkembangan ekonomi di Eropa”(Matoji,2007: 27). Hal ini diperlukan demi terjadinya hubungan ekspor impor yang sehat.

Untuk itu, pemerintah kolonial mengeluarkan Undang-Undang Agrari 1870. Undang-undang tersebut sekaligus menandai dibukanya kesempatan yang lebar bagi perusahaan-perusahaan swasta menanamkan modalnya di tanah air. Pada kesempatan itu pula, bangsa Indonesia belajar kegiatan produksi modern.

Perkembangan perkebunan dan pabrik secara besar-besaran itu mengenalkan rakyat Indonesia pada sistem produksi modern. Namun, dalam sistem itu partisipasi rakyat Indonesia ketika itu baru sebatas kuli

dan mandor. Meski pun demikian, khususnya para petani lambat laun mengenal cara-cara meningkatkan hasil pertanian atau perkebunan dengan cara tanam yang benar didukung sistem irigasi modern (matroji,2007: 26).

- **Rekomendasi**

“..menghargai peninggalan sejarah, betapapun kelamnya, sama dengan menghargai diri (bangsa) sendiri” (Matroji,2007:23). Demikian ungkap buku sejarah mengawali pembukaan bab ini. sekelam apapun kolonialisme, menghindarinya adalah tidak bijak, sebab itu sama dengan menolak mengenal diri. Diri (bangsa dalam hal ini) adanya tidak dapat dilepaskan dari kenyataan penjajahan selama tiga setengah abad.

Sikap menghargai sejarah bercorak kolonial itu penting, merawat peninggalan budaya dan bangunan fisik sisa kolonialisme, akan membantu kita mengingat sejarah. sementara sejarah selalu seperti dua sisi mata uang. Setiap yang buruk, selalu mengandung kebaikan. Karenanya penting untuk belajar memilah, mengambail kebaikan dari kolonialisme, dan itu adalah modernitas.

4.1.3 Pembentukan Identitas Kebangsaan Indonesia : Nasionalisme Sebagai Koreksi Atas Pandangan Kesukuan Yang Kolot.

Pembentukan identitas kebangsaan dalam buku sejarah bagi kelas 2 SMP, dikatakan berawal dari manifestasi politik 1925. Manifestasi tersebut merupakan tanda dari dimulainya pergerakan non kooperasi dengan penjajah Belanda. Pada tahun 1923, Iwa Kusuma Sumantri pengurus Perhimpunan Indonesia, “mengatakan bahwa dalam upaya mencapai kemerdekaan, bangsa Indonesia harus menempuh jalan non-kooperasi” (Matroji,2007:126).

Berawal dari gerakan politik radikal yang awali oleh Perhimpunan Indonesia, nasionalisme Indonesia dinyatakan sebagai yang bukan Belanda. Berdirinya negara nasional Indonesia hanya mungkin lahirnya dengan menyingkirnya Netherland Indie dari nusantara. Pada kelanjutannya manifestasi politik tersebut

mendorong lahirnya gerakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dari gerakan politik, nasionalisme menjadi gerakan kultural.

- **Definisi masalah**

Bab berjudul “Pembentukan Identitas Kebangsaan” mungkin merupakan bab dengan jumlah halaman paling pendek, tiga lembar saja untuk menjelaskan pembentukan identitas kebangsaan. Hal ini terutama karena bab ini lebih merupakan penegasan akan arti penting sumpah pemuda dan peristiwa yang sebelumnya, sebagai dasar dari identitas kebangsaan Indonesia.

Hal terlihat dari hanya dua sub bab yang ada, yaitu manifestasi politik 1925 dan Sumpah Pemuda 1928. Bagian awal penjelasan mengenai manifestasi 1925, menerangkan mengenai peran Iwa Kusuma Sumantri dan perhimpunan Indonesia dalam upaya menggagas politik non-kooperasi dengan Belanda. Tujuan manifestasi ini terungkap dalam asasnya yang dikeluarkan semasa kepemimpinan Sukiman Wiryo Sanjoyo, sebagai berikut:

- *Hanya Indonesia yang bersatu, dengan menyingkirkan perbedaan-perbedaan golongan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Tujuan bersama yakni kemerdekaan Indonesia, menghendaki aksi masa yang sadar dan berdasar pada kekuatan sendiri.*
- *Peran serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan nasional adalah juga suatu syarat mutlak untuk mencapai tujuan itu.*
- *Anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap masalah politik kolonial ialah pertentangan kepentingan antara si penjajah dengan yang terjajah. Corak politik penjajah untuk mengaburkan dan menutup anasir itu dibalas oleh bangsa Indonesia oleh bangsa Indonesia dengan mempertajam dan menyatakan dengan jelas pertentangan itu.*
- *Karena pengaruh penjajahan sangat merusak dan menimbulkan demoralisasi atas keadaan jiwa dan fisik bangsa Indonesia, usaha normalisasi hubungan jiwa dan materil harus dilakukan sungguh-sungguh*

(Matroji, 2007: 127)

Manifestasi tersebut merupakan awal dari pernyataan Indonesia sebagai bangsa, dengan cara membedakan diri dengan Belanda. Dengan manifestasi politik ini, terlihat ide mengenai Indonesia sebagai bangsa telah terbentuk. Karenanya, politik kooperasi yang lama jadi pedoman dalam perjuangan dinilai tidak relevan. Pasalnya, tidak ada kerjasama bila salah satu pihak masih tidak diakui setara oleh pihak lainnya. Hanya dengan kemerdekaan dan pengakuan sebagai bangsa yang merdeka dari Belanda, mungkin untuk dilakukan kerjasama antar bangsa, selain itu adalah penjajahan.

Hanya dengan menyadari kondisi penjajahan tersebutlah bangsa Indonesia bisa menyadari kesama nasib dan ketertindasannya atas kolonialis Belanda. Para tokoh manifestasi politik 1925, seperti Iwa Kusuma Sumantri dan Sukiman Wiryo Sanjoyo, menilai bahwa Belanda berupaya menutupi kenyataan sosial tersebut, agar bangsa Indonesia tidak menyadari ketertindasannya. Dengan sendirinya, revolusi itu dimulai dengan menyadari ketertindasan, bangkit melawan, baru meraih kemerdekaan.

Sumpah Pemuda dalam narasi buku sejarah adalah kelanjutan dari upaya perjuangan non-kooperasi yang dimulai dengan upaya membangun kesadaran bersama sebagai suatu bangsa. Untuk sampai sana perlu adanya pengorbanan demi meninggalkan politik sektarian dan kesukuan. Berangkat dari perbedaan-perbedaan suku, agama, aliran politik, bangsa Indonesia bersatu dibawah sebuah bendera yang sama dan gagasan yang sama mengenai sebuah negara merdeka. Tulis buku sejarah:

Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dankedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional (Matroji,2007:127-128)

Kesadaran kesukuan merupakan awal dari suatu kesadar yang lebih besar dan luhur, yaitu nasionalisme Indonesia. Langkah itu pertama-tama dimulai dengan perkumpulan yang dilakukan oleh berbagai kelompok etnis seperti Jong Ambon, Jong Java, Jong Minahasa, dan Jong Sumatranen. Hal ini pula dimungkinkan oleh berkumpul berbagai etnis dalam satu lembaga pendidikan yang sama. Perkenal

satu sama lain lewat berbagai medium seperti pendidikan dan pergerakan nasional pada akhirnya mendorong pada kesadaran nasional.

Cita-cita tersebut mula-mula mengemuka lewat kongres pemuda pertama, yang isinya menyerukan untuk persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu wadah, dan untuk itu disiapkan kongres pemuda ke dua. Pada kongres itu juga Mohamad Yamin mulai mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Dari sini kita melihat, bahasa sebagai alat pemersatu telah mulai disadari.

Puncak dari pencapaian kultural dari nasionalisme Indonesia pada akhirnya adalah saat kongres pemuda kedua, yang dikenal kemudian dengan Sumpah pemuda. Dimana akhirnya bahasa Indonesia dan persatuan nasional diteguhkan sebagai bagian dari identitas kebangsaan Indonesia. Selain itu, bendera merah putih dan lagu kebangsaan, juga menjadi bagian dari simbol nasional.

Kongres pemuda II menghasilkan suatu ikrar yang disebut Sumpah Pemuda. Suasana persatuan Indonesia dalam kongres itu semakin kuat dengan diperdengarkannya lagu Indonesia raya oleh Wage Rudolf Supratman dan ditetapkannya bendera Merah Putih sebagai bendera nasional (Matroji,2007: 130).

- **Penyebab Masalah**

Tidak adanya kesadaran nasional dalam benak bangsa Indonesia menjadi penghalang bagi upaya mencapai kemerdekaan. Hal ini terlihat dari kentalnya semangat sektarian atau kesukuan, oleh karena perlu suatu upaya membangun kesadaran nasional. Selain itu, bangsa Indonesia ketika itu menerima penjajahan sebagai suatu takdir yang tidak bisa ditolak. Padahal penjajahan adalah suatu upaya sadar yang dilakukan oleh bangsa Barat demi meraih keuntungan dari hasil alam milik bangsa Indonesia. Dengan sadar pula, para penjajah menutupi pertentangan ini dan tidak menghendaki lahirnya kesadaran nasional pada bangsa Indonesia.

Oleh karenanya, upaya untuk menembus semangat kesukuan menjadi syarat mutlak bagi upaya mencapai kemerdekaan. Hanya dengan menyadari sebagai bagian dari bangsa yang tertindas, bangsa Indonesia dapat mencapai persatuan

nasional, dan merebut kemerdekaan. Seperti diungkap dalam salah satu asas Perhimpunan Indonesia:

Hanya Indonesia yang bersatu, dengan menyingkirkan perbedaan-perbedaan golongan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Tujuan bersama yakni kemerdekaan Indonesia, menghendaki aksi masa yang sadar dan berdasar pada kekuatan sendiri (Matroji, 2007: 127)

- **Penilaian Moral**

Dengan asumsi masalah seperti diatas, pada akhirnya menelurkan penilaian bahwa perpecahan adalah buruk karena menyebabkan penindasan dan dengan sendirinya persatuan adalah baik karena itu membawa kemerdekaan. Lebih jauh, semangat kesukuan dalam sebuah negara republik yang berdasar pada nasionalisme adalah penghambat tercapainya kemajuan. Dengan kata lain, semangat kesukuan adalah masa lalu yang perlu ditinggalkan. Ketika kesadaran nasional telah dibangun, maka segala jenis semangat sektarian dan kesukuan mesti ditinggalan.

Nilai yang tidak kalah pentingnya adalah semangat untuk menerima kolektivitas lebih penting dari individu. Kesadaran untuk bersatu pertama-tama dimulai oleh kemampuan dan kemauan untuk menekan ego individu dan kelompok, untuk tunduk pada kepentingan yang lebih besar. Sehingga persatuan nasional adalah kehendak aktif masyarakat untuk menerima kebangsaan yang lebih besar. *“Peran serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan nasional adalah juga suatu syarat mutlak untuk mencapai tujuan itu (Matroji, 2007: 127).*

- **Rekomendasi**

Komunikasi diantara saudara sebangsa seperti yang dilakukan pada kongres pemuda pertama dan kedua, merupakan syarat mutlak untuk mencapai persatuan dan dengan sendirinya kemerdekaan. Buku sejarah menilai untuk sampai pada kondisi itu, pertama-tama adalah dengan menggabungkan diri pada organisasi-organisasi perjuangan, baik itu organisasi pemuda, pendidikan, ataupun partai politik.

Namun, hal itu terutama mesti ditunjang oleh suatu dasar hidup bersama. Manusia perlu suatu landasan sejarah yang dapat melegitimasi, itulah tepatnya arti penting Sumpah Pemuda. Terlepas itu, apa yang penting dari Sumpah Pemuda adalah kemampuannya untuk menghasilkan bahasa nasional yang menjadi bekal utama persatuan Indonesia. Bahasa menjadi penting sebagai sarana komunikasi, sedangkan komunikasi menjadi alat penting bagi persatuan. Hanya dengan saling mengenal satu sama lain dan tentunya berbicara dengan bahasa yang sama, kelompok-kelompok yang berbeda dapat menemukan nilai-nilai kesamaan yang berguna bagi persatuan.

Terakhir, bahasa menjadi tidak terlalu efektif apabila tidak dijadikan bekal bagi bahan pengajaran diseluruh Indonesia. Itupun tetap penting untuk mengajarkan pada anak didik tentang pendidikan kebangsaan. Seperti pernyataan Taman Siswa, Sarmidi Mangunsarkoro, yang dikutip buku sejarah, “anak didik perlu diberikan pendidikan kebangsaan”(Matroji,2007: 129).

4.1.2 Analisis Paradigmatik

4.1.2.1 Nasionalisme Indonesia: Berkah Kolonialisme Belanda dan Kapitalisme Cetak

Golongan terpelajar yang tumbuh dan berkembang setelah proses pelaksanaan pendidikan Barat merupakan golongan di masyarakat Indonesia yang telah memiliki wawasan baru, yaitu nasionalisme Indonesia. Golongan cendekiawan atau terpelajar sadar bahwa dirinya dalam keadaan yang serba terbelakang. Mereka bangkit membentuk kekuatan sosial baru yang berujung tidak hanya untuk perbaikan nasib dan kesejahteraan, tetapi juga untuk kemerdekaan nasional (Matroji, 2007: 86).

Dengan jelas narasi sejarah nasional mengatakan bahwa nasionalisme merupakan berkah dari pendidikan kolonial. ‘cahaya’ pengetahuan Barat lah yang memungkinkan lahirnya kesadaran nasional. Melalui pendidikan modern ala Barat, intelegensi pribumi terbuka dan mampu mengatasi problem kesukuan yang sempit. Pandangan ini tentu saja mengingatkan kita pada gagasan Antropolog

Amerika bernama Benedict Anderson dalam Magnum Opusnya, yang diberi judul “Komunitas-Komunitas Terbayang”.

Anderson mengatakan dinegara koloni, intelengensi pribumi memainkan peran penting dalam melahirkan negara bangsa modern, karena dalam pandangan Anderson mereka memiliki akses ke”budaya modern Barat dalam pengertian yang luas, dan terutama akses ke modal-modal nasionalisme, kebangsaan, dan negara-negara yang dihasilkan ditempat-tempat lain dalam abad ke sembilan belas” (Anderson, 1991: 116).

Dengan perkataan lain, nasionalisme anti kolonial itu sendiri dimungkinkan dan dibentuk oleh sejarah politis dan intelektual Eropa. Ia merupakan ‘wacana turunan’, suatu model pemberontakan canibalistik yang tergantung pada hadiah bahasa/gagasan dari penjajah (Loomba,2003: 244).

Gagasan sejarah semacam ini mengembangkan suatu model pembacaan sejarah yang linier. Dimana masa lalu dimaknai sebagai kuno dan masa depan sebagai kemajuan. Nasionalisme adalah kemajuan dan pengetahuan pra kolonial sebagai penyebab kegagalan dan penjajahan berkepanjangan. Bias wacana kolonialisme jelas terasa dalam narasi ini.

Golongan terpelajar berusaha keras untuk mengubah pandangan lama yang bersifat kedaerahan dengan pandangan baru yang bersifat nasional. Golongan terpelajar meyakini bahwa cita-cita kemerdekaan baru dapat diwujudkan bila nasionalisme telah tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. Nasionalisme Indonesia merupakan ikatan kekuatan yang kuat bagi semua suku untuk terciptanya persatuan nasional (Matroji, 2007: 86).

Batas-batas suku dan peradaban lama yang menyebabkan kebodohan pun dibongkar oleh cahaya pengetahuan Barat. Cahaya itu adalah nasionalisme dan humanisme modern yang mampu mengatasi semangat kesukauan yang menghambat lahirnya negara bangsa modern. Itulah juga mengapa sub bab dalam bagian ini tidak lagi menggunakan pengelompokkan mereka-mereka yang dikatakan terlibat dalam pembentukan identitas nasional dalam kategori suku. Alih-alih melihat peran suku Jawa, Minang, Palembang, Papua, Sunda, dll, bab ini

memilih melihat dalam kategori yang lebih modern, seperti “Peran Golongan Terpelajar”, “Peran Golongan profesional”, “Peran Pers” dan “Peran Wanita”.

Meskipun pilihan itu tentu saja bersikap kontradiktif dengan tujuan awal pembelajaran yang ingin memberi pemahaman soal tumbuhnya kesadaran dan identitas nasional. Dengan langsung melompat pada narasi mengenai pendidikan Barat yang melahirkan intelektual Indonesia modern dan penolakan mereka terhadap kesukuan. Bab ini seolah mengatakan nasionalisme telah dulu ada disana, bukan tumbuh dan lahirnya (proses kultural) nasionalisme yang jadi fokus utama, akan tetapi pihak-pihak yang membidaninya yang mendapat tempat sentral dalam penceritaan.

Untuk menghindari pembicaraan menyoal kesukuan yang dianggap (kembali pada masa “kegelapan”), sejarah bersembunyi dalam narasi modern mengenai kelompok intelektual modern yang telah tumbuh. Narasi ini sekali lagi menunjukkan kecurigaan yang sinis terhadap identitas etnis. Nasionalisme Indonesia alih-alih dilihat sebagai sesuatu yang tumbuh bersama dan dengan identitas etnis, justru ditempatkan sebagai kontra Hegomoni kolonialisme, sesuatu yang dilahirkan dari penolakan terhadap kolonialisme dan sekaligus dimungkin olehnya. Dan selamanya etnisitas dicurigai sebagai oposisi dari nasionalisme.

Nada yang sama masih mejadi semangat dari sub bab kedua dalam bab ini, yaitu mengenai peran guru dalam lahirnya nasionalisme. dimulai dengan urain mengenai Taman Siswa dan Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan bagi rakyat yang tidak terfasilitasi oleh pendidikan kolonial . Serta sebagai upaya menengahkan kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan, apa yang dinilai tidak ada dalam pendidikan kolonial, yang justru menegaskan hirarki sosial dalam masyarakat kolonial.

Cara yang sama dalam menggambarkan Ki Hajar Dewantara juga dipakai dalam menggambarkan Muhamad Syafei dan INS Kayu Taman. Dikatakan disekolah-sekolah itu diajarkan pengetahuan modern seperti Geografi dan Seni. Tanpa menghadirkan riwayat dari Muhamad Syafei dan Ki Hajar Dewantara dalam narasinya, sejarah nasional mereduksi individu-individu tersebut dari identitas

etnis, agama, dan sosialnya. Dengan cara begitulah manusia Indonesia dibentuk dalam ‘kuali’ sejarah. Sekali lagi etnisitas adalah ancanama, dan meski tidak dikatakan secara tegas, begitu pula halnya dengan agama.

Pada tahun 1928, beberapa tokoh pergerakan nasional mendirikan perguruan rakyat...hal yang menarik dalam proses belajar mengajar ini adalah diupayakan sedapat mungkin menghilangkan hal-hal yang berbau kedaerahan. Secara positif, semua yang diajarkan dikaitkan dengan kebangsaan Indonesia (Matroji, 2007: 87).

Mungkin istilah sejarah nasional yang selama ini dipakai untuk menggambarkan serjarah resmi versi negara memang kurang tepat. Seperti yang digugat oleh Nordholt dan Shutterland lebih tepat dikatakan sebagai ‘sejarah nasionalis’. Sebab, sejarah nasional sesungguhnya menggambarkan satu saja versi sejarah, yaitu versi para nasionalis sekuler. Sejarah nasional menegaskan versi sejarah lokal, Kiri, dan juga Islam. Teks lain dalam buku yang sama menandakan hal ini, seperti terlihat di bawah:

Dalam PPII (Perserikatan Perkumpulan Istri Indonesia) bergabung organisasi-organisasi yang berbeda azas. Ada yang bersifat agama, sosial, dan politik. Ada yang menganut politik kooperasi, dan ada pula yang nonkooperasi. Keberagaman asas organisasi itu membuat keputusan-keputusan yang diambil dalam kongres pada umumnya netral, khususnya dalam masalah agama. Dalam kongres bulan Desember 1930, PPII secara tegas menyatakan bahwa pergerakan wanita Indonesia adalah bagian dari pergerakan bangsa (Matroji, 2007:92).

Ciri ini menurut Bambang Purwanto merupakan metode penulisan sejarah “Indonesia sentris”. Dalam upayanya menghegemoni nasionalisme dalam konfliknya dengan identitas etnis dan agama, negara seolah memusuhi segala yang bernada etnisitas dan memasukannya dalam kategori “masa lalu” yang kini bukan lagi bagian dari ke “Indonesiaan”. Sehingga Indonesia adalah sebuah proses kesadaran menyeluruh yang meninggalkan (jika tidak boleh dikatakan mengabaikan) ragam atribut identitas individu dan kelompok yang menjadi bagian darinya.

Tidak hanya itu, narasi Indonesia sentris dalam sejarah nasional juga ditandai oleh sejarah memberi perhatian yang amat besar pada elit penguasa ketimbang rakyat

jelata. Pilihan untuk menempatkan “Peran Golongan Terpelajar”, “Profesional”, dan lain sebagainya merupakan pengakuan terhadap elit politik. Sejarah pada akhirnya mengabaikan hidup keseharian orang biasa. *Sehingga bagi rakyat jelata istilah ‘sejarah’ menjadi padanan kata ‘bukan kita’*(Nordholt, 2008:16)

Rakyat adalah penonton panggung sejarah yang di isi oleh para pahlawan besar. Raja-raja, elit politik modern, para bangsawan, profesional dan lain sebagainya. Sejarah pada akhirnya menjadi reduktif, ia lebih merupakan monumen-monumen atau prasasti tempat dimana kepahlawanan dituliskan. Dengan menghindari identitas etnis yang beragam dan dianggap mengancam. Sejarah meninggikan modernitas, bahwa keragaman masa lalu itu mengancam peluruhan etnisitas yang kini telah menjadi Indonesia modern.

Gaya narasi tersebut menunjukkan bahwa Sejarah nasional belum juga mampu keluar dari tirani sejarah modern yang dibangun diatas gagasan Hegel yang melihat sejarah seperti arus sungai. Sejarah adalah gerak lurus, yang diawali oleh masa lalu(terkotak-kotak oleh etnisitas) dan hari ini(Indonesia). Dalam narasi sejarah sebagai gerak maju inilah, kolonialisme mendapatkan tempat yang mendua dalam sejarah nasional. Disatu sisi, ia merupakan penindasan yang dibenci namun disisi yang lain adalah berkah yang melahirkan kesadaran nasional dan menghantarkan cahaya pengetahuan Barat yang mengeluarkan segenap bangsa Indonesia dari “kegelapan” masa pra kolonial.

Dengan mengingkari berbagai bentuk identitas yang telah ada sebelum nasionalisme menjadi ‘kebenaran’ (lahirnya negara bangsa modern). Nasionalisme Indonesia kehilangan bentuk khasnya, sehingga ia tidak lebih merupakan turunan atau merupakan aplikasi dari bentuk modular nasionalisme yang berkembang di Eropa dan di impor ke dunia terjajah melalui proses kolonialisasi.

Penjajahan selama tiga setengah abad seolah-olah dikatakan sebagai sebuah proses yang diperlukana untuk melahirkan ke Indonesian. Narasi ini sama saja dengan histografi kolonial, yang ironisnya justru ditulis untuk melegitimasi penjajahan, yang mengatakan bahwa koloniaisme Belanda di Nusantara adalah

keniscayaan sejarah. Sesuatu yang bahkan dikatakan diperlukan bagi proses pengadaban “bangsa-bang timur yang biadab”.

Pernyataan Anderson yang menilai nasionalisme adalah sebagai model politik paling absah untuk abad 20, kembali di ulang dalam buku sejarah untuk SMP, “*Golongan terpelajar berusaha keras untuk mengubah pandangan lama yang bersifat kedaerahan dengan pandangan baru yang bersifat nasional*” (Matroji, 2007: 86). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, gagasan ini merupakan aplikasi dari filsafat sejarah Hegel, yang memandang Sejarah sebagai gerak lurus. Dunia berkembang dengan cara menyempurnakan diri dalam sejarah. Justru inilah yang ditolak oleh Foucault. Menurut Foucault tiap periode mempunyai episteme, pandangan dunia (*worldview*) atau struktur konseptual yang berbeda. satu dengan lainnya tidak dapat dipakai sebagai alat ukur sebuah keadaban. Melihat sejarah (masa lalu) dengan kerangka hari ini sama saja dengan “memperkosanya”.

Operasi kuasa/pengetahuan seperti ini pula yang kemudian melahirkan sejarah yang ditulis dengan kerangka hari ini. Sejarah nusantara yang ditulis dalam kerangka ke Indonesiaan kemudian mengabaikan fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa Gadjah Mada, Majapahit, Diponegoro, dan Imam Bonjol tidak sedang memperjuangkan Indonesia ketika mereka melawan kolonialisme atau bahkan dalam kasus Majapahit dan Gadjah Mada, justru apa yang dikatakan selama ini sebagai penyatuan nusantara adalah justru bentuk kolonialisme itu sendiri. Kenyataan semacam ini tidak mungkin masuk dalam sejarah yang ditulis dengan semangat nasionalisme. Sejarah yang membangun identitas nasional dengan menunjuk kolonialisme dan para kolonialis sebagai “Liyen”.

Buku sejarah menghabiskan lembar demi lembarnya menjabarkan periode kolonialisasi dan pelbagai penderitaan yang di alami rakyat. Upaya perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari belenggu kolonial. Berbagai jenis perlawanan mulai dari perlawanan bersenjata, perlawanan intelektual dengan organisasi modern. Dan pada akhirnya upaya pemerintah kolonial mengagalkan perjuang bangsa Indonesia. Semua itu hanya untuk mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti kolonial dan lahir dari episode tragis sejarah penindasan kolonial selama berabad-abad.

Kesulitan nasional untuk keluar dari cara penulisan sejarah yang mendemonisasi kolonialisme berakibat terhadap gagalnya sejarah untuk memberi tempat pada apa yang hari ini mungkin lebih bermakna bagi hidup kita. Seperti sejarah kelautan, pertanian, dan sejarah lokal yang dapat isi oleh orang-orang biasa. “...sejak 1959 Indonesia menyaksikan kelahiran lebih dari 100 pahlawan nasional yang sebagian besarnya adalah laki-laki golongan elit kelahiran Jawa” (Nordholt, 2008: 14). Sejarah nasional pada akhirnya terjebak pada gaya penulisan histografi kolonial. Apa yang membedakan histografi nasional dan kolonial tidak lain adalah moralitas yang mendsarinya, metode dan paradigmanya seperti yang dikatakan oleh Shutterland sesungguhnya identik.

Versi arus utama Belanda mengenai sejarah Hindia-Belanda mengagungkan pasifikasi dan kemajuan. Sebaliknya, narasi nasionalis berpusat pada perjuangan untuk mewujudkan negara demokrasi sekuler yang berakar dalam identitas bersama(dan baru)...Kedua sejarah itu sebagian besarnya identik antara satu sama lain, meskipun penilaian moralnya sama satu sama lain berbeda. Hal yang dilukiskan sebagai keburukan (kejahatan atau fanatik) dalam narasi Belanda menjadi versi kepahlawanan dalam versi nasionalis(perjuangan tanpa pamrih). Namun, fokus utama tetap sama , yakni negara dan pengalaman kolonial. Sebagaimana Belanda, kaum nasionalis juga mencari legitimasi dengan cara menjanjikan pembangunan(Shuterland,2008: 40)

4.1.2.2 Bahasa dan Aksara Yang Terlupa: Teknologi, Modernitas, dan Nasionalisme.

Pada sub bab kedua dalam bab 8 buku sejarah karangan Matroji diberi judul “Bahasa dan Identitas Bangsa”. Uraian dimulai dengan penjelasan mengenai bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa yang dipakai penduduk nusantara semenjak berabad-abad lampau. Dengan bagus dijelaskan bahwa bahasa Melayu merupakan bahasa perdagangan dibandar-bandar Nusantara. Bahasa Melayu baru dijadikan sebagai bahasa yang penggunaannya lebih luas dari sekedar kepentingan dagang adalah ketika mulai masuknya modal-modal swasta seiring dengan berkembangnya politik etis di Nusantara.

Didorong oleh kebutuhan akan tenaga kerja lokal untuk menjadi pekerja di perkebunan-perkebunan yang baru dibuka, pendidikan kolonial mulai menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam proses pendidikan untuk mencetak pegawai rendah (juru tulis atau mandor perkebunan). Dijelaskan pula, meski pendidikan kolonial mengadopsi bahasa Melayu bukan berarti bahasa Melayu mendapat tempat yang terhormat, karena penggunaannya sebatas pada sekolah tingkat rendah, sementara bahasa Belanda digunakan dalam pendidikan dengan tingkat lebih tinggi. Pendidikan kolonial tidak lain tetap mempertahankan hirarki yang telah dibangun dalam kehidupan sosial.

Semenjak politik etis, bahasa Melayu mulai menjadi bahasa untuk berkomunikasi bagi para intelektual hasil politik etis yang bergerak dalam organisasi-organisasi kebangsaan. Perlahan bahasa Melayu mendapatkan tempat dalam pergerakan, tidak lagi sekedar bahasa perdagangan, akan tetapi nasionalisme yang baru tumbuh juga mendapatkan pengungkapannya dalam bahasa itu.

Salah satu tokoh pergerakan yang gemar menggunakan bahasa Melayu adalah Muhammad Yamin dan pada kongres sejarah yang pertama ia pun mengajak berbagai golongan pemuda untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan,

Sedangkan Mohamad Yamin membahas masalah persatuan bangsa yang ditinjau dari sudut sejarah. Dia memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam bahasa, kemaun, nasib, dan faktor yang mempersatukan bangsa Indonesia, yakni sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemaun. Pada akhirnya pidato Mohammad Yamin mengatakan bahwa kebangsaan Indonesia beralas persatuan sedangkan persatuan bersendi pada kemaun (Matroji, 2007: 129-130).

Meski berbicara dalam konteks yang lebih besar. Dalam pidatonya, Yamin menegaskan bahwa bahasa Melayu adalah salah satu pilar nasionalisme Indonesia. Buku sejarah sekolah meminjam argumentasi Yamin, untuk memberi landasan historis bahwa bahasa Melayu telah lama menjadi bahasa pergaulan di nusantara. Dengan kata lain, cikal bakal persatuan telah lama ada, hanya menunggu untuk ditemukan, atau dibangkitkan kembali. Dalam kosa kata yang lain disadari. Kesadaran akan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, meski pada awalnya hanya bahasa suku Melayu, kemudian diresmikan melalui Sumpah Pemuda 1928.

Sumpah Pemuda merupakan konsensus nasional dimana Bahasa Melayu diakui dan diterima oleh berbagai golongan sebagai bahasa Nasional, seperti terurai dalam narasi dibawah ini:

Peristiwa sumpah pemuda 28 Oktober 1928 merupakan penegasan yang nyata akan perkembangan bahasa dan identitas bangsa. Rumusan sumpah pemuda jelas menunjukkan bahasa Melayu yang tadinya hanya digunakan oleh suku Melayu, dinyatakan sebagai bahasa Indonesia. Begitu pun sumpah satu nusa dan satu bangsa yaitu Indonesia, merupakan peresmian adanya nasionalitas Indonesia, produk dari nasionalisme yang telah berkembang semenjak permulaan abad ke-20 (Matroji, 2007: 94).

Seiring dengan berkembangnya bahasa Melayu sebagai bahasa Perlawanan anti kolonial dan itu berarti bahasa Melayu adalah ‘anak kandung’ nasionalisme Indonesia. Bahasa Melayu adalah senjata bagi organisasi-organisasi kebangsaan untuk mengkampanyekan berbagai program nasionalisme dan menyeru kepada suatu kesadaran dan persatuan nasional. Disaat yang bersama buku sejarah seolah melupa pada peran Balai Pustaka yang pertama kali membakukan bahasa Melayu menjadi bahasa yang terstruktur dan dapat diaplikasi bagi penerbitan.

Pada bagian terakhir dalam uraian mengenai bahasa dan identitas bangsa, Balai Pustaka memang sempat di bahas. Dikatakan bahwa Balai Pustaka merupakan perusahaan penerbitan yang didirikan oleh pemerintah kolonial untuk menyediakan bahan bacaan bagi rakyat Indonesia. Namun, fakta yang disodorkan seolah mengerdilkan peran Balai Pustaka yang lebih luas dalam sejarah, dan bagaimana teknologi penerbitan ikut melahirkan identitas nasional, terutama kaitannya dengan pembakuan bahasa Melayu.

Fakta sejarah menunjukkan usaha pembakuan bahasa-bahasa daerah yang ada di tanah air terutama sekali bahasa Melayu diantaranya dilakukan oleh *Komitie voor de volkslectuur* yang didirikan pada tahun 1908. Komite inilah yang kemudian dikenal sebagai Balai Pustaka, dari komisi yang menjadi asalnya itu tampak bahwa tujuan dari penerbitan pemerintah itu didirikan dengan tujuan menghasilkan bahan bacaan bagi rakyat kebanyakan di tanah air.

Akan tetapi, sebagai perusahaan penerbitan. Balai pustaka tidak hanya menerbitkan buku, sebagai konsekuensi dari perlunya standarisasi yang

diharapkan oleh percetakan mereka perlu juga mengkodifikasi bahasa yang akan digunakan dalam buku-buku yang mereka terbitkan. Sebagai penerbitan milik pemerintah kolonial, Balai Pustaka hanya menerbitkan buku-buku dalam bahasa Melayu, yang menggunakan apa yang disebutnya sebagai bahasa “Melayu tinggi”. Bahasa yang kemudian hari dikenal sebagai bahasa nasional Indonesia. Hal ini jugalah yang memungkinkan tumbuh suburnya pers nasional

Percetakan menuntut pembakuan dan pengkodefikasian bahasa sehari-hari, dan kadang-kadang bahkan menciptakan se bentuk bahasa baru. dengan kata lain melalui percetakan, identitas bahasa yang dalam konteks ini bahasa Melayu diperkuat diantara bahasa-bahasa lainnya di tanah air. Dengan sendirinya penutur dan pembaca bahasa Melayu yang ketika itu telah meliputi seluruh wilayah Nusantara, juga ikut terbawa serta.

Sejalan dengan masuknya teknologi modern dan paham-paham baru ke Indonesia pada abad ke-19, dunia pers (media massa) di Indonesia mulai berkembang...Dengan surat kabar atau majalah itu, tiap organisasi kebangsaan memasyarakatkan, mengkampanyekan, dan mempropagandakan program-program organisasi, pandangan tentang nasionalisme Indonesia, serta kritik terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Sehingga, berdirinya berbagai organisasi kebangsaan menandai kebangkitan pers di Indonesia(Matroji,2007: 88).

Terlebih dari isi pesan yang dikandung produk percetakan seperti Koran, Majalah, ataupun Buku sebagai sebuah medium telah menyampaikan satu nilai tersendiri. Sebagaimana yang dikatakan Mikihiro Moriyama, buku menata kembali pandangan masyarakat Bumiputra mengenai dunia, keseragaman yang ditampilkan lewat hasil cetakannya mengingatkan akan homogenitas pengguna bahasa yang sama. Kesadaran akan sebagai suatu komunitas tertentu mulai terbentuk.

Tata letak (Layout) dan bentuk-bentuk penyajian buku itu memaksa pembaca menata kembali asumsi dan konsep mereka, sementara isi buku memandu mereka membuat penafsiran baru tentang dunia ini (Moriyama, 2005: 107)

Sebelum kedatangan Belanda ke tanah air Masyarakat Bumiputra memiliki kebiasaan membaca manuskrip. Manuskrip merupakan alat tradisional dalam

proses pendidikan di tanah air, seperti yang dilakukan di Madrasah dan Pesantren. Guru –Guru membacakan Manuskrip dan murid-muridnya mengikuti dengan lantang. Mengenai hal ini Van der Chijs seorang pengawas pendidikan untuk Bumiputra mengatakan: “Penduduk Bumiputra tidak tahu cara membaca dalam hati” (Chijs 1867b:7, dalam Moriyama, 2005:94).

Membaca dalam hati merupakan satu hal yang hanya bisa dilakukan dengan buku, karena manuskrip jumlahnya tidak banyak, tidak setiap orang memiliki manuskrip. Sedangkan buku jauh lebih banyak jumlahnya sehingga setiap orang bisa memilikinya dan itu artinya setiap orang dapat membaca sendiri-sendiri di dalam hatinya.

Tradisi membaca manuskrip tidak punah biarpun telah muncul buku-buku cetak yang dihasilkan teknologi yang dibawa penjajah . Yang terjadi adalah berubahnya kebiasaan membaca, hasilnya adalah “keseragaman melalui percetakan menegaskan kecenderungan untuk memperkuat kesatuan komunitas bahasa” (Moriyama, 2005: 106).

Buku hasil produksi cetak penampilannya sama, hurufnya hasil cetaknya sama persis pada setiap halaman, berbeda dengan manuskrip yang bisa berlainan. Dengannya, mulai timbul praktik-praktik budaya baca-tulis yang baru, “yang menciptakan pola-pola solidaritas dan rasa sebagai kelompok yang mulai mempertanyakan otoritas manuskrip” (Moriyama 2005: 107).

Pertanyaan itu bukan sekedar mengenai keabsahan, melainkan suatu pertanyaan yang menandakan bergesernya epistem lama pada epistem baru yang sedang tumbuh sebagai semangat zaman. Manuskrip melambangkan episteme feodal pra kolonial, sementara buku memawakili modernitas yang sedang menajdi primadona dan mendampingi lahirnya nasionalisme Indonesia.

Semangat yang sama pulalah yang menegtengahkan bahasa Melayu yang semenjak awal dinilai wakili cita-cita Indonesia merdeka. Suatu semangat persaudaraan egaliter yang berupaya meniadakan hierarki tatanan sosial pra kolonial (yang dilanggengkan semasa kolonial). Karena itulah bahasa Melayu

dipilih untuk mewakili semangat ini. seperti yang diungkapkan salah satu tokoh Nasional, Muhamad Yamin, pada kongres bahasa pertama.

Dengan demikian inilah juga yang menjadi salah satu alasan utama, mengapa bahasa Melayu sangat cocok bagi kegiatan ilmu pengetahuan dan untuk prosa dan puisi modern. Ketakutan bahwa bahasa ini tidak cocok bagi pergaulan sesama orang Indonesia kelihatannya tidak beralasan, dan walaupun anggapan ini kurang tepat maka bahasa Melayu sampai sejauh ini masih menjadi pilihan (dibandingkan dengan) bahasa-bahasa daerah yang ada. Pengetahuan bahasa Melayu akan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berhubungan dengan orang Jawa, Sunda, Melayu, dan Arab dengan bahasa mana mereka mengadakan perundingan.....disamping itu saya yakin seyakin-yakinnya, bahwa bahasa Melayu lambat – laun akan menjadi bahasa pergaulan dan bahasa persatuan yang ditentukan untuk orang Indonesia, dan kebudayaan Indonesia masa depan akan mendapatkan pengungkapannya dalam bahasa itu.....(Dhakidae, 2003: 122).

Argumentasi yang disampaikan Jamin adalah bahwasanya bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling tepat untuk menyongsong era modern yang ditandai oleh berkembangnya ilmu pengetahuan. Fakta bahwa Bahasa Melayu hadir hampir disetiap titik di Indonesia dan bahasa Melayu muncul sebagai dialek lokal yang lincah, bahasa itu selain kaya dalam berbagai kosakata juga mudah menyesuaikan diri dengan ide-ide dan suasana baru.

Kongres pemuda yang pertama ini memberikan pengaruh yang besar pada kongres kedua karena hasil yang dirumuskan oleh kongres pertama ini diajukan pada kongres kedua pada tahun 1928 yang mejadi bahan utama bagi apa yang kelak dikenal sebagai Sumpah Pemuda, termasuk keputusan menyoal bahasa Melayu sebagai bahasa nasional.

Namun ada satu hal yang dilupakan buku sejarah hari ini dan ikrar pemuda yang dilakukan pada 28 Oktober 1928 itu, yaitu aksara. Sumpah Pemuda berbicara soal bahasa Melayu sebagai bahasa nasional tanpa sama sekali memperbincangkan aksara nasional, kenyataan ini menunjukkan bahwasannya aksara latin telah diterima demikian luasnya, hingga tidak ada individu atau kelompok yang mempermasalahkannya sama sekali.

Hal ini sekaligus mengingatkan akan pengaruh modernitas yang telah mengakar begitu dalam hingga menyingkirkan aksara Pegon (bahasa Melayu yang dituliskan dengan aksara Arab) yang tadinya merupakan alat tulis menulis yang digunakan oleh penduduk Bumiputra. Aksara sebagaimana bahasa merupakan alat ideologi yang penting, tanpa aksara yang berasal dari budayanya sendiri, niscaya suatu bangsa akan menghadapi kesulitan untuk memahami sejarahnya.

Buku sejarah hari ini yang juga ditulis dengan metode kolonial juga rupanya melaupakan hal ini. ini juga terutama diakibatkan oleh beban berat ideologi untuk dengan segera mengatakan pada anak didik, bahwa bahasa mereka adalah bahasa Indoensia, yang telah ada lebih dulu dari kolonialisme dan menjadi senjata perlawanan yang membebaskan nenek moyang mereka dari penindasan kolonial. Semangat yang jauh-jauh hari telah keluar dari mulut Muhamad Yamin.

Bahasa Melayu sastra sudah mengalami masa jayanya yang pertama beberap ratus tahun yang lalu, sehingga memenuhi kerinduan kita orang Melayu untuk memaklumkan zaman emasnya yang kedua. (Dhakidae, 2003 :114).

Upaya untuk terus menelusuri keaslian identitas nasional rupanya telah mengorbankan sejarah menjadi sekedar tempat pengelohan ideologi politik yang mendasarkan dirinya pada masa lalu. Sejarah adalah tempat dimana kita “berkubang” dalam masa lalu, yang tugasnya hanya melegitimasi keberadaan kita yang sah, yang merupakan pengulang dari persatuan yang telah lebih dulu ada. Dan pandangan semacam ini hanya mungkin di operasikan oleh jenis sejarah yang metodenya dipinjam dari histografi kolonial yang pandangan moral dan tujuannya telah dirubah oleh sejarah “nasionalis”(bukan sejarah nasional). Kronologi berpikirnya digambarkan oleh Nordholt dibawah ini:

...‘cahaya’ era keemasan prakolonial-yang sudah mengandung ‘inti’ identitas nasional diiukti oleh ‘kegelapan’ dari kekuasaan dan penindasan kolonial; perjuangan heroik yang mencapai puncaknya pada ‘kebangkitan’ nasional dan perjuangan revolusi akhirnya menghasilkan kebebasan dan kemerdekaan (Nordholt, 2008: 11).

4.1.2.3 Dibawah Bayang-Bayang Kolonialisme: Sejarah Yang Berupaya Memisahkan Diri

Perjumpaan kolonial selalu merupakan pengalaman yang menyakitkan. Bukan hanya karena darah dan nyawa yang harus dibayar dalam upaya memeluk kebebasan. Melainkan, selalu menyisakan pengalaman psikologi dan kultural yang pahit untuk menyatakan pemisahan. Butuh keberanian yang besar bagi setiap bangsa untuk mengatakan dirinya mewarisi jejak-jejak kolonialisme yang kini menjadi bagian integral dalam pranta sosial dan kulturalnya.

Bab 3 buku sejarah nasional untuk kelas 8 yang berjudul “Peninggalan Sejarah Bercorak Kolonial”, merupakan bentuk upaya pemisahan diri dan sekaligus pengakuan akan jejak kolonialisme yang kini hidup ditengah bangsa Indonesia dan menjadi bagian tidak dapat terpisahkan dari hidup kesehariannya. Karenanya, langkah ini layak dibilang sebagai keberanian sejarah untuk memeriksa dirinya sendiri. Namun, sayangnya seperti akan ditunjukkan pada uraian dibawah nanti, keberanian itu lebih merupakan suatu upaya mengisolasi sejarah kolonial sebagai bentuk-bentuk peninggalan berupa prasasti dan ritus, yang dikongkan dari pengalaman dan pergulatan sejarah nyata orang-orang yang hidup dan menjadi bagian darinya. Bukan sebagai upaya reflektif untuk menguji sejarah itu sendiri dan mengenali diri (bangsa), sebagaimana dikatakan pada bagian awal bab ini, tujuan pembelajaran bab ini adalah:

Dibandingkan Hindu-Budha dan Islam, kebudayaan Barat mewariskan banyak peninggalan sejarah. Sayang sekali banyak peninggalan itu berada dalam keadaan terbengkalai. Dengan mempelajari bab ini kita diajak untuk bersikap bahwa menghargai peninggalan sejarah, betapun kelamnya, sama dengan menghargai diri (bangsa) sendiri. (Matroji, 2007: 23)

Barat dikatakan mewariskan peninggalan sejarah lebih banyak ketimbang Hindu-Budha ataupun Islam. Kalimat tersebut rupanya merupakan legitimasi dari kalimat berikutnya, yang mengatakan, meski pun periode sejarah kolonial itu merupakan bagian kelam dari sejarah bangsa, hanya dengan menghargai dan merawatnya, kita bisa menghargai diri sendiri.

Pertama-pertama, buku sejarah sekolah mendefinisikan apa saja yang dikatakannya sebagai bentuk-bentuk warisan sejarah kolonial. Imperialisme Barat selama tiga abad dikatakan mewariskan banyak hal pada bangsa Indonesia. Barat dalam hal ini diberi penekanan khusus sebagai “Belanda”, dengan argumentasi Belanda adalah bangsa paling lama berkuasa di Nusantara. Peninggalan Belanda di tanah air, dikatakan meliputi aspek fisik, psikologis, politik ataupun budaya.

Pada penjabaran berikutnya, Anehnya peninggalan psikologis tidak dibicarakan. Peninggalan Psikologi seolah hanya kata yang tidak perlu dijelaskan kecuali sebatas “peninggalan psikologis muncul dalam kenyataan masyarakat kita, baik politik maupun budaya” (Matroji, 2007: 24). Disinilah mulai terlihat cara sejarah menghindari dirinya dari upaya reflektif. Mengurai sejarah mental bangsa Indonesia yang bercorak kolonial, mau tidak mau memaksa sebuah kerja evaluasi terhadap cara kerja sejarah itu sendiri. Hal ini menandakan bahwa sejarah masih juga menghindari kompleksitas kenyataan.

Demi mempermudah penjelasan dan melokalisasi ingatan menjadi sekedar tempat penyimpanan seperti halnya “hardisk”, tanpa perlu menggantinya hal-hal yang justru mengajak kita mempertanyakan tujuan bab ini, yaitu menghargai sejarah demi mengenal diri (bangsa). Itulah mengapa pada pendefinisian budaya dalam bab ini diidentikan dengan peninggalan seperti gedung-gedung klasik bekas pemerintah kolonial Belanda, benteng-bentengnya, jembatan dan bangunan lain yang bernilai sejarah. Budaya pun direduksi menjadi situs-situs fisik, mirip dengan definisi budaya gaya orde baru yang tertera dalam buku pelajaran antropologi, yaitu kesenian daerah, bahasa, upacara adat, dan ritus lainnya. Pada akhirnya seperti dikatakan Niles Mulder, budaya dimuseumkan persis seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Pendefinisian semacam itu, akhirnya membuat kita kesulitan memisahkan warisan budaya kolonial dan peninggalan fisik, yang didalamnya juga meliputi hasil pembangunan seperti jaringan transportasi dan telekomunikasi. Dengannya, budaya menjadi sekedar objek, bukan gugus pengetahuan ataupun filosofi yang menentang pada kita serangkaian praktek dan keyakinan yang berlaku dalam keseharian masyarakat. Hal yang berbeda justru terjadi pada pendefinisian

warisan kolonial di bidang politik. Peninggalan politik kolonial, didefinisikan buku sejarah sebagai sisa administrasi kolonial, dengan contoh pembagian provinsi dan struktur pemerintahan.

Sampai pada tahun 1930-an, Nederlands Indie terbagi menjadi 22 wilayah administratif. Pembagian paling kompleks terdapat di Sumatra dan Jawa. Kalau kita menyimak pembagian provinsi beserta batas-batasnya, tampak sekali pengaruhnya pada pembagian provinsi untuk Indonesia sekarang ini (Matroji, 2007: 26).

Sepanjang uraian mengenai peninggalan sejarah berbasis kolonial, penejelasan mengenai warisan politik kolonial dan ekonomi, satu-satunya penjelasan yang memiliki implikasi langsung pada kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia. Dengan menyebut bahwa batas geografis dan administratif yang sekarang dipraktekan sebagai warisan kolonial, sejarah mengajak pembacanya untuk merelasikan hidup hari ini dengan kelampauan. Satu hal yang tidak ditemukan dalam penjelasan mengenai budaya dan psikologis. Keduanya lebih dilihat sebagai potret dari masa lalu yang usang dan tidak lagi beralasi dengan hidup kita sekarang.

Berikutnya pada peninggalan dibidang ekonomi dikatakan bahwa kolonialisasi Barat telah mengenalkan bangsa Indonesia pada sistem produksi modern. Penjelsan mengenai hal ini dalam buku sejarah kelas delapan masuk dalam sub bab mengenai “peninggalan ekonomi”. Penjelasan diawali dengan berlakunya undang-undang agraria pada tahun 1870 yang bertujuan mengembangkan perekonomian di Nederland Indie agar seimbang dengan Eropa. Keseimbangan ini dinilai perlu agar terjadi hubungan ekspor impor yang sehat diantara keduanya, sesuai dengan asas liberalisme yang sedang berlaku diperiode Etis.

Perkembangan perkebunan dan pabrik secara besar-besaran itu mengenalkan rakyat Indonesia pada sistem produksi modern. Namun, dalam sistem itu partisipasi rakyat Indonesia ketika itu baru sebatas kuli dan mandor. Meskipun demikian, khususnya para petani lambat laun mengenal cara-cara meningkatkan hasil pertanian atau perkebunan dengan cara tanam yang benar didukung sistem irigasi modern (Matroji, 2007: 28)

Segala jagon kemajuan pertanian dan perkebunan yang dikenal hari ini, seperti intensifikasi dan diversifikasi direlasikan oleh sejarah nasional sebagai warisan kolonial. Dengan memahami teks diatas, kita diajarkan mengerti kemajuan sebagai cahaya pengetahuan Barat, yang tentu saja tidak diberikan secara cuma-cuma melainkan hasil sebuah proses kolonialisasi yang panjang dan menyakitkan. Pengetahuan itu pun, disebut perlahan oleh bangsa Indonesia yang mengalami penindasan ekonomi yang panjang. Dalam penindasan manusia Indonesia belajar.

Pada konteks ini, buku sejarah menunjukkan bahwa warisan kolonial berupa birokrasi modern (provinsi) dan sistem produksi modern, merupakan sesuatu yang hidup dengan kita hingga hari ini. Sejarah mengetengahkan masa lalu kolonial dalam kontesk ini, sebagai sesuatu massa yang juga beririsan dengan kekinian.

Terkait hal ini, lebih kentara ketika buku sejarah sekolah karangan Matroji, memasukan dalam kategori politik apa yang disebut dengan reorgansiasi desa. Reorganisasi desa dibicarakan dalam kerangka *cultuurstelsel*. Tujuannya dikatakan demi mengawasi pemberlakuan tanam paksa agar efektif. Reorganisasi desa dijalankan dengan menyatukan desa-desa kecil ke dalam suatu kesatuan produksi yang lebih besar. Dengannya pemerintah kolonial dapat menguntungkan yang lebih besar dari teknik pengaturan gugus produksi tersebut.

Apa yang menarik dari uraian mengenai reorganisasi desa adalah dimunculkannya mudik sebagai dampak dari praktek tersebut yang hingga kini dapat kita rasakan.

Dampak dari reorganisasi desa paling terasa di Pulau Jawa. Penduduk yang tadinya bebas berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain harus terikat ke desanya. Penduduk dilarang keluar dari desanya tanpa izin resmi. Dampak ini masih terasa sampai sekarang seperti pada gejala mudik (pulang ke kampung halaman)(Matroji, 2007:27)

Meski tidak disampaikan secara langsung, buku sejarah telah mengasosiasikan mudik sebagai suatu warisan kolonial yang dihasilkan lewat suatu praktek disiplin populasi (reorganisasi desa). Hanya saja buku sejarah berhenti pada tahap ini, buku karangan Matroji tidak melanjutkan analisisnya untuk menjawab apa hubungan reorganisasi desa dengan praktek mudik hari ini? jika saja pertanyaan mampu dijawab, maka mungkin bisa saja kita mengatakan bahwa pada bagian ini tersisa suatu potensi resistensi dalam teks. Tidak menjawab pertanyaan tersebut

tentu saja meninggalkan suatu lubang yang besar dalam upaya menjelaskan sejarah sebagai bagian yang tidak terpisah dengan hari ini.

Lubang tersebut mungkin juga jadi peluang bagi guru atau siswa untuk mengelaborasinya, semua tergantung pada tataran dilevel praktek. Namun, seperti telah dijelaskan pada bab 1 yang terdahulu, penelitian ini tidak bermaksud memberi penjelasan mengenai praktek pembacaan sejarah. Sebaliknya justru bermaksud mengurai bagaimana kerja sejarah dalam membangun identitas nasional.

Setelah penjelasan agak panjang mengenai perlbagai bentuk peninggalan sejarah bercorak kolonial. Uraian pada bab 3 ditutup dengan soal tanya jawab, yang salah satu pertanyaanya “hal-hal apa yang bisa kamu petik dari peninggalan-peninggalan sejarah tersebut?”. Rasanya, jawaban terhadap persoalan tersebut, cukup tergambar jelas dalam uraian-uraian sebelumnya.

Satu hal yang dapat disimpulkan dan amat kentara dalam penjelasan-penjelasan mengenai sejarah bercorak kolonial adalah pemisahan antara sejarah sebagai narasi mengenai peninggalan yang fisik dan sejarah sebagai psikologi dan budaya. Perbedaan ini nampaknya sengaja dilakukan untuk membersihkan ruang sejarah dari warisan mental kolonialismenya.

Pengakuan keunggulan Barat diakui sejauh itu menyangkut politik, teknologi, dan biroksasi modern, diluar itu, sejarah seolah ingin mengatakan bahwa bangsa Indonesia tidak berhutang. Dengan metode pemisahan inilah identitas nasional dipancarkan diatas gagasan mengenai warisan kolonial sebagai objek-objek dan ritus. Secara sosial, dan klultural bangsa Indonesia bersifat otoritatif bahkan dihadapan kolonialisme Barat.

Dengan menunjuk geografi, gedung, struktur pemerintahan, sejarah mengisolasi manusia Indonesia dari dampak sejarah dan upaya membangun masa lalu yang reflektif. Strategi semacam ini, cara untuk mempertahankan budaya nasional dan identitasnya. Seperti yang diungkap Chatterjee bahwa jauh sebelum upaya perjuangan merebut kemerdekaan secara politis, nasionalisme-nasionalisme anti

kolonial mencoba menciptakan apa yang disebutnya sebagai “domain kedaulatannya sendiri di dalam masyarakat kolonial”.

Ini dilakukan dengan cara memahami dunia sebagai dua lingkungan berbeda, pertama lingkungan material yang mencakup ekonomi, tatanegara, sains dan teknologi, dan kedua domain dalam dunia yang spiritual (agama, adat, dan keluarga). Keunggulan Barat diakui sejauh itu dalam ranah Material, namun dalam ranah spiritual, kebudayaan nasional dipertahankan. Modus inilah yang rupanya bekerja dalam gaya penulisan sejarah sebagaimana yang tampak dalam bab 3 buku sejarah nasional untuk kelas 8.

4.2 Analisis Sosio kultural

Untuk memahami pergeseran pandangan mengenai sejarah dan identitas nasional di era Reformasi, diperlukan pemahaman mengenai rezim sejarah di masa Orde baru dan awal kemerdekaan. Sehingga kita memiliki peta yang memadai untuk melihat diskursus sejarah hari ini. termasuk pertarungan gagasan sejarah setelah runtuhnya orde baru, satu hal yang belum banyak menjadi perhatian para sarjana ilmu sosial. Meskipun sejarah di era reformasi tidak lagi terlah dikuasai oleh negara, namun bukan berarti dalam sejarah tidak ada rezim. Rezim yang kini lebih dominan ketimbang negara adalah rezim pengetahuan yang mendominasi tafsir terhadap sejarah.

Umum diketahui, lembaga seperti KITLV dan Universitas Cornell telah lama menjadi pusat studi Indonesia yang berpengaruh, tidak hanya di luar negeri namun juga dalam perumusan sejarah nasional. Tulisan Benedict Anderson dan George Kahin mengenai Nasionalisme serta para sarjana Belanda sebelum kemerdekaan, meninggalkan jejak yang belum juga tampak akan memudar. Gagasan kapitalisme cetak sebagai pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia sampai saat ini menjadi satu-satunya penjelasan terhadap lahirnya semangat kebangsaan. Begitu juga dengan pembagian periode sejarah, pra kolonial, kolonial, dan kemerdekaan sebagai mana yang selama ini diusung sarjana Belanda, masih menjadi pembabakan yang juga digunakan dalam kurikulum nasional dan penulisan buku

sekolah. Oleh karenanya, konteks historis dan level mikro analisis (buku sekolah) tidak dapat dilepaskan satu sama lain.

Praktek kuasa/pengetahuan dalam operasinya, bergerak dalam semua level kehidupan. Karenanya, bagi peneliti, pembagian tiga level analisis seperti yang di prasyaratkan Fairclough bukanlah bagian-bagian yang terpisah. Ketiganya mesti dilihat sebagai suatu bagian yang terikat satu sama lain. Level mikro merefleksikan gagasan identitas yang terbentuk dalam level makro, dan begitu juga sebaliknya.

4.3.1 Semangat Renanian dalam Kongres Sejarah

Jauh sebelum sejarah nasional Indonesia dibicarakan secara resmi, berbagai gagasan mengenai bagaimana seharusnya sejarah dibicarakan atau dimaknai, hal ini misalnya ditandai oleh berbagai pernyataan para pakar politik seperti Soekarno, Tan Malaka, dan Hatta. Tan Malaka dalam bukunya “Masa Aksi” mempersoalkan narasi borjuasi dalam sejarah Indonesia. Ia mengatakan Indonesia tidak pernah memiliki sejarawan kecuali sebatas para penjiat tuan-tuan raja. Sejarah Indonesia tidak lebih dari sejarah-sejarah besar yang sama sekali tidak memberi ruang terhadap masa rakyat/orang kecil. Hampir dapat dipastikan gagasan yang dikritik oleh Tan Malaka mengarah pada ide Soekarno mengenai sejarah Indonesia yang disampaikan melalui sebuah pidato di depan sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Panitian Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 1 juni 1945.

Demikianlah pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di jaman dulu adalah national state. Kita hanya mengalami dua kali national state, yaitu di jaman Sriwijaya dan Majapahit. National state hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di jaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula harus kita dirikan bersama-sama. Karena itu, jika tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama : Kebangsaan Indonesia...

Rupanya ruang sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai tidak cukup menahan gaungnya. Pernyataan Indonesia sebagai negara bangsa ketiga setelah Sriwijaya dan Majapahit terus berulang. Setidaknya sampai dengan era orde baru. Hal ini

misalnya terekam dalam narasi buku Pendidikan Moral Pancasila di era kekuasaan Seharto.

Setiap orang Indonesia mengenangkan di dalam hatinya zaman lampau, ketika kita merdeka. Seperti pada zaman Sriwijaya atau Majapahit. Kita bebas menyusun dan memerintah negaranya sendiri dan bebas mengarungi lautan demi kekayaan negaranya! Betapa bangganya nenek moyang kita pada zamannya Itu! (Pendidikan Moral Pancasila, 1991: 35)

Teks diatas melihat apa yang disebutnya sebagai “Zaman Lampau” dengan konteks kekinian, Indonesia diandaikan telah pernah ada di masa Sriwijaya dan Majapahit. Seolah mengabaikan kenyataan Indonesia adalah sebuah negara, sedangkan Sriwijaya dan Majapahit adalah Kerajaan. Perbedaan dua epistem yang melatarbelakanginya seolah tidak jadi persoalan bagi Soekarno. Negara/republik yang berbasiskan konstitusi disamaratan dengan kerajaan yang berbasiskan darah (legitimasi keturunan) dan penghambaan (absolutisme raja).

Gagasan Soekarno menceminkan ide Ernest Renan mengenai bangsa yang teramat kental. Jejak gagasan Renan dalam pemikiran Soekarno telah dapat ditemua dalam tulisannya yang berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”, yang ditulis pada tahun 1926.

“Ernest Renan (1882) telah mengemukakan pendapatnya tentang bangsa. bangsa itu adalah suatu nyawa, suatu asas, dan akal yang terjadi dari dua hal, yaitu:

- 1. Rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjalani suatu riwayat, dan*
- 2. Rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan dan keinginan untuk hidup menjadi satu.”*

(Kansil, 2005: 5)

Dari sini pulalah datangnya gagsan mengenai “kesamaan nasib” yang terus menjadi jargon yang diulang oleh para pendiri bangsa, terutama Soekarno. Kecenderungan cara melihat Renan terhadap kebangsaan, ikut bertanggung jawab terhadap reduksi atau simplisme yang terjadi dalam sejarah nasional. Ketimbang menggambarkan sejarah sebagai sebuah kenyataan yang kompleks, penerapan nasionalisme ala Renanian, memaksakan narasi kesamaan riwayat, seperti yang di operasikan Soekarno dalam kalimatnya mengenai Sriwijaya, majapahit dan kesamaan nasib.

Gagasan Renanian yang hidup dalam tulisan dan pidato Soekarno juga rupayanya merembes sampai pada kongres sejarah pertama dan kedua. Sebagaimana laporan R. Moh. Ali dalam buku tipis berjudul “Penentuan Arti Sejarah Dan Pengaruhnya dalam Metodologi Sejarah Indonesia”, terjadi pertarungan sengit dalam upaya mendefinisikan sejarah. Dua gagasan yang terutama saling bertarungan dalam upaya memberi warna pada sejarah nasional adalah milik Hatta dan Soekarno. Pertarungan itu adalah pertarungan dua gagasan sejarah antara yang esensial romantis dengan kultural relativis.

Semangat romantisme tersebut ini dapat kita tangkap dari pernyataan Soekarno pada kongres sejarah kedua di Yogyakarta. Kongres itu dimaksudkan untuk mencari arti sejarah, guna menentukan arah penulisan sejarah nasional.

Sejarah Indonesia adalah buatan dari pada rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia yang berjuang, yang dulu dengan 50 juta, kemudian 80 juta, kemudian 90 juta, kemudian 100 juta rakyat Indonesia yang menderita, rakyat Indonesia yang tadi dikatakan masuk kedalam penjara, rakyat Indonesia yang digantung oleh pihak Belanda, rakyat Indonesia yang membakar rumah-rumahnya sendiri karena tidak mau rumahnya itu diduduki oleh tentara Belanda, rakyat Indonesia yang menjalankan segala kepahitan dan pengorbanan. Rakyat Indonesia yang berpuluh-puluh tahun menjalankan perjuangan ini, rakyat Indonesia itulah penulis daripada sejarah Indonesia.... (R. Moh. Ali, 1981: 31).

Romantisme sejarah seperti yang tertera pada kalimat-kalimat Soekarno diatas, menurut Nietzsche akan melahirkan pembacaan terhadap sejarah yang bersifat monumental. Gaya Monumental menurut Nietzsche mengasumsikan adanya kebesaran yang pernah terjadi dan kemudian akan sangat mungkin untuk terjadi lagi. Gaya ini memusatkan perhatiannya pada kebesaran-kebesaran dan kelangkaan monumental, ini dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan “selimut” kenyamanan, sebagai contoh, karena ia tidak menemukannya di masa sekarang. Gaya ini muncul karena adanya kebutuhan untuk menentukan model realitas apakah yang cocok sehingga sekarang dan masa depan dapat dijalankan.

Bahaya dari penggunaan gaya ini adalah ia tidak menghasilkan kebenaran penuh. Ia akan selalu mendekati pada apa yang tak sama, menggeneralisasi dan akhirnya membuat sesuatu menjadi ‘equal’. Seperti halnya yang terjadi dengan

pernyataan Indonesia sebagai negara bangsa ketiga setelah Sriwijaya dan Majapahit. Pernyataan tersebut menyamakan perbedaan dari motif-motif dan kejadian-kejadian, agar dapat menyusun apa yang disebut Nietzsche sebagai:

The monumental effectus(effect) at the cost of the causae (cause). "Thus because monumental history turns away as much as possible from the cause, we can call it a collection of "effect in themselves" with less exaggeration than calling it events which will have an effect on all ages". (aph II, parag.10).

Sejarah dengannya menjadi gerak maju yang linier. Masa lalu menyiapkan pada kita suatu pra kondisi dimana negara bangsa dan nasionalisme kita menjadi mungkin. Pra kolonial dan era kolonial merupakan bagian dari sejarah dimana bangsa Indonesia menyadari kebangsaannya dan bertekad untuk menjadi satu dan utuh. Namun sekaligus kebangsaan sesungguhnya adalah gagasan yang telah lama ada dalam bentuk ke agungan Sriwijaya dan Majapahit. Tugas sejarah dengan kata lain adalah mengungkapkan kesatuan dan kebesaran itu demi menengahkan pada kita suatu selimut besar persatuan (nasionalisme) yang cukup besar untuk menengahi seluruh bangsa Indonesia yang beragam itu.

Pandangan Soekarno mengenai Sejarah bukanlah satu-satunya gagasan yang ditawarkan untuk melihat sejarah nasional Indonesia pada kongres sejarah kedua di Yogyakarta. Definisi lain juga ikut mengemukakan, antara lain ditawarkan oleh Muhammad Hatta, dengan konsep yang sama sekali berbeda dan bahkan berlawanan.

Sejarah memberi pengertian daripada masa yang lalu Ia menggambarkan dimuka kita suatu ide tipe, bentuk rupa dari masa itu. Bukan gambarnya yang sebenarnya tetapi gambaran yang dimudahkan, supaya kita mengenal rupanya Ia bukan melahirkan cerita daripada kejadian yang lalu, tetapi memberi pengertian tentang satu kejadian atau satu masa yang lalu dengan mengemukakan kejadian atau masa itu sebagai masalah. Ia mengupas masalahnya dalam keadaan yang heterogen, dalam keadaan hidupnya yang banyak cabangnya Siapa yang mempelajari sejarah dengan pengertian tidak boleh berputus asa. Karena, sejarah mengajar kita melihat yang relatif, yang sementara dalam kejadian di dunia ini. semuanya, satu-satunya itu adalah yang

sementara. Tak ada yang tak berubah. "Panta rei" semuanya mengalir, kata Herakleitos. Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. (R. Moh Ali, 1981: 29)

Berbeda dengan definisi Soekarno yang bersifat kontinu, Hatta melihat sejarah sebagai sesuatu yang heterogen dan relatif. Dalam definisi Hatta kita tidak akan menemui arogansi sejarah Monumental yang menurut Nietzsche, justru membawa sejarah ke arah yang berbahaya, ketika ia menjadi sesuatu yang diubah, di-reinterpretasi ke sesuatu yang "*more beautiful*" dan "*thus coming close to free poeticizing*". Dimana, kadangkala seseorang tidak dapat membedakan sama sekali antara sejarah monumental dan mitos fiksi.

Kenyataannya, definisi Hatta di atas, yang melihat sejarah jauh lebih bijaksana, kalah pada tataran praktik. Ia tenggelam oleh keangungan sejarah monumental yang ditawarkan Soekarno. rupanya kondisi ekonomi politik Indonesia yang baru saja keluar dari cengkraman kolonialisme jadi penyebabnya. Dibawah bayang-bayang kembalinya kolonialisme, sejarah nasional ditulis dengan semangat menentang kolonialisme dan merindu keangungan pra kolonial, yang waktu itu menjadi semangat jaman.

Dalam bahasa Asvi Marwan Adam, semangat penulisan Sejarah era 1960-an diwarnai suasana "revolusi belum selesai". M. Ali menyatakan fungsi utama sejarah Indonesia adalah untuk memperlihatkan bangsa Indonesia sebagai (1) bangsa yang sama kedudukannya dengan bangsa kulit putih, (2) zaman yang pernah menduduki tempat terhormat dalam zaman keemasan, (3) puncak kejayaan itu sama dengan bangsa lain, (4) kejatuhan sebagai bangsa yang tangguh adalah akibat dari kelicikan, kecurangan, tipu muslihat Belanda dengan politik *divide et impera* mereka. Semangat itu pulalah yang tercuat pada laporan berita Antara, 15 November 1965 dan menjadi kebenaran sejarah diawal kemerdekaan Indonesia, setidaknya selama kekuasaan politik Orde Lama.

Penulisan Sejarah Indonesia harus didasarkan pada teori Bung karno, yang menyatakan, bahwa tokoh utama tiap sejarah adalah manusia yang berjuang, manusia yang menderita, dan manusia yang dihisap serta ditindas. Itulah yang membuat sejarah. Dan latar belakang ekonomi, tidak boleh dilupakan dalam penulisan sejarah bangsa Indonesia.

Demikian diterangkan oleh Menko Hubra Dr. Roeslan Abdulgani, yang selasa pagi menerima kunjungan para ahli sejarah. Ahli pahat dan seni lukis, yang ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk menyusun sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak jama Sriwijaya, dan kesemuanya itu ditempatkan dalam ruang sejarah Monumen Nasional di lapangan Medan Merdeka.

Dijelaskannya, bahwa periode abad ke-17 dan ke-18 adalah periode handels-kapitalisme yang menghantam rakyat Indonesia, sehingga perjuangan Sulatan Agung dan pahlawan-pahwalan lainnya hanyalah sekedar mencerminkan perlawanan terhadap sistem itu. Dan abad ke-19 di masa perjuangan Pangeran Dipoenogoro merupakan pencerminan perlawanan rakyat terhadap peningkatan modal kolonialis.

Maka dalam penulisan Sejarah Indonesia untuk mengisi Monumen Nasional itu haruslah kita perhatikan, agar raja-raja dalam sejarah Sriwijaya dan Majapahit itu tidak terlepas dari kehidupan rakyat. Demikian keterangan Dr. Roeslan Abdulgani mengenai penulisan sejarah Indonesia, yang akan menghias ruang sejarah Monumen Nasional.

Sumber: Berita Antara 15 Nopember 1965, edisi pagi halaman 15.

4.3.2 Orde Baru: Sejarah Romantis Dan Heroisme Militer

Tragedi 1965 yang ditandai oleh dibubarkannya Partai Komunis Indonesia dan penangkapan serta pembunuhan terhadap aktivis komunis, adalah awal dari lahirnya sebuah rezim yang kemudian dikenal sebagai rezim Orde Baru. Sebagaimana ditampakkan pada sejarah berdirinya, Orde baru dibangun diatas jatuhnya komunisme. Diatas fondasi penolakan atas komunis -yang kemudian hari berkat rekaya sejarah yg mumpuni- dikatakan sebagai ateis, amoral, dan bahkan biadab itulah, menurut Ariel Heryanto, Orde Baru membangun dirinya dengan menunjuk komunisme sebagai “liyan”.

Sepanjang sejarah pendirian republik Indonesia, Orde Baru mungkin adalah rezim yang paling sadar sejarah dan secara terorganisir menggunakannya sebagai alat pembentukan identitas nasional. Berbeda dengan semangat zaman di era demokrasi terpimpin semasa Soekarno, dimana kolonialisme dijadikan musuh bersama bangsa, maka di era orde baru, komunis adalah “yang bukan” Indonesia.

Hubungan mesra Soekarno dan Komunisme yang terjalin semasa demokrasi terpimpin, membuat sejarah versi Orde Baru yang diprakarsai oleh ahli sejarah

militer, Nugroho Notosusanto, ikut menggulingkan Soekarno bersama PKI dalam sejarah nasional. Dalam penelitian mengenai sejarah Orde Baru, McGregor mengatakan ada tiga proyek utama sejarah Orde Baru, yaitu (1) Sejarah kudeta 1965, dimana didalamnya komunisme menempati posisi sebagai pengkhianat. (2) desoekarnoisasi sejarah, dengan mengurangi perannya dalam sejarah nasional. (3) Mengangkat citra sejarah militer, diantaranya melalui pendidikan sejarah perjuangan bangsa (PSPB). Untuk kepentingan itu, McGregor melanjutkan, selain penulisan ulang sejarah nasional, juga dibangun beberap museum dan monumen bersejarah, beserta dioramanya(yang paling dikenal diantaranya museum lubang buaya), disamping juga pembuatan film menyangkut pemberontakan PKI.

Berangkat dari argumentasi yang dibangun oleh Katharine E. McGregor, historiografi nasional yang dibentuk selama masa Orde Baru Suharto adalah sentralitas negara yang diejawantahkan oleh militer. Sejarah nasional disamakan dengan sejarah militer dan produksi sejarah dikendalikan oleh negara dan militer. Pada akhirnya versi militer tentang kejadian di tahun 1965 mendominasi historiografi periode tersebut dan melegitimasi naiknya rezim Orde Baru.

Jika rezim sebelumnya membangun sejarah Indonesia sebagai hasil dari perbenturan antara kolonialisme dan imperialisme melawan nasionalisme Indonesia dengan Soekarno sebagai pusat, maka Orde Baru melihat sejarah Indonesia sebagai hasil dari perjuangan antara pendukung dan penentang Pancasila dengan menempatkan militer sebagai faktor penentu. Orde Baru hanya menggantikan Soekarno dengan militer, sementara itu para penentang Pancasila khususnya komunisme dan Islam ekstrimis telah menggantikan posisi kolonialisme dan imperialisme sebagai kambing hitam.

Puncak dari desoekarnoisasi sejarah versi Orde Baru adalah ketika Nugroho Noto Susanto mulai mengambil peran dalam penulisan sejarah nasional. Menurut Nugroho, Pancasila dicetuskan oleh Mr. Muhammad Yamin, bukan oleh Soekarno. Soekarno hanyalah penerus. Akibatnya, tanggal 1 Juni tidak lagi diperingati sebagai hari lahir Pancasila oleh pemerintah Orde Baru.

Dalam bukunya “Ketika Sejarah Berseragam”, McGregor mengatakan bahwa peran sentral rekayas sejarah Orde Baru, berada dalam satu tangan, yaitu Nugroho Notosusanto. Nugroho adalah kepala Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata , Ketika diangkat sebagai menteri pendidikan pada 1984, Nugroho menggunakan kesempatan itu untuk menulis ulang kurikulum sejarah untuk lebih menekankan peranan historis militer.

Pada tahun ini pula Nugroho ikut menulis skenario untuk film Pengkhianatan G 30 S/PKI yang memuat versi resmi Orde Baru tentang tragedi tersebut. Film ini kemuddian dijadikan tontonan wajib untuk murid-murid sekolah di seluruh Indonesdia, dan belakangan diputar sebagai acara rutin setiap tahun di TVRI pada malam tanggal 30 September hingga tahun 1997.

Apa yang unik dari ciri karya sejarah Nugroho adalah penekanannya pada visualisasi. Ia tidak hanya berhenti pada membuat film, namun juga meklanjutkan dengan membuat diorama dan museum diberbagai wilayah Indonesia. Model sejarah visual ini sengaja dipilih oleh Nugroho Notosusanto karena sebagaimana dia ungkapkan bahwa di dalam sebuah masyarakat seperti Indonesia yang masih berkembang, di mana kebiasaan membaca masih rendah, kami [kepemimpinan militer] memercayai visualisasi sejarah tetap sebagai cara efektif untuk mengungkapkan identitas ABRI. Keadaan sekarang tampaknya belum banyak berubah. Masyarakat kita masih lebih bisa menikmati ”sajian” visual, terutama televisi. Untungnya, media elektronik tidak lagi dikekang dalam menyampaikan berita dan laporan.

Merujuk kepada pendapat Barry Schwartz bahwa kajian terhadap representasi masa lalu tidak bisa dikonstruksi secara harfiah, melainkan dieksploitasi secara selektif. Mcgregor berusaha menampilkan bahwa seluruh ”sejarah” nasional semasa Orde baru dan turunannya, tidak lain digunakan untuk memosisikan militer sebagai aktor, yang dalam bahasa Asvi Warman Adam, merekayasa peristiwa masa lalu dalam perspektif militerisme.

Lebih jauh dengan mengutip Graeme Turner, penulis menegaskan bahwa representasi di sini adalah sebuah mediasi diskursif yang terjadi antara peristiwa

dan kebudayaan yang memberikan sumbangan terhadap konstruksi ideologi nasional. Kegunaannya bukan pada sebagai sebuah refleksi atau refraksi masa lalu, tetapi sebagai sebuah konstruksi masa kini. Jadi, penggambaran peristiwa "G 30 S PKI" telah dijadikan "alat" untuk mengukuhkan legitimasi rezim.

Pertanyaan kemudian adalah, legitimasi apa yang disampaikan sejarah bagi militer untuk menempatkannya sebagai aktor? Seperti telah diketahui bersama, militer Indonesia selalu mendaku sebagai unik. Ini disebabkan, pertama, rakyat Indonesia yang menciptakan militer di dalam perjuangan kemerdekaan 1945-1949 melawan Belanda dan, kedua, selama perlawanan ini militer mengasumsikan sebagai lapisan kepemimpinan nasional setelah penangkapan pemimpin sipil pada tahun 1948.

Atas dasar dua klaim ini, militer Indonesia dalam waktu lama memperoleh justifikasi untuk memainkan peranan dwifungsi dalam pertahanan dan politik. Pendek kata, legitimasi sejarah telah digunakan oleh militer Indonesia untuk mempertahankan hak-haknya dalam kekuasaan politik dan pengaruhnya di Indonesia.

Sedikit berbeda dengan mcGregor, Asvi melihat rekayasa sejarah orde telah jauh dimulai pada era Nasution. Tahun 1952, menurut Asvi adalah tonggak berdirinya sejarah militer. Pada tahun itulah Nasution dan ABRI berupaya memaksa Soekarno untuk membubarkan parlemen. Ujungnya ia pun dinonaktifkan sebagai Kasad (Kepala Staf Angkatan Darat).

Tiga tahun selama masa nonaktif tersebut digunakan Nasution untuk merenungkan posisi militer dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun dirinya. Ia memulai dengan merumuskan peran ABRI dalam sejarah nasional dalam bukunya yang berjudul *Sekitar Perang Kemerdekaan*. Seperti ditulis Asvi, dengan bantuan Kasad penggantinya, Nasution menyurati ratusan komandan militer diseluruh Indonesia untuk meminta keterangan menyangkut peristiwa seputar perang kemerdekaan. Nasution bahkan melakukan wawancara terhadap beberapa pelaku sejarah yang dinilai penting.

Buku tersebut dikemudian hari menjadi cikal bakal buku sejarah militer, pada tahun 1970an ditulis kembali oleh Pusat Sejarah ABRI, tempat dimana Nugroho Notosusanto menjabat sebagai kepalanya. Berdasarkan atas *outline* yang dibangun oleh Nasution itu juga, Nugroho menulis buku sejarah sekolah, yang disebut PSPB (Pergerakan Sejarah Perjuangan Bangsa), yang tidak lain diambil dari versi sejarah ABRI.

Tidak hanya itu, dalam upayanya memberi peran pada militer dalam politik nasional, setelah kembali menjabat posisi sebagai Kasad di tahun 1955, Nasution mengupayakan suatu dasar hukum bagi peran ABRI dalam politik nasional. Nasution melihat peluang itu ada pada konstitusi nasional yang mengakui golongan fungsional, baginya ABRI termasuk dalam kategori itu. Nasution gigih memperjuangkan agar konstitusi tersebut bisa dilakukan, dan akhirnya memang diputuskan untuk diberlakukan pada dekrit presiden 1959.

Nasution juga melakukan serangkaian tindakan strategis lainnya, seperti merumuskan konsep politik tentara yang disebutnya Jalan Tengah. Tentara tidak melakukan kudeta Junta militer dan kemudian memerintah seperti di Amerika Latin tetapi juga tidak seperti di Eropa Barat, tentara tinggal di barak sebagai alat kekuasaan pemerintah sipil. Konsep jalan Tengah ini yang kemudian menjadi inti dari Dwifungsi ABRI (Asvi, 2007: 121)

Pada tahun-tahun berikutnya, muncul berbagai pemberontakan di tanah air. Nasution sebagai Kasad memainkan peranan penting dalam upaya memadamkannya. Berkat upaya itu, politik ABRI pun kian terkonsolidasi. ABRI dibawah Nasution mewujud menjadi simbol penjaga NKRI dan Pancasila. Antara tahun 1958 sampai tahun 1960, boleh dibilang Nasution menjadi orang nomor dua setelah Soekarno. Dengan argumentasi ini, Asvi ingin mengatakan bahwa embrio Orde Baru dan gagasan sejaranya, sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum 1 Oktober 1966, seperti di klaim sejarah versi Orde Baru. Pernyataan demikian bagi Asvi, tidak lain cara untuk membersihkan Orde Baru dari catatan kekejamanya pada tahun 1965.

4.3.2.1 Histografi Alternatif: Oposisi Sejarah Orde Baru

Tahun-tahun setelah 1965, di era dimana Orde Baru mencapai puncak kekuasaannya, terjadi pembersihan terhadap intelektual-intelektual yang dikategorikan “kiri”. Tidak hanya pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), universitas juga menjadi tempat dimana pembersihan dilakukan, dosen dan mahasiswa yang diduga terlibat komunisme disingkirkan dan bahkan dipenjarakan. Buku-buku dan penerbitan dalam bentuk lain yang terkait dengan komunisme dibakar.

Era tersebut adalah era dimana Pancasila menemui maknanya yang baru. Slogan Indonesia sebagai negara Pancasila, di masa Orde Baru, menjadi sama dengan “Indonesia negara Anti komunis”. Pancasila seolah lawan kata dari komunisme. Dalam catatan Ariel Heryanto, negara Orde baru pada perjalanannya menggunakan istilah komunisme untuk menciptakan teror pada lawan-lawan politiknya. Tidak peduli apapun ideologi dari oposisi yang menentanginya, pemerintah berkuasa akan menggunakan tuduhan komunisme sebagai dasar tindakan represif.

Budiawan dalam bukunya “Mematahkan Pewarisan Ingatan”, mengatakan bahwa kata “komunisme” itu sendiri, dewasa ini (bahkan setelah runtuhnya Orde Baru) masih menjadi momok yang menakutkan. Kata tersebut mampu menciptakan trauma pada mereka yang pernah hidup di era dimana komunisme ditasbihkan sebagai musuh negara, pengkhinat pancasila, dan karenanya layak dibinasakan.

Semenjak 1965 sampai dasawarsa 1970-an, ratusan intelektual yang dikategorikan komunis, dibuang ke pulau Buru. Suatu tempat yang amat terpencil dan mengenaskan. Rupanya pola yang sama digunakan kolonial lewat Boeven Digul, bagi para penentang kekuasaannya, digunakan orde baru lewat pulau Buru.

Salah satu diantara mereka yang masuk pulau Buru adalah Pramoedya Ananta Toer. Seorang sastrawan yang tergabung dalam Lekra (Lingkar Kesenia Rakyat), salah satu lembaga kebudayaan yang berelasi dengan PKI. Dibubarkannya Lekra seiring dengan dibubarkannya PKI, ikut membawa Pramoedya masuk ke pulau Buru. Dipulau Burulah, Pramoedya menunaikan kerja sejarah yang menurut

Hilmar Farid telah dilakukannya semenjak 1950-an. Dengan hanya berbekal ingatan, mengingat di Pulau Buru, kertas dan pena dilarang dan hasil kerja Pramodeya selama bertahun-tahun (berupa ribuan artikel klipingan koran dan ratusan hasil wawancara) dimusnahkan tentara ketika menggeledah rumahnya, Pramoedya terpaksa menulis karya yang kemudian dikenal sebagai “Tetralogi Pulau Buru” tanpa satu pun bahan bacaan. Keempat novel tersebut adalah “Bumi Manusia”, “Anak Semua Bangsa”, “Jejak Langkah”, dan “Rumah Kaca”.

Tetralogi tersebut menurut Hilmar Farid menjadi suara gugatan yang paling lantang terhadap Orde baru. Bukan terutama karena ia merupakan sebuah karya yang lahir dari intelektual Kiri (oposisi Orde baru), namun karena kemampuannya untuk membuktikana bahwa operasi politik Orde Baru dan perspektif sejarahnya setali tiga uang dengan politik dan histografi kolonial. Kritiknya yang tajam kejantung kekuasaan Orde baru dan kemampuannya memberi suara pada mereka-mereka yang dibungkam, membuat karya Pramoedya sebagai simbol perlawanan itu sendiri. Membaca dan mendiskusikannya dimassa Orde Baru adalah sesuatu yang dapat membawa konsekuensi hukum. Meski demikian, suara Pramoedya dalam tetralogi pulau Buru, tetap menjadi semangat perlawanan bagi mereka yang menghidupkannya, dan tetap menajdi momok yang menakutkan bagi kekuasaan,

Untuk memahami perlawanan Pramoedya terhadap sejarah nasional yang mapan versi orde baru dan dikatakannya merupakan kelanjutan dari kuasa/pengetahuan kolonial, pertama-tama kita mesti menguraikan “kemapanan sejarah” yang menjadi semangat Orde Baru. Baru kemudian, menunjukkan kritik Pramoedya atasnya dan tawaran histografi alternatif yang diketengahkannya.

4.3.2.2 Orde Baru, Kemapanan Sejarah, Dan Kritik Atasnya

Dalam wacana kebudayaan dan pengetahuan semasa setelah kemerdekaan yang kemudian berlanjut di era Orde Baru, psotivisme dan wacana pengetahuan ilmiah mendominasi penelitian dan kajian budaya. Hal ini terutama semakin berkembang di era Orde Baru, yang memakai jargon pembangunan. Studi Daniel Dhakidae mengenai Orde Baru dalam “Cendikian dan kekuasaan”, statistik menjadi ciri utama riset-riset pembangunan. Meski menurut Daniel, pada hakikatnya riset-riset

mengenai masyarakat dan pembangunan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang di sponsori negara tidak lain hanya formalitasnya. Tugasnya melegitimasi berbagai kebijakan pemerintah terkait pembangunan.

Semangat “ilmiah” ini jugalah yang menghinggapi sejarah, budaya, dan bahkan sastra. Namun, bukan berarti sastra, budaya, dan sejarah menjadi angka. Ciri lain dari positivisme adalah pembagian kategori pengetahuan yang ketat. Setiap ilmu memiliki karakteristiknya masing-masing yang terkategori dengan jelas. Sehingga studi lintas disiplin merupakan suatu hal yang tabu.

Pemisahan antara sastra, sejarah, dan politik, merupakan diktum ilmu sejarah, yang berkembang semasa pencerahan di Eropa abad ke 19. Pada kasus Indonesia gagasan ini dibakukan dan dibawa oleh para sarjana kolonial. Sehabis kemerdekaan nyaris tidak ada perlawanan terhadap pola ini, kecuali sebatas merubah nilai moralnya, seperti telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Metode yang digunakan untuk memaknai masa lalu masih juga merupakan warisan kolonial.

Sebagaimana di era kolonial, dimasa Orde Baru, penulisan sejarah dalam diskursus mapan dimaknai sebagai penulisan tentang masa lalu yang objektif. Bersih dari kepentingan politik dan ditulis dengan kaidah ilmiah. Diskursus inilah persisnya yang dilawan oleh Pramoedya, dengan mengenalkan teknik penulisan sejarah yang penuh gairah, sangat subjektif, syarat politik, dan tidak terlalu peduli pada kaidah ilmiah.

Dalam kategori para sejarawan Orde baru, ada kategori diluar sejarah yang “mapan”. Yaitu, sejarah yang buruk atau sejarah yang tidak ditulis dengan kategori ilmiah dan kedua sejarah yang dilarang. Hal kedua terkait dengan kepentingan politik yang berkuasa ketika itu (sejarah versi Islam dan Kiri masuk didalamnya). lalu dimana posisi Pramoedya?

Pramoedya masuk dalam keduanya. apa yang ditulisnya dalam tetralogi pulau Buru tentu saja tidak dihitung sebagai sebuah karya sejarah, ia lebih merupakan karya sastra kelompok kiri yang perlu dilarang dan dibumi hanguskan. Sehingga pelarangan terhadap berbagai karya Pramoedya semenjak 1965, datang dari

penilaian ini. Paling jauh pada masa ini Pramoedya novelnya dibaca sebagai versi sejarah yang ditutupi oleh Orde Baru. Nama-nama tokohnya merupakan samaran dari tokoh-tokoh seperti Tirto Adhisuryo (Minke). Namun, seperti kemudian diungkapkan oleh Hilmar Farid dalam essaynya yang berjudul “Pramoedya dan Histografi Indonesia”. Tetralogi Pulau Buru yang puncaknya novel “Rumah Kaca” adalah sebuah kerja sejarah yang telah dimulai Pramoedya semenjak tahun 1950-an dan merupakan suatu upaya dekolonialisasi sejarah nasional.

ketika semangat dekolonialisasi sejarah nasional diawal era kemerdekaan menggema dalam kongres sejarah pertama dan kedua di Yogyakarta. Upaya tersebut masih merupakan seringkali rumuskan sebagai menyusun sejarah nasional berdasar narasi orang Indonesia sendiri dan upaya pembalikan sejarah kolonial yang bersifat Belanda sentris. Oleh karena itu, sejarah nasional disebut juga dengan istilah Indonesia sentris. Pramoedya memang tidak pernah merujuk pada perdebatan dalam kongres sejarah, ia juga tidak pernah terlihat terlibat dalam perumusan sejarah nasional.

Pandangannya mengenai sejarah lebih kentara dalam sikapnya terhadap sumber sejarah dan cara mendapatkan informasi mengenai masa lalu. Kritiknya terhadap sejarah kolonial antara lain, mengatakan bahwa sejarawan kolonial sering kali menyaring data dan fakta yang didapatnya dilapangan, menghilangkan arsip, dan menyingkirkan orang-orang tertentu dalam sejarah. Seperti yang dilakukan Rinkes (Sejarawan Belanda) yang “melenyapkan” Tirto Adhisurjo atau menyaring sumber seperti yang dilakukan Abendanon terhadap surat-surat Kartini.

Lebih lanjut, Pramoedya mengkritik cara penulisan sejarah kolonial sebagai histografi rumah kaca. Upaya penulisan masa lalu semasa kolonial yang berpusat pada birokrasi kolonial, telah menempatkan penduduk pribumi lebih sebagai objek yang dilihat dalam sebuah rumah kaca. Belanda bicara dan pribumi dibicarakan. Oleh karena itu, Pramoedya mengkritik Balai Pustaka yang dinilainya melembagakan model histografi rumah kaca dan menjadi tempat berkumpulnya para sarjana kolonial yang menulis mengenai Indonesia.

Balai Pustaka menurut Pramoedya mengoperasikan logika sejarah kolonial, dengan hanya menulis sejarah melalui sumber-sumber resmi yang merupakan catatan birokrasi kolonial. Tidak berhenti disitu, Balai Pustaka juga melakukan kodifikasi bahasa Melayu, yang kemudian melahirkan bahasa Melayu tinggi (yang dikenal sebagai bahasa Indonesia) dan digunakan sebagai bahasa pengajaran resmi di sekolah-sekolah kolonial. Penulisan sejarah dari para sarjana kolonia ataupun sarjana nasional dikemudian hari seperti HB . Jassin, berpatokan pada sumber-sumber sejarah yang ditulis dengan bahasa Melayu tinggi.

Pramoedya menolak berpegang dengan kemapanan sejarah Balai Pustaka. Oleh karena itu, ia dengan tekun menyelami bahan-bahan sejarah yang ditulis dalam bahasa Melayu pasar dan juga wawancara dengan berbagai pelaku sejarah. Tekanan pada sumber-sumber berbahasa Melayu pasar ini, seperti dikatakan Shiraishi(1985), dapat dilihat sebagai “usaha yang patut dihormati untuk mengembalikan studi tentang sejarah nasional Indonesia dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia.”

Terobosan historiografi Pramoedya tidak berhenti sampai situ. Ia bahkan, menjadikan ramalan dan dongeng rakyat sebagai sumber dalam penulisan sejarah. Ramalan Jayabaya yang populer pada masa Jepang dan Perang Kemerdekaan, dijadikan sebagai bahan penting untuk memberi informasi mengenai kesadaran sosial, yang tidak mungkin ditemukan dalam arsip kolonial. Pilihan metode semacam ini, pada akhirnya mampu memberi tempat pada historiografi orang kebanyakan yang kerap kali dinegasikan dalam narasi sejarah nasional yang berpegang pada metode ilmiah ala kolonial yang amat kokoh mendominasi studi sejarah hingga era 1990-an. Seperti tulis Hilmar Farid:

Jangankan kritik terhadap pengetahuan kolonial, penggunaan metode ilmiah untuk menelaah arsip kolonial di masa itu masih dianggap luar biasa karena jarang dilakukan orang. Sejarawan terkemuka Sartono Kartodirjo pada pertengahan 1990-an pun masih mengatakan bahwa arsip kolonial tidak dapat dihindari dalam studi sejarah Indonesia, dan sesungguhnya tetap memberi kesempatan untuk melihat sejarah dari perspektif Indonesia, walau tidak memerinci bagaimana hal itu mungkin dilakukan (Farid,2007: 95-96).

Bagi Pramoedya, ideologi dalam penulisan sejarah tidak hanya terjadi pada perspektif yang digunakan untuk menilai sebuah peristiwa dengan kerangka moral tertentu. Baginya, sikap dan perlakuan terhadap sumber sejarah sangat terkait dengan prinsip, arah dan politik penulisan sejarah.

Dengan kata lain, Pramoedya melabrak segala hal yang dikategorikan sebagai cara menulis sejarah yang mapan. Dengan menggunakan sastra sebagai medium penulisan sejarah, Pramoedya membebaskan sejarah dari klaim netralitas dan objektivitas yang membuat ilmu sejarah menjadi sesuatu yang kering dari imajinasi. Sebaliknya, ia memenuhi sejarah dengan politik, imajinasi, dan subjektivitas yang merupakan hal-hal yang ditabukan oleh sejarah yang mengabdikan pada kaidah ilmiah warisan kolonial.

Penelusuran sejarah seperti yang dilakukan Pramoedya, pada akhirnya mampu memberi peluang pada lahirnya suatu jenis historiografi yang memberi tempat pada kebanyakan orang untuk ikut menulis sejarah. Sejarah bukan lagi tempat bagi orang-orang besar dan penguasa, yang menjadikannya tidak memiliki relevansi pada rakyat luas. Bagi Hilmar Farid, upaya Orde Baru merepresi modus sejarah seperti Pramoedya, merupakan upaya untuk membungkam suara radikalisme rakyat, dan karenanya “menggambarkan kekuasaan kolonial dan Orde Baru sebagai *continuum*” (Farid, 2007: 97).

4.3.2.3 Genealogi Bangsa Dalam Telaah Pramoedya

Upayanya membongkar historiografi nasional dan menggali kembali bahan-bahan sejarah yang diabaikan atau sengaja disingkirkan menimbulkan sederet konsekuensi yang tidak dibayangkan sebelumnya. Salah satu kesimpulan itu adalah menyangkut genealogi bangsa, yang diatakannya memiliki “darah” Tionghoa yang kuat. Penemuan tersebut bukan hanya sekedar penemuan sejarah semata, melainkan juga pernyataan politik yang menghantam nasionalisme konservatif yang berlindung di bawah narasi keaslian dan politik rasial warisan kekuasaan kolonial.

Berbeda dengan Muhammad Yamin, Aidit, dan sejarawan nasionalis waktu itu, (juga berlanjut hingga masa Orde Baru), memandang bahwa sejarah nasional

merupakan kelanjutan dari kebesaran kerajaan-kerajaan tua seperti Majapahit dan Sriwijaya, Pramoedya justru menilai Indoensia adalah konstruksi modern yang belum terlalu tua usianya.

Pada mulanja Indoensia tidak lebih dari sebuah istilah geografi, tapi dengan pasangnja gerakan kemerdekaan nasional nonkooperatif kemudian menjadi hukum dan menajdi istilah politik [...] karena Indonesia dewasa ini telah menjadi istilah politik, hukum, dan telah menjadi nama dari negara kita, pada umumnya orang mudah melupakan bagaimana asal-usulnja sampai diterima menajdi nama dari negara kita. Terutama adalah perdjungan politik yang memungkinkanja demikian (Toer,1964: 4, dalam Farid,2007: 98)

Sejarah dengannya belum selesai. Barang siapa tidak tahu asal usulnya, ia tidak tahu kemana akan menuju. Sejarah Indoensia lahir dari sebuah cita-cita yang berawal dari gerakan radikal menolak kolonialisme dan imajinasi liar mengenai sebuah bangsa yang bebas dan setara. Indonesia tidak seama sekali berhubungan dengan Sriwijaya dan Majapahit yang merupakan kerajaan yang berbasis feodalisme dan penghambaan.

Meski tergabung dalam Lekra dan PKI, Pramoedya mengoperasikan cara pikir yang sama sekali berbeda dengan rekan-rekannya seperti Aidit. Pramoedya lebih menekankan politik kebangsaan yang dalam narasi komunis disebut dengan kondisi subyektif. Baginya agensi memainkan peranan yang tidak kalah pentingnya dalam melahirkan ide kebangsaan. Sejarah baginya bukanlah rangkaian peristiwa yang diatur oleh hukum sejarah, melainkan juga bergantung pada upaya manusia yang hidup didalamnya.

Dalam analisisnya mengenai ekonomi kolonial, Pramoedya juga menekankan peran petani Jawa membentuk sistem ekonomi dengan memboikot, melawan, dan memberontak. Struktur ekonomi baginya tidak melulu dibentuk oleh 'keadaan obyektif' yang tak bernyawa, melainkan pergulatan sosial antara yang memerintah dan diperintah (Farid,2007: 99).

Keyakinan itu kemudian membawanya menelaah genealogi nasion yang ternyata ditemukannya ada dalam diri seorang Kartini. Bila kesepakatan umum sejarawan nasionalis ketika itu menyebut bahwa awal pergerakan dan kesadaran nasional

mewujud dalam organisasi Budi Utomo, maka Pramoedya berangkat lebih jauh dari itu menelusuri ide mengenai nasion sebelum Budi Utomo. Pramoedya juga mengakui arti penting Budi Utomo, namun menurutnya gagasan mengenai nasion lahir lebih dulu dari itu, yaitu berawal dari tumbuhnya gerakan intelektual pada awal abad ke 19. Wakil paling penting dari kelompok intelektual ini adalah Kartini.

Kartini adalah pemula dari sedjarah modern Indonesia. Dialah jang menggodok aspirasi2 kemandjuan jang di Indoensia untuk pertama kali timbul di Demak-Kudus-Jepara sedjak pertengahan kedua abad jang lalu(XIX). Ditangannja kemandjuan itu dirumuskan,dirintjina, dan diperdjuangkannja, untuk kemudian menjadi milik seluruh nasion Indonesia (Toer, 1962: xiii).

Selain Kartini, Tirta Adhisoerjo dan Abdul Rivai adalah dua tokoh lain yang menarik perhatian Pramoedya. Ia menilai kedua tokoh itu berjasa dalam mengembangkan kehidupan pers, perdagangan, dan organisasi modern yang menjadi cikal bakal nasion *state* Indoensia kemudian. Penelusurannya sementara para nasionalis mencari akar historis Indonesia dengan semangat penyatuan nasionalisme, agama, dan komunis, mengikuti histografi kolonial yang dipelopori J.Th. Petrus Blumberg. Pramoedya keluar dari kategori semacam itu dengan setia pada usahanya menelusuri akar pemikiran gerakan nasionalis sebelum Budi Utomo.

Dalam upaya itulah Pramoedya melihat asal usul Tionghoa dan Indo-Eropa dalam pembentukan nasion. Perhatiannya yang besar pada pembentukan ide mengenai nasion yang berkembang melalui pers dan penerbitan membawanya menemukan tali temali antara para jurnalis Bumi Putra, Tionghoa, dan Indo-Eropa dalam meramu gagasan mengenai nasion. Berbeda dengan narasi mapan mengenai keasliaan nasion Idonesia yang melulu dihubungkan dengan peranan pribumi. Pramoedya justru menekankan *cultural hybridity* dari nasion. “Ia melihat bahwa ‘sastra asimilasi’ dan sastra pra-Indoensia yang didominasi oleh orang Tionghoa dan Indo-Eropa yang ditulis dalam bahasa Melayu pasar atau Melayu rendah adalah basis berkembangnya gagasan tentang ‘Indonesia’ (Farid,2007: 101).

Bertolak belakang dengan sarjana kolonial dan para pengikutnya kemudian, Pramoedya menghubungkan dunia-dunia yang sebelumnya terpisah (sastra, sejarah, bahasa dan politik). Ia membongkar kategori-kategori yang digunakan dalam studi sastra, sejarah, dan bahasa Indonesia dan berhasil menawarkan gambaran yang sungguh berbeda. Sastra lebih dari sekedar politik, melainkan tempat dimana cita-cita mengenai Indoensia merdeka dirumuskan dalam perdebatan dan kemudian dilahirkan. Demikian halnya dengan bahasa. Hanya dengan bahasa yang hidup dan mampu menemukan mereka yang dipinggirkan, orang bumiputra dapat merumuskan perjuangannya dan membebaskan diri dari pola pikir kolonial yang ditanamkan melalui sejarah.

4.3.3 Sejarah Pasca Orde Baru

Reformasi tahun 1998 menandai suatu awal baru bagi Indonesia. Rezim totaliter yang lama telah lama berkuasa kini telah berakhir. Semangat demokratisasi sebagaimana yang jadi jargon selama upaya penumbangan Soeharto menjadi pekik yang terus diteriakan pun, menjadi semangat jaman. Hampir semua sektor kehidupan masyarakat mengalami perubahan drastis. Hal yang paling kentara terlihat dari kebebasan media, yang pada rezim sebelumnya tidak pernah ada.

Berbeda dengan era kekuasaan Orde Baru yang sangat otoriter terhadap media, terlihat dari berbagai bentuk kebijakan seperti SIUP (Surat Izin Usaha Penerbitan) dan bahkan pembredel terhadap beberapa media, yang paling terkenal antara lain, Tempo pada tahun 1994. Di era reformasi, media tumbuh subur. Dari yang tadinya Indonesia hanya memiliki empat televisi swasta nasional (yang keempatnya berkaitan dengan keluarga Soeharto), menjadi sepuluh televisi nasional. Media cetak pun bertambah jumlahnya. Politik jadi bahan pembicaraan, pengamat bebas mengemukakan pendapat, sensor seolah telah hilang.

Semangat yang sama juga menghinggapi bidang pendidikan, terutama sejarah. Jauh sebelum Orde Baru lengser dari tampuk kekuasaan, suara-suara alternatif mengenai sejarah yang dipalsukan lama jadi pembicaraan. Hanya saja bedanya, dulu suara itu lebih berupa bisikan, sementara saat ini di menjadi gaung yang begitu kuat. Isu-isu sejarah yang antara lain menjadi persoalan adalah sepeutar

peristiwa 1965, Supersemar, dan Serangan Umum 1 Maret. Dalam berbagai diskusi publik, periode sejarah tersebut banyak jadi perbincangan dan dalam semangat reformasi, perbincangan itu akhirnya sampai juga pada para pemangku kekuasaan baru.

Satu tahun setelah reformasi, menteri pendidikan ketika itu Yuwono Sudarsono, memerintahkan jajarannya untuk mendiskusikan kembali versi-versi sejarah Orde Baru dalam buku sekolah. Hasilnya, tahun 200 lahirnya edisi baru buku sejarah, yang isinya merespon perbincangan sejarah yang selama ini ramai dibicarakan. “ *The results were, however, mixed. Concerning the Serangan Umum (issue 1) the role of Suharto was downplayed while more credit was given to Sultan Hamengku Buwono of Yogyakarta as initiator, and the reliability of Supersemar (issue 3) was questioned as well* “ (Nordholt, 2004).

Tidak berhenti sampai disitu, buku edisi baru yang dikeluarkan oleh pemerintahan Orde Reformasi, juga mendedikasikan halaman-halaman buku sejarah untuk mengkritik Orde baru yang dinilai totaliter dan korup. Jargon KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang menjadi kata favorit media dan masyarakat juga menjadi simbol yang dipakai sejarah untuk menunjukk Orde Baru.

Buku ini merupakan revisi atas kurikulum sejarah terakhir di era Orde Baru yang dikeluarkan pada tahun 1994 dan sekaligus pembalikan atas narasinya. Dimana dalam buku sebelumnya memuat berbagai harapan akan pembangunan dan pencapaian pemerintah Orde Baru dalam pembangunan, serta integrasi Timor-timor yang dinilai penting, karena merupakan bagian dari nasionalisme Indoensia. Maka pada buku keluaran tahun 1999, kesemua hal itu dihapuskan.

September 1999 – was moved to an earlier chapter where it was located after the liberation of Irian Barat in 1963, while the actual history of the New Order was reduced to three things: 1) a list of old ministers who were replaced by a new cabinet in 1966; 2) a picture of the Supersemar plus the information that there are various interpretations of the authenticity of this document; 3) although the opening line mentions the developmental success of the Orde Baru, in the next sentence we are reminded that Suharto's regime eventually shipwrecked on KKN

(corruption, collusion and nepotism) after which we witness the economic crisis of 1997. It seemed as if the years between 1966 and 1997 had been event-less -- an old ideal of the New Order. But the emptiness of that era implied also the evaporation of the New Order in history (Nordholt, 2004).

Buku tahun 1999 pada akhirnya memberikan representasi yang buruk pada Orde Baru dengan berbagai pelabelan seperti KKN. Halaman buku sejarah yang digunakan untuk membicarakan Orde Baru pun jauh berkurang. Sebaliknya, 25 halaman didedikasikan untuk membicarakan Orde Reformasi. Seperti tulis Nordholt, “25 pages were devoted to an optimistic narrative of reformasi, starting with the crisis of 1997 and ending with the Wahid-Soekarnoputri government of October 1999. Apart from these changes, part 3 of the textbook, on economic development and technological innovation remained more or less the same, but it was no longer rooted in the New Order” (Nordholt, 2004).

Meski telah terjadi perubahan terhadap fakta-fakta sejarah yang selama Orde Baru dinilai sebagai kebenaran, namun perubahan yang signifikan belum juga dapat ditemui sampai pada tahun 2004. Setelah lima tahun, buku sejarah versi tahun 1999, mendapat banyak masukan dari konferensi guru sejarah di Bogor pada tahun 2003. Hasilnya adalah rumusan baru kurikulum sejarah yang keluar pada tahun 2004.

Kurikulum baru ini memberikan banyak perubahan, bukan hanya pada tataran fakta sejarah namun juga filosofinya. Semangat pusat dalam penulisan sejarah yang selama Orde Baru tidak dapat diganggu gugat, mulai dibongkar dengan metode penulisan sejarah yang memberi ruang pada sejarah-sejarah lokal. Namun sayang, umur kurikulum ini tidak bertahan lama, akibat dari perspektif baru terhadap peristiwa 1965, yang diimplikasikan dengan penulisan G30S dan bukan G30S PKI seperti biasanya, sebagian masyarakat dan guru yang tidak setuju turun ke jalan dan membakar buku-buku sekolah tersebut.

Pada tahun 2004 diluncurkan buku pelajaran baru yang menyediakan tempat lebih besar bagi sejarah daerah. Akan tetapi, kurikulum ini pendek usianya. Disebabkan hanya menyebutkan kudeta gerakan 30 September 1965 dengan istilah 'G30S', bukan 'G30S/PKI', sehingga buku pelajaran itu menjadi sasaran kecaman masyarakat (Nordholt, 2008:19).

Gejolak itu pun pada akhirnya melahirkan keputusan Mahkamah Agung yang mengeluarkan ketetapan keharusan untuk menggunakan PKI dalam setiap penulisan peristiwa G30S dalam buku sejarah. lebih lanjut, pada tahun 2006 dikeluarkan kurikulum baru dan buku revisi atas kurikulum 2004, yang isinya jauh lebih normatif dan kelihatan berupaya untuk mewedahi semua pihak. Dalam tekana dan dorongan versi sejarah yang terus bertarung itulah buku sejarah hari ini lebih merupakan monumen atau prasasti tempat dimana setiap kelompok ingin menaruh namanya sebagai bagian dari yang ikut mendirikan republik dan karenanya berhak atasnya.

Gerry Van Klinken menulis, setelah jatuhnya orde baru, sejarah adalah ruang dimana semangat reformasi mengambil tempat. Tidak hanya isu seputar peristiwa besar 1965 yang menjadi sorotan. Lebih jauh dari itu, sejarah yang berangkat dari semangat etno nasionalisme lokal juga ikut menggugat sejarah nasional. Aceh dan Papua adalah dua wilayah yang giat menelusuri sejarah lokal untuk menemukan legitimasi atas upaya mereka memisahkan diri dari Republik Indonesia. keduanya, berupaya menemukan akar historis yang lebih panjang dalam kaitan dengan etnisitas masing-masing.

Gerakan sejarah lokal seperti yang terjadi di Aceh dan Papua, merupakan bagian dari tantangan yang lebih besar atas sejarah yang dalam bahasa Bambang Purwanto disebut “Indonesia sentris”.

Desentralisasi dan demokratisasi rupanya juga menerpa sejarah. Pertarungan pada level politik lokal, ikut menyerat sejarah kewilayah nasionalisme lokal. Seperti yang dicatat oleh Gerry Van Klinken dalam essaynya yang berjudul “The Battle For History after Soeharto”

Cities around the country have taken to celebrating their “birthdays” with considerable fanfare. Exactly how the precise years of birth is calculated is not always clear, but the historical snippets local newspapers carry connect the city with what its inhabitants know about national history. For the sake of nationa-building, the New Order in 1971 renamed the South Sulawesi city of Makassar as Ujung Pandang, a name with fewer ethnic association. When President Habibie gave the city back its original name in October 1999, he was no doubt linking pride to his own hopes in

the upcoming presidential election. Museum devoted to local history and culture often play the same nationally integrating function(Klinken, 2005: 254).

Apa yang terjadi dengan Habibie dan Sulawesi Selatan kini terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia. Hampir semua daerah berupaya membangun narasinya sendiri untuk mendapat tempat dalam narasi sejarah republik yang sentralistis. Berbagai gerakan kebudayaan lokal yang kini marak juga dapat dilihat dalam kerangka ini. Bahkan tidak hanya berhenti pada daerah, berbagai kelompok agama dan aliran politik pun ingin ikut mewarnai sejarah.

Terkait hal ini, fenomena lahirnya buku-buku sejarah alternatif yang merupakan tafsir atas peristiwa 1965, sebagian juga ditulis oleh kelompok nasionalis kiri, yang ingin ikut mencatatkan kelompoknya dalam narasi pembangunan nasionalisme Indonesia. Kelompok Islam juga berupaya melakukan hal sama dengan cara menunjuk Sarekat Islam sebagai tonggak kebangkitan nasional yang sesungguhnya. Berbagai argumentasi pun dikemukakan untuk mendukungnya dan terakhir, kita melihat mulai lahirnya dorongan yang sama dari kelompok Kristen dan Katolik. Hal ini misalnya, terlihat dari masuknya bab soal penyebaran Kristen dalam buku Sejarah, yang secara implisit bermaksud membedakan Kristen dengan kolonial.

Jika pada era Orde Lama dan Orde Baru, kita dapat menemukan pola sejarah yang kuat, hal yang sama tidak terjadi di era kekuasaan Orde Reformasi. Apa yang justru terlihat adalah negara retak. Pertarungan elit kekuasaan yang dimungkinkan oleh desentralisasi dan demokratisasi rupanya membuat setiap orang kini berpeluang untuk ikut mendorong kepentingan tertentu agar dapat masuk dalam sejarah. Singkat kata, identitas nasional Indonesia dewasa ini sedang dinegosiasikan kembali, dan dalam waktu dekat belum terlihat akan menemukan bentuk barunya yang solid.

4.2 Analisis Order of discourse

Buku sejarah untuk sekolah menengah pertama yang diperuntukan bagi kelas 8 (SMP kelas 2) memulai uraiannya mengenai sejarah nasional dengan periode kolonial. Hal ini rupanya merupakan bagian dari standar isi kurikulum 2006 yang sekarang menjadi pijakan penulis buku sejarah untuk sekolah. Pembabakan sejarah periode kolonial merupakan bagian dari pembabakan yang didahului dengan periode pra kolonial, yang materinya antara lain meliputi beberapa hal seperti bab mengenai “Asal usus nenek moyang bangsa Indonesia”, “kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia”, dan “kerajaan Islam serikat Hindu”. Tema-tema pra kolonial merupakan bagian dari materi sejarah kelas 7 (SMP kelas 1).

Pembabakan sejarah yang diberlakukan buku sekolah menyiratkan pola yang sama dengan model historiografi kolonial. Hal ini tampak dalam pembagian periodisasi yang dimulai dengan sejarah pra kolonial (era Hindu dan Islam), kolonial (penjajahan Portugis, Belanda, dan Inggris), lalu pasca kemerdekaan (Orde Lama, Baru, dan Reformasi). Dalam hal ini, terlihat satu pola perkembangan dimana masa pra kolonial adalah era “kegelapan”, disusul oleh “cahaya” peradaban kolonial. Dengan sedikit modifikasi, era kolonial dalam buku sejarah sekolah, ditempatkan titik balik kebangkitan nasional. Dalam hal ini, Nordholt berkomentar:

Para sejarawan baru Indonesia membangun sejarah nasional mereka di atas basis kolonial. Meskipun slogan nasional menyerukan persatuan tetapi menghargai keanekaragaman, dan meskipun ada iklim egaliter dalam evolusi itu tetapi asal usul Indonesia tetap dipancarkan kuat-kuat pada imperialisme Majapahit yang berpusat di Jawa. Pandangan ini mengeluh-elukan kebesaran Gajah Mada dan orang-orang kuat lainnya yang ekspansionis. Sebuah buku pelajaran kolonial karangan Fruin-Mees (1919-1920) berperan dalam hal ini sebagai sumber inspirasi (Reid, 1979, dalam Nordholt, 2008: 8-9)

Buku sejarah hari ini memang telah jauh berbeda dengan buku sekolah semasa orde baru ataupun orde lama, yang memberi penekanan pada soal emperium Majapahit dan Sriwijaya. Kedua kerajaan tersebut pun, tidak lagi menjadi sentral penjelasan sejarah. Kendati demikian, semangat yang dibawanya masih saja tetap

sama. Yaitu, seperti apa yang dikatakan Nordholt, sejarah masih saja menjadi tempat bagi bangunan narasi monumental. Tempat dimana nasionalisme dipancarkan dalam-dalam, melalui narasi keagungan imperium dan tokoh besar sebelum dan pada saat kolonialisme beroperasi di Nusantara.

Terkait periodisasi, sejarah nasional mendapatkan inspirasinya dari sejarawan kolonial. Dimana periodisasi sejarah nasional sama dengan pembagian Stapel, dimulai dari kerajaan hindu budha, islam, lalu dibagian akhir Belanda jadi pusat penceritaan yang menjadi nusantara tercerahkan. Belanda adalah aktor dan pribumi adalah obyek sejarah yang bungkam. Moral inilah yang kemudian dibalik, dengan melucuti citra kolonial sebagai era dimana kemanusiaan absen.

*Penulisan sejarah kolonial merupakan format yang sama dalam versi yang berbeda dari penulisan sejarah nasional. Hal ini nampak dalam penulisan sejarah versi Belanda. Titik puncak historiografi kolonial Belanda adalah karya lima jilid dari Stapel, *Geschiedenis van Nederlandsch-indie (Sejarah Hindia Belanda), 1938-1940*(Nordholt, 2008: 7).*

Satu hal yang tidak berubah dari order of discourse buku sejarah adalah upayanya yang terus menerus menunjuk periode kolonial dan kolonialisme sebagai “yang bukan Indoensia”. Kehendak ini amat kentara dari susunan kurikulum pengajaran sekolah mulai dari Sekolah Dasar(SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), pengajaran sejarah disekolah paling banyak menghabiskan waktu dan memberikan energi paling besar pada periode kolonialisasi dan lahirnya kesadaran nasional.

Buku sekolah kelas 8, setidaknya menghabiskan 12 bab untuk membicarakan periode kolonialisasi dan lahirnya identitas kebangsaan. Bab tersebut antara lain bertemakan “ Perkembangan kekuasaan Barat di Indonesia”, “Peninggalan Sejarah bercorak Kolonial”, “Peran berbagai Golongan dan Pembentukan Identitas Nasional”.

Sepertiga bagian lain dari isi buku ini, membicarakan periode kolonialisasi Jepang. Singkatnya periode kolonial Jepang di tanah air, juga diwakili oleh sedikitnya narasi sejarah yang menceritakannya. Ini terlihat dari jumlah halaman yang dihabiskan untuk membicarakannya, yaitu 58 halaman. Bandingkan dengan

perbincangan mengenai kolonialisasi Barat (Belanda) yang mencapai 140 halaman.

Jumlah halaman memang bukan satu-satunya faktor yang bisa dijadikan pijakan untuk menilai kurangnya perhatian buku sejarah sekolah pada periode kolonialisasi Jepang. Pada periode kolonialisasi Jepang, bangsa Indonesia (kesadaran nasionalisme) telah tumbuh dan berkembang, sehingga pada masa pendudukan Jepang, tema-tema sejarah yang dipilih adalah seputar persiapan kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya, kita menemui bab seperti “Peristiwa Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia” dan “Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan dan Negara”. Narasi yang demikian seolah ingin mengatakan bahwa proses kesadaran nasional sudah final pada periode sebelumnya. Penekanan narasi pada soal persiapan kemerdekaan Indonesia, tentu saja berpotensi mengabaikan peninggalan budaya kolonial Jepang di tanah air.

Lebih jauh dari itu, hal ini mengindikasikan bahwa identitas nasional dalam sejarah dinarasikan dengan cara menunjuk kekuasaan kolonial sebagai ‘liyan’. Dalam bahasa Bambang Purwanto, sejarah Indonesia seolah selalu ditulis dalam ketakutan akan kembalinya kolonialisme. Itulah mengapa pada periode awal pembentukan bangsa, kita mengenal istilah “presiden adalah orang Indonesia asli”. Kalimat semacam itu hanya mungkin ada dalam konstitusi suatu bangsa yang traumatik atas penindasan kolonial. Kalimat tersebut tidak lain merupakan antisipasi atas ketakutan kembalinya bangsa ‘asing’ yang menindas. Pilihan ini mungkin logis dalam kondisi negara yang baru saja merdeka dan masih mengalami ancaman kolonial secara nyata. Namun, historiografi Indonesia masih perlu menjawab pertanyaan Bambang Purwanto dalam bukunya *Kegagalan Historiografi Indonesia*.

Jika Nasionalisme Indonesia pada pergerakan nasional sampai revolusi setelah kemerdekaan diproklamasikan merupakan antitesa atau kontra ideologi terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda, apakah pemahaman yang sama tentang nasionalisme Indonesia masih relevan dengan Indonesia yang telah merdeka? (Purwanto, 2006: 173).

Warisan rezim sejarah yang dibangun semenjak awal kemerdekaan, rupanya masih juga menjadi roh penulisan sejarah hari ini. meski telah melalui perjalanan

panjang, sekilas dapat disimpulkan bahwa bangsa Indoensia membangun identitas dengan menunjuk kolonialisme sebagai yang bukan mereka atau “liyan”.

Hanya saja berbeda dengan buku-buku sejarah sebelumnya, terutama pada era Orde baru. Isu identitas nasional, dinyatakan dengan lebih tegas pada buku sejarah di Era Reformasi. Sepertinya ada dorongan yang kuat untuk menyatakan diri dengan lebih nyata. Hal ini misalnya terlihat dari pilihan judul bab seperti “Peran Berbagai Golongan dan Pembentukan Identitas Nasional”.Meskipun tentu saja ada konsekuensi dari pilihan ini. Mengiangt tema tersebut merupakan tema besar yang tidak cukup dijelaskan dengan hanya 13 lembar halaman buku sekolah (buku sekolah kelas 8). Belum lagi, kita bisa menanyakan apakah materi seperti identitas nasional tepat disampaikan pada anak pada tingkat dua Sekolah Menengah Pertama (SMP)?

Otoriternya sejarah semasa orde baru, rupanya telah melahirkan dorongan dari berbagai pihak yang selama ini dinegasikan oleh sejarah resmi untuk meminta ruang dalam sejarah nasional. Hal ini terlihat dari pelbagai bab dan sub bab baru, yang tidak mungkin muncul pada era orde baru. Antara lain, dalam narasi menyangkut peran berbagai golongan yang ikut terlibat dalam pembentukan kesadaran nasional, Partai Komunis Indonesia (PKI) masuk didalamnya. sejarah perkembangan Kritsen di Indonesia pun kini jadi bagian dari narasi sejarah. Sejarah nasional kini berupaya memasukan agama minoritas seperti kristen ke dalam narasi sejarah nasional. Hal ini rupanya terkait dengan upaya memisahkan antara kristen dengan praktek kolonialisasi Eropa. Seolah ada upaya untuk membersihkan stigma negatif kristen sebagai agama penjajah.

Tidak hanya kristen dan PKI, gerakan pendidikan seperti INS kayu tanam yang sebelumnya tidak pernah masuk dalam perbincangan sejarah pendidikan nasional, kini diperkenalkan dalam buku sejarah. Bila pada masa orde baru dan orede lama, kita hanya dikenalkan pada satu saja tokoh pendidikan dan gerakan pendidikan yang mewakili nasionalisme Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara dan sekolahnya Taman Siswa, maka kini kita juga diperkenalkan pada Muhamad Syafei dan INS Kayu Tanam. Ini bentuk lain akomodir sejarah nasional terhadap mereka yang tersisihkan. Muhamad Syafei merupakan tokoh nasional yang pernah

terlibat dengan PRRI PERMESTA, ia pernah menjabat sebagai menteri pendidikan PRRI PERMESTA. Hal ini tentu bagian dari apa yang mesti disukuri, ketika sejarah kian plural dan mampu mengakomodir kelompok minoritas.

Dalam serangkaian deret kelompok minoritas dan perspektif baru dalam sejarah nasional hari ini (PKI, Kristen, INS Kayu Tanam), adalah juga Isu gender yang kini juga mendapat ruang dalam buku sekolah, terutama dalam konteks emansipasi perempuan. Dalam narasi mengenai pergerakan nasional dan kelompok-kelompok yang ikut menumbuhkannya, gerakan perempuan dinilai memberi sumbangsih yang besar pada lahirnya kesadaran dan identitas nasional.

Sejarah hari ini tidak hanya membawa angin segar dari kian demokratis penulisan sejarah, namun juga masih menyisakan warisan gaya penulisan sejarah yang bercorak Orde Baru, yaitu negara sentris. Sejarah masih juga mencurigai berbagai identitas etnis yang ada. Sehingga narasi buku sejarah terkesan menghindari perbincangan mengenai organisasi kedaerahan. Sejarah etnisitas ataupun sejarah lokal, dicuragi sebagai penghalangan bagi tumbuhnya nasionalisme dan kesadaran nasional. Itulah mengapa dalam apa yang dikatakannya sebagai kelompok-kelompok yang berperan dalam tumbuhnya identitas nasional, kategori yang digunakan bukan etnisitas melainkan “Perempuan, Islam, Kristen, Pers, Guru”. Pilihan ini nampaknya sengaja dilakukan demi menghindari pembicaraan mengenai etnisitas.

Etnisitas tentu saja tidak dapat dihindari dalam penulisan sejarah nasional, seperti diungkapkan Bambang Purwanto, pertumbuhan kesadaran etnisitas berbarengan dengan pertumbuhan nasionalisme Indonesia itu sendiri. Oleh karenanya, dalam perbincangan mengenai Sumpah Pemuda, buku sejarah menuliskan hampir semua kelompok etnis yang ikut didalamnya. tentu saja dengan narasi yang dirajut oleh kepentingan identitas nasional. Historiografi semacam ini, yang merupakan warisan Orde Baru, menurut Bambang Purwanto berpotensi “menumpulkan” nasionalisme itu sendiri.

Adanya campur tangan negara yang sangat besar dalam proses pembentukan identitas kebangsaan...mengakibatkan nasionalisme yang

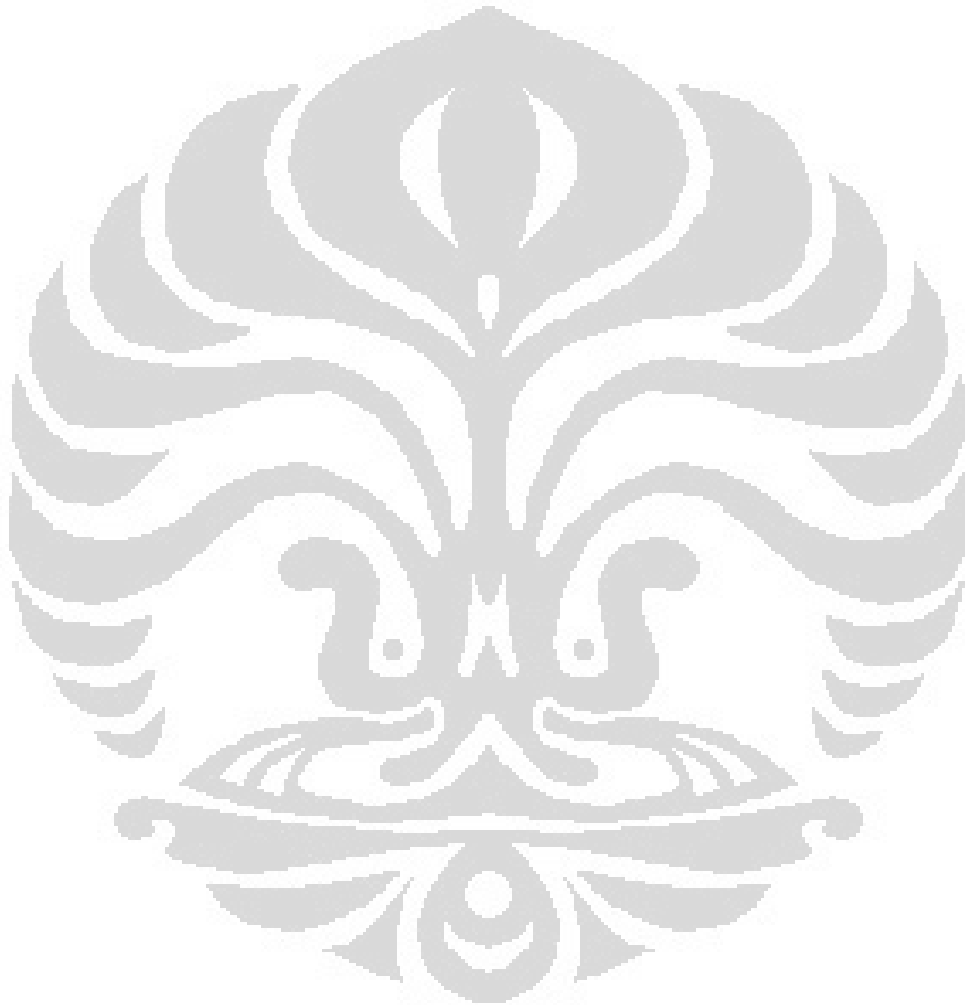
berkembang adalah nasionalisme negara dan bukan nasionalisme populer yang berakar kuat pada masyarakat Indonesia (Purwanto, 2006: 165).

Masih besarnya peran negara dalam penulisan sejarah tidak serta merta sama dengan gagasan negara ala orde baru yang mendefinisikan sejarah sebagai sejarah militer. Ini ciri lain sejarah hari ini. corak militer yang kental dalam histografi orde baru dihilangkan sama sekali. Sejarah hari ini tidak memberikan lembar demi lembarnya pada kisah heroisme TNI dalam membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan. Narasi mengenai perang lebih banyak di dominasi oleh kisah kepahlawanan Diponegoro, Iman bonjol, dan banyak lain. Militer tidak lagi tampil dalam posisi sebagai subjek dalam cerita, militer kini tidak lebih seperti halnya narasi-narasi lain menajdi objek penceritaan.

Namun hilang militerisme dalam sejarah bukan berarti hilang pula beban politik didalamnya. sebaliknya justru itu yang kini terjadi, pada kasus kali in bukan hanya negara yang punya sejarah, berbagai kekuatan politik dan golongan pun ingin ikut bermain dan memastikan kelompok mereka dapat tempat yang terhormat dalam sejarah sebagai bekal legitimasi. Sejarah yang penuh pesan politik dan golongan menjadikan materi sejarah berat bagi konsumsi anak. Penyajian narasinya pun terlepas-lepas, atau tidak menemui rangkaian yang utuh. Dari satu bab ke bab lain atau dari satu sub bab ke sub bab lain seolah tidak terhubung dengan baik. Banyaknya materi juga menjadikan tiap materi dalam bab tidak terjelaskan dengan penuh, karena harus berbagi ruang satu dengan yang lainnya.

Pada akhirnya narasi buku sejarah seolah skizofrenia, layaknya ingatan yang muncul dan tenggalam. Sejarah adalah formalitas untuk menyatakan kehadiran dari pelaku sejarah (orang atau kelompok) tanpa menghadirkan proses. Sejarah tidak lain prasasti atau mendali penghormatan bagi jasa para pahlawan. Sejarah kehilangan kemampuannya untuk mengelaborasi persoalan yang justru penting untuk tumbuh kembang kemanusiaan dan kesadaran kebangsaan anak didik. Sejarah yang menghindari sosiologi seperti Ini adalah ciri gaya penulisan sejarah warisan kolonial, seperti yang di ungkapkan Henk Schulte Nordholt dalam Essaynya “De- colonializing Indonesian Histography”.

Apart from participating in state-sponsored projects, professional historians in Indonesia were engaged in non-sensitive research topics. They went so to speak in exile by writing about regional and/or a-political socio-economic histories, preferably located in the colonial period. There was also a tendency to use models derived from the social sciences in order to describe the past in terms of structures without processes and without 'empirical imagination'. Like in the colonial period, New Order historiography produced histories without people (Nordholt: 2004).



BAB 5

KESIMPULAN, DISKUSI, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Identitas nasional Indonesia hingga hari ini, sebagaimana dapat dilihat pada buku sejarah, masih juga merupakan kelanjutan dari bentuk-bentuk kuasa/pengetahuan yang bercorak kolonial. Kuasa/pengetahuan dalam pengertian ini, tentu saja bukan sekedar persoalan dalam proses seperti apa bangsa Indonesia menjadi atau golongan mana saja yang ikut melahirkannya? Melainkan, lebih dari pada itu, kolonialisme dalam upaya perumusan identitas nasional justru terjadi pada tataran epistemologi.

Sebagaimana kritik yang ditunjukkan Pramoedya Ananta Toer, sejarah nasional masih juga menjadikan arsip kolonial sebagai bahan baku utama perumusannya. Naskah-naskah yang dipilih sebagai bukti sejarah juga merupakan naskah-naskah yang ditulis dalam bahasa Melayu tinggi (bahasa Indonesia hari ini), yang merupakan hasil kodifikasi Belanda. Selama ini kritik sejarah nasional terhadap historiografi kolonial, hanya pada tataran pembalikan nilai moral. Bila pangeran Diponegoro dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah kolonial, maka dalam sejarah nasional adalah pahlawan. Sementara epistemologi yang dipakai untuk melihatnya masih juga sama.

Sejarah dipandang sebagai ilmu yang dapat merekonstruksi masa lalu yang objektif. Dimana negara bangsa, diandaikan sebagai kenyataan sejarah evolusi umat manusia, dari pra modern menuju masyarakat modern. Sejarah dilihat sebagai gerak lurus, mengikuti filsafat Hegelian. Absen kritik terhadap pola pikir semacam ini dalam historiografi nasional, pada akhirnya menempatkan nilai-nilai yang dikategorikan sebagai non modern, sebagai kuno dan bagian dari masa lalu yang mesti ditinggalkan.

Pandangan semacam inilah yang beroperasi dalam bab-bab buku sejarah, dimana Indonesia yang berbangsa-bangsa, diturunkan derajatnya menjadi suku bangsa Sunda, Jawa, Minang, dan banyak lain. Bahkan nilai-nilai kesukuan masih juga dicurigai sebagai nilai yang dapat menghambat persatuan nasional. Corak pandang

sejarah semacam ini tidak mungkin tidak lahir dari sejarah yang sentralistik. Sejarah nasional dengan kata lain adalah sejarah negara. Sementara rakyat adalah objek sejarah dan negara (para elit) subjek yang menulis sejarah. Tidaklah mengherankan bila sejarah nasional dikatakan oleh Nordholt sebagai sejarah “tanpa manusia”. Sejarah lebih berpusat pada pahlawan-pahlawan besar, tanpa pembicaraan kehidupan orang-orang kebanyakan.

Ciri lain dari sejarah nasional yang corak kolonial adalah kehendak yang besar untuk menemukan keaslian. Hal ini amat kentara semenjak dimenangkannya gagasan Soekarno sebagai cara memandang sejarah yang “benar” dalam kongres sejarah kedua di Jogjakarta dan hingga kini terus berlanjut. Pandangan mengenai bangsa yang digagas oleh Ernest Renan, sebagai sebuah semangat, mengeskpresikan suatu kesamaan jiwa dan landasan sejarah pada mereka yang bersatu sebagai sebuah bangsa. Semangat Renan inilah yang digaungkan Soekarno dalam kongres Sejarah dan hingga kini masih menjadi nafas historiografi Indonesia.

Di era awal kemerdekaan, kuasa/pengetahuan semacam inilah yang melahirkan narasi hukum yang berbau diskriminatif seperti “Presiden haruslah orang Indonesia asli”. Meski hal semacam itu tidak lagi kentara hari ini, namun upaya melekatkan Indonesia dengan Sriwijaya dan Majapahit sebagaimana yang dilakukan sejarah, menunjukkan masih terisainya kehendak untuk menemukan dasar yang “asli” dari identitas kebangsaan Indonesia. Sejarah bercorak Renanian,, terus menerus mendesak kita untuk mengintrogasi sejarah dengan pertanyaan-pertanyaan seputar asal usul kebangsaan kita?

Di Indonesia dilihat sebagai kenyataan sejarah yang telah ada jauh sebelum 1945, padahal kerangka semacam ini tidak lain bentuk pemaksaan terhadap sejarah. Sejarah melulu dilihat dengan kerangka pandangan hari ini. Persis sejarah semacam inilah yang disinggung Foucault dalam frasenya “sejarah hari ini”. Bahaya operasi kuasa/ pengetahuan semacam ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Hilmar Farid dalam essaynya “Pramoedya dan Historiografi Indonesia”, mengarah pada suatu pola pandang esensial dalam melihat bangsa dan

berimplikasi mengeklusi kelompok-kelompok minoritas Tionghoa dan indo-Eropa.

Formasi kuasa semacam inilah yang justru ingin dilawan oleh Pramoedya. Dengan suatu usaha, yang justru mungkin tidak disangka oleh Pramoedya sendiri. Dekolonialisasi metodologi sejarah yang dilakkukannya dengan menggunakan sumber sejarah yang tidak lazim seperti dongeng, wawancara, dan naskah yang ditulis dalam bahasa Melayu pasar, dikemudian hari berhasil mencungkilkan suara mereka yang dibungkam oleh historiografi kolonial. Pramoedya menguncang kemapanan jamannya dengan mengatakan bahwa Indoensia merupakan gagasan yang pada awalnya dikandung oleh para penulis novel Tionghoa dan Indo Eropa.

Kritik Pramoedya pada akhirnya ingin mengatakan bahwa Indonesia adalah kenyataan politik yang baru saja lahir diakhir abad ke 19. Indoensia bukan Sriwijaya ataupun Majapahit. Indonesia adalah bangsa yang lahir dan dilahirkan atas kemukaan pada sistem kolonial yang menindas, karenanya bangsa Indonesia menurut Farid adalah bangsa yang dari lahir kesepakatan sosial dari mereka yang mengkehendaki kesetaraan dan keadilan.

Tujuan awal inilah yang menurutnya, kini telah banyak dilupakan, dan terkubur dalam glorifikasi-glorifikasi dan angan-angan tentang sebuah bangsa yang dasarnya dapat ditelusuri sampai pada keagungan Sriwijaya dan Majapahit. Padahal keduanya adalah kerajaan (di mana kekuasaan dilandaskan pada darah dan penghambaan menjadi kebenaran) yang imperialis dan menindas, sementara Indonesia adalah Republik (berdasarkan demokrasi dan otonomi Individu). Dengan kata lain, menarik garis sejarah antara Indoensia dan Sriwijaya dan Majapahit, sama sekali berlawanan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Namun disaat bersamaan, mengatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai produk modernitas yang dihasilkan oleh intelektual bumiputra yang mengenyam pendidikan Barat, juga sama salah kaprahnya. Seolah satu-satunya bagi model negara bangsa hanya Eropa. Nasionalisme dalam negara-negara dunia ketiga tidak lain adalah tiruan atau bentuk modular dari nasionalisme Eropa. Sejarah seolah berhenti, apa yang dilakukan anak bangsa, semenjak era kolonial dan hingga

kini, tidak lain mencocokkan negara bangsa dan demokrasi dengan apa yang telah terjadi di Eropa.

Amat disayangkan, pandangan demikian mengemuka dalam penulisan buku sejarah, dimana penjajahan adalah musibah sekaligus berkah. Disatu sisi, menindas namun disisi lainnya mencerahkan. Pelekatan Indoensia dengan Kolonialisme, juga bukan pilihan yang paling baik. Pertanyaan paling kontemporer pada sejarah sekolah hari ini adalah, apakah kita masih perlu memberi demikian banyak ruang pada sejarah kolonial, seolah kita masih dalam ancaman kolonialisme? Dalam bahasa Bambang Purwanto, sejarah nasional ditulis dalam ketakutan akan ancaman kembalinya kolonialisme.

Seperti kata Nietzsche, ketika berhadapan dengan sejarah, “kita mesti tahu kapan harus mengingat dan kapan harus melupa”. Akhirnya sejarah dan identitas bukanlah soal kebenaran, namun kegunaan. Kendati demikian, penelitian ini tidak untuk memberikan jawaban yang sifatnya formulasi bagi penulisan kurikulum sejarah dimasa yang akan datang. Penelitian ini baru sebatas, mengungkapkan persoalan-persoalan yang mengemuka dalam perumusan identitas nasional dalam kerangka selera kekuasaan. Itu pun sebatas pada apa yang tampak dalam buku sejarah, meski praktik tafsir terhadapnya mungkin saja bisa berbeda sama sekali. Pada akhirnya, menjadi penting untuk melanjutkan upaya penelusuran sampai pada tataran “*reseption studies*”, demi memberi suara pada yang “dibungkam” sejarah.

5.2 Diskusi

Sejarah di era dimana kekuasaan negara tidak merupakan satu kesatuan yang utuh, sebagaimana di jaman Orde Baru, menjadikan narasinya berupa prasasti yang penuh dengan berbagai kepentingan yang ingin mencatatkan golongan dan kelompoknya sebagai yang juga ikut melahirkan negara bangsa dan karenanya berhak atasnya. Sejarah yang dulu terpusat dan dikuasai negara, kini mendapat tantangan. Gerakan sejarah lokal seperti yang terjadi di Aceh dan Papua, merupakan bagian dari tantangan yang lebih besar atas sejarah yang dalam bahasa Bambang Purwanto disebut “Indonesia sentris”.

Desentralisasi dan demokratisasi rupanya juga menerpa sejarah. Pertarungan pada level politik lokal, ikut menyerat sejarah kewilayah nasionalisme lokal. Kini setiap kota dan provinsi memiliki sejarah resminya sendiri. Semangat menulis sejarah terjadi dimana-mana seiring dengan tumbuhnya demokratisasi dan desentralisasi. Sejarah lokal merupakan legitimasi yang kuat bagi para politisi yang mengembangkan strategi etno nasionalisme, untuk memenangkan pertarungan politik lokal.

Tegangan semacam ini pun tampak dalam penulisan sejarah nasional. Masuknya isu Gender, rehabilitasi peran politik kiri, dan bahkan munculnya beberapa nama yang pada sejarah sebelumnya dianggap sebagai pemberontak seperti Muhamad Syafei, sebagai seorang pahlawan dibidang pendidikan. Namun diantara semangat perubahan, sejarah masih juga mengalirkan kuasa/pengetahuan yang berlaku di era kolonial.

Satu gejala yang amat kentara terlihat adalah kehendak yang besar untuk menemukan asal atau keaslian, seperti tampak dari pesejajaran terus antara Indoensia dengan Sriwijaya dan majapahit. Upaya untuk menghubungkan Indonesia dengan masa lalu kerjaan-kerjaan kuno tidak mungkin tidak lahir dari sejarah yang menghendaki suatu dasar historis yang asali bagi berdirinya sebuah bangsa, sebagaimana disyaratkan oleh Renan, dan kemudian di populerkan oleh Muhamad Yamin dan Soekarno dalam kongres sejarah pertama dan kedua.

Berbeda dengan Muhamd Yamin, Aidit, dan sejarawan nasionalis waktu itu, Pramoedya justru menilai Indonesia adalah konstruksi modern yang belum terlalu tua usianya.

Pada mulanja Indoensia tidak lebih dari sebuah istilah geografi, tapi dengan pasangnja gerakan kemerdekaan nasional nonkooperartif kemudian menjadi hukum dan menajdi istilah politik [...] karena Indonesia dewasa ini telah menjadi istilah politik, hukum, dan telah menjadi nama dari negara kita, pada umumnya orang mudah melupakan bagaimana asal-usulnja sampai diterima menjadi nama dari negara kita. Terutama adalah perdjjuangan politik yang memungkinkanja demikian (Toer,1964: 4, dalam Farid,2007: 98)

Temuan tersebut merupakan guncangan bagi diskursus yang mapan ketika itu, yang menanamkan pancang nasionalisme jauh-jauh pada era Majapahit dan Sriwijaya. Dalam upayanya yang tekun untuk memahami genealogi nation, Pramoedya justru melihat asal usul Tionghoa dan Indo-Eropa dalam pembentukan nasion. Perhatiannya yang besar pada pembentukan ide mengenai nasion yang berkembang melalui pers dan penerbitan membawanya menemukan tali temali antara para jurnalis Bumi Putra, Tionghoa, dan Indo-Eropa dalam meramu gagasan mengenai nasion.

Berbeda dengan narasi mapan mengenai keaslian nasion Indonesia yang melulu dihubungkan dengan peranan pribumi. Pramoedya justru menekankan *cultural hybridity* dari nasion. “Ia melihat bahwa ‘sastra asimilasi’ dan sastra pra-Indoensia yang didominasi oleh orang Tionghoa dan Indo-Eropa yang ditulis dalam bahasa Melayu pasar atau Melayu rendah adalah basis berkembangnya gagasan tentang ‘Indonesia’ (Farid,2007: 101).

Keberhasilan Pramoedya tersebut untuk mengetengahkan Hibriditas bangsa, hanya dimungkinkan oleh kemampuannya untuk melampaui historiografi kolonial, yang menjadi kebenaran dimasanya. Dimana salahs cirinya adalah pemujaan pada tulisan (bukti tertulis) dan pemisahan yang ketat antara dan sejarah, sastra, dan politik. Pemisahan antara sastra, sejarah, dan politik, merupakan diktum ilmu sejarah, yang berkembang semasa pencerahan di Eropa abad ke 19. Pada kasus Indonesia gagasan ini dibakukan dan dibawa oleh para sarjana kolonial. Sehabis kemerdekaan nyaris tidak ada perlawanan terhadap pola ini, kecuali sebatas merubah nilai moralnya.

Pramoedya melabrak segala hal yang dikategorikan sebagai cara menulis sejarah yang mapan. Dengan menggunakan sastra sebagai medium penulisan sejarah, Pramoedya membebaskan sejarah dari klaim netralitas dan objektivitas yang membuat ilmu sejarah menjadi sesuatu yang kering dari imajinasi. Sebaliknya, ia memenuhi sejarah dengan politik, imajinasi, dan subjektivitas yang merupakan hal-hal yang ditabukan oleh sejarah yang mengabdikan pada kaidah ilmiah warisan kolonial.

Penelusuran sejarah seperti yang dilakukan Prmoedya, pada akhirnya mampu memberi peluang pada lahirnya suatu jenis histografi yang memberi tempat pada kebanyakan orang untuk ikut menulis sejarah. Sejarah bukan lagi tempat bagi orang-orang besar dan penguasa, yang menjadikannya tidak memiliki relevansi pada rakyat luas. Bagi Hilmar Farid, upaya Orde Baru merepresi modus sejarah seperti Pramoedya, merupakan upaya untuk membungkam suara radikalisme rakyat, dan karenanya “menggambarkan kekuasaan kolonial dan Orde Baru sebagai *continuum*” (Farid, 2007: 97). Melanjutkan Farid, maka masih berkembang suatu jenis diskursus sejarah yang mencari “kebenaran” dalam terminologi positivisme seperti hari ini, juga menunjukkan bahwa reformasi dan demokrasi belum mampu membawa kita keluar dari histografi kolonial.

5.3 Saran

5.3.1 Saran Akademis

Identitas nasional merupakan suatu fenomena yang luas, tidak hanya terjadi pada tataran teks dalam buku, juga dalam praktek keseharian. Pendekatan analisis teks dalam studi ini tentu saja memiliki keterbatasan. Diperlukan suatu pendekatan lain untuk melengkapinya. Terutama terkait studi penerimaan, ini penting dalam upaya memberi suara pada kelompok-kelompok marjinal Tionghoa, sebagian kelompok Islam, eks PKI, dll) yang selama ini ditindas dalam sejarah nasional. Melalui studi penerimaan, diharapkan dapat memunculkan kritik ataupun suara alternatif terhadap hegemoni penulisan sejarah hari ini, yang kental akan kuasa/pengetahuan kolonial.

5.3.2 Saran Praktis dan Sosial

1. Upaya perumusan kurikulum nasional sejarah kedepan perlu untuk memperhatikan gejala-gejala pascakolonial, yang diwariskan turun temurun semenjak era kolonia. Hal ini penting terutama dalam kaitannya dengan identitas nasional yang lebih plural, yang dapat menerima keberagaman bukan sebagai ancaman.
2. Sejarah semestinya tidak lagi menjadi milik kelompok elit nasional, yang memaksakan selera kekuasaannya pada seluruh bangsa Indonesia. Penulisan

sejarah yang bercorak “Indonesia Sentris”, tidak lagi cocok bagi suasana demokrasi, yang menghendaki sejarah. karena itu, sejarah nasional perlu memberi ruang pada lokalitas-lokalitas sejarah daerah.

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict. 2002. *Komunitas- komunitas Terbayang*. Yogyakarta. Insist.
- Barker, Chris. 2000. *Cultural Study: Theory and Practice*. London-Thousand Oaks-New Delhi. Sage Publications.
- Foucault, Michel. 2002. *Pengetahuan dan Metode : Karya-Karya penting Foucault*. Yogyakarta. Jalasutra.
- _____. 2008. *La Volonte de Savoir : Ingin Tahu Sejarah Sexualitas*. Jakarta. Yayasan Obor.
- _____. 1974. *The Order Of Things : An Archaeology Of Human Sciences*. London and New York. Tavistock/Routledge.
- _____. 2002. *Power/Knowledge*. Yogyakarta. Bentang
- G. Singh, Jyotsna. 1996. *Colonial Naratives/Cultural Dialogues*. London and New York. Routledge.
- Gandhi, Leela. 2001. *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*. Yogyakarta. Qalam.
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta. Kompas
- _____. 2007. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, Dan Pornografi*. Yogyakarta. Kanisius.
- Kendall, Gavin and Wickham, Gary. 1999. *Using Foucault's Methods*. London-Thousand Oaks-New Delhi. Sage Publications.
- _____. 2001. *Understanding Culture: Cultural Studie, Order, Ordering*. London-Thousand Oaks-New Delhi. Sage Publications.

- Lechte, John. 2001. 50 Filsuf Kontemporer: Dari Strukturalisme Sampai Postmodernitas. Yogyakarta. Kanisius.
- Littlejohn, Samuel W. and Foss, Karen A. 2005. *Theories of Human Communication Eight Edition*. Belmon, USA. Thomson Wadsworth.
- Loomba, Ania. 2003. Kolonialisme/Pascakolonialisme. Yogyakarta. Bentang Budaya.
- Mulder, Niels. 2000. Individu, Masyarakat, dan Sejarah: Kajian Kritis Buku Pelajaran Sekolah di Indonesia. Yogyakarta. Kanisius.
- _____. 2001. Mistisisme Jawa : Ideologi di Indonesia. Yogyakarta. LKIS
- _____. 2003. Wacana Publik Indonesia: Kata Mereka Tentang Diri Mereka. Yogyakarta. Kanisius.
- McGregor, Katharine E. 2008. Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indonesia. Yogyakarta. Syarikat.
- Moriyama, Mikihiro. 2005. Semangat Baru: Kolonialisme, Budaya Cetak, dan Kesastraan Sunda Abad ke-19. Jakarta. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Suyono, Seno Joko. 2002. Tubuh yang Rasis: Telaah kritis Michel Foucault Atas Dasar-Dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Philpott, Simon. 2003. Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme. Yogyakarta. LKIS.
- Dhakidae, Daniel. 2003. Cendikia dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru. Jakarta. Gramedia.
- Fiske, Jhon. 1990. *Introduction to Communication Studies* .Yogyakarta. Jalasutra.
- Harahap, Oky Syeiful R, dkk. 2011. Mencari Indonesia: Meninjau Masa lalu, Menatap Masa Depan. Sumedang. LPPMD Unpad
- Mills, Sara. 1997. *Discourse*. London&Newyork. Routledge.

- Poespowardjo, Soeryanto. 1994. Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Jakarta. Gramedia.
- Radford, Gary P. 2005. *On The Philosophy of Communications*. Belmont. Wadsworth
- Tilaar, H.A.R. 1995. 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995 : Suatu Analisis Kebijakan. Jakarta. Grasindo.
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*, Longman, London.
- _____ 1995. *Media Discourse*, Edward Arnold, London.
- _____ 1995. *Critical Discourse Analysis*, Longman, London.
- Hall, Stuart, et al. (ed).1980. *Culture, Media, Language*. London. Routledge. .
- Halliday, M.A.K & Hasan, Ruqaiya .1992. Bahasa, konteks, dan Teks; Aspek-aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press,
- Heryanto, Ariel. 2006. *State Terrorism and Political Identity in Indonesia*. London and Newyork. Routledge
- Norholdt, Henk Schulte. 2008. Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. KTILV-Jakarta. Yayasan Obor.
- Nordholt, Henk Schulte. 2005. *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan*. Bantul. LKIS
- Haryanto, Ignatius.2007. *Ketika Sensor Tak Mati-Mati*. Jakarta. Yayasan Kalam
- Matroji. 2006. *Sejarah Untuk SMP Kelas VIII*. Jakarta. Erlangga
- Matroji. 2006. *Sejarah Untuk SMP kelas VII*. Jakarta. Erlangga
- Samuel, Hanneman. 2010. *Genealogi Kekuasaan Ilmu Sosial Indonesia: Dari Kolonialisme Belanda Hingga Modernisme Amerika*. Depok. Kepik Ungu
- Zurbuchen, Mary. S. 2005. *Begining To Remember The Past In The Indonesian Present*. Singapore. University of Singapore press.

- Abdulah, Taufik. 2001. Nasionalisme Dan Sejarah. Bandung. Satya Historika.
- Purwanto, Bambang. 2006. Gagalnya Histografi Indonesiasentris. Jogjakarta. Ombak
- Lindsya, Jennifer. 2011. Ahli Waris Budaya Bangsa: Menjadi Indonesia 1950-1965. Bali. Pustaka Larasan.
- Shiraishi, Takashi. 1997. Zaman Bergerak: Radikalisaasi Rakyat di Jawa 1912-1926. Jakarta. Grafiti.
- Simbolon, Parakitri T. 2007. Menjadi Indonesia. Jakarta. Kompas
- Zelizer, Barbie. 2008. *Explorations in Communication and History*. London. Routledge.
- Lane, Maxe. 2012. Malapetaka Di Indonesia: Sebuah Esai Renungan Tentang Pengalaman Sejarah Gerakan Kiri. Jakarta. Djaman Baroe.
- Said, Edward. 1995. Kebudayaan dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat. Jakarta. Mizan
- Widiastono, Tonny D. 2004. Pendidikan Manusia Indonesia. Jakarta. Kompas
- R. Carrette, Jeremy. 2011. Agama, Sexualitas, Kebudayaan: Esai, Kuliah, dan Wawancara Terpilih Foucault. Jogjakarta. Jalsutra
- Van Niel, Robert. 2009. Munculnya Elit Indonesia Modern. Jakarta. Pustaka Jaya
- Mrazek, Rudolf. 2006. Engineers of Happy Land: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di sebuah Koloni. Jakarta. Yayasan Obor
- Gouda, Frances. Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942. Jakarta. Serambi

Essay

Henks Shulte Nordholt. 2004. “ De-colonising Indonesian Historiography”.Sweden. Lund University

Sumber Online

Republika.co.id

Kompas. Com

Rumah Kiri. Net

